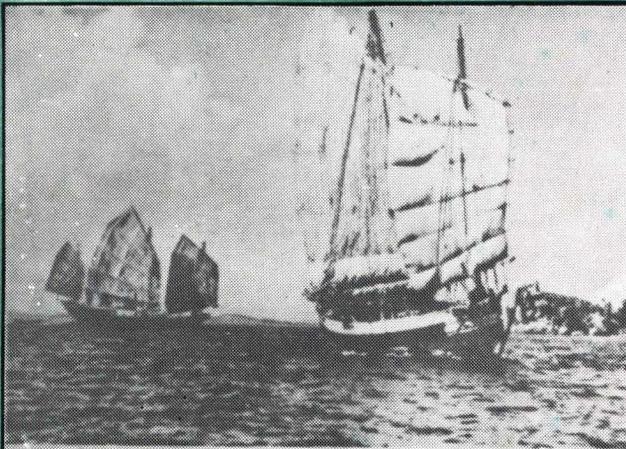


SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA



Atas: perahu jung Cina dekat pulau Sambu, salah satu pulau di kepulauan Riau, di dekat pantai timur Sumatra. Sejak dulu orang Cina memainkan

membawa perubahan. UU mata uang tahun 1817 hanya memulihkan keadaan abad ke-17 dengan memberi nilai kepada mata uang lima sen Hindia Belanda saat itu nilai uang lima sen Belanda yang

secara resmi 20% nilainya daripada nilainya. Pada saat bersa kertas yang lama perunggu yang jell dilepaskan. Bahkan Jendral protes, katar nya ia harus meng uang Hindia Bel diterimanya ke rum bangkrut!

Kembali berjuta-juta perunggu beredar seorang pun tahu. Penurunan nilai u dengan kenaikan ha bidang, yang tidak k akibatkan pendud menderit, tetapi ju sulit ekspor. Di Javansche Bank pada dan dikeluarkanny

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Tim Penulis :

R.Z. Leirissa

G.A. Ohorella

Yuda B. Tangkilisan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1996**

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Tim Penulis : RZ. Leirissa
G.A. Ohorella
Yuda B. Tangkilisan
Penyunting : Susanto Zuhdi
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Jakarta 1996
Edisi 1996
Dicetak oleh : cv DEFIT PRIMA KARYA, Jakarta

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi. kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin menyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya proyek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku *Sejarah Perekonomian Indonesia* merupakan salah satu hasil kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994/1995

Buku ini memuat uraian tentang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia sejak masa prasejarah, perkembangan kota-kota dagang dari masa emporium sampai imperium, ekonomi Indonesia masa Tanam Paksa, masa revolusi, dan masa pembangunan.

Penulisan *Sejarah Perekonomian Indonesia* ini merupakan kajian awal dari penelitian Sejarah Perekonomian Indonesia secara keseluruhan yang meliputi berbagai aspek yang akan dilakukan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah kesejarahan dan memberi informasi yang memadai bagi masyarakat yang berminat pada kajian tersebut. Di samping itu diharapkan pula dapat menjadi bahan bagi peningkatan kesadaran sejarah masyarakat pada umumnya.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, November 1996

**Pimpinan Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Ohorella', with a horizontal line underneath.

Dra. G.A. Ohorella

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Foto/Gambar	xi
Pendahuluan	1
Bab I Nusantara Pra Emporium	
1.1 Ekonomi Prasejarah	5
1.2 Sistem Pertanian Tradisional	9
1.3 Perdagangan Masa Sriwijaya dan Majapahit	15
Bab II Nusantara dalam Kurun Niaga	
2.1 Pelayaran Niaga di Nusantara	27
2.2 Dominasi VOC	39
2.3 Nusantara Semasa VOC	44
Bab III Cengkeraman Kolonialisme	
3.1 Cultuur Stelsel	53
3.1.1 Cultuur Stelsel di Luar Jawa	61
3.1.2 Kaitan Cultuur Stelsel dengan Masyarakat	65
3.2 Perkebunan Swasta	67
3.2.1 Perkebunan Swasta di Jawa	67
3.2.2 Perkebunan Swasta di Luar Jawa	74

3.3	Pertambangan di luar Jawa	78
3.4	Perkebunan Rakyat	80
3.5	Integrasi Ekonomi	83
Bab IV Menuju Kemakmuran		
4.1	Masa Penduduk Jepang dan Revolusi Kemerdekaan 1942--1950	90
4.2	Masa Demokrasi parlementer 1950--1957	93
4.3	Masa Demokrasi Terpimpin 1958--1966	94
4.4	Masa Orde Baru : Repelita IV	100
Penutup		112
Daftar Pustaka		117
Foto/Gambar		121

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Perahu Jung Cina di perairan Pulau Sambu, Kepulauan Riau, pantai timur Sumatera.
- Gambar 2 : Bandar Kanton yang sangat penting untuk perdagangan internasional. Pada abad ke-17 Kanton unggul atas ibu kota lain di Cina karena kekayaan kapalnya bermacam-macam.
- Gambar 3 : Kantor Dagang di Negapatman di Pantai Coromandel, sebelah Timur India.
- Gambar 4 : Kapal-kapal Paketvaart di Pelabuhan Alam Buleleng-Bali di tahun duapuluhan, abad yang lalu.
- Gambar 5 : Sebuah pasar, tempat tukar-menukar uang.
- Gambar 6 : Satu di antara benteng-benteng VOC di Maluku pada abad ke-17 dan 18
- Gambar 7 : Kapal-kapal dagang abad ke-17
- Gambar 8 : Pieter van den Broecke, pengganti Jan Pietersz Coen sebagai pimpinan benteng dekat Jayakarta tahun 1618
- Gambar 9 : Tempat pengeringan Cengkeh di Ambon-Maluku pada abad ke-17
- Gambar 10 : Beberapa jenis mata uang abad ke-18
- Gambar 11 : Budak-budak pemetik buah pala menyerahkan hasil panennya. Tahun 1860 pemetik buah pala dilakukan oleh budak kaum parkenier.

- Gambar 12 : Kemasan-kemasan tembakau Deli-Sumatera Timur siap dikirim ke Negeri Belanda.
- Gambar 13 : Sebuah tempat penyemaian bibit tembakau di perkebunan sekitar Medan-Sumatera Timur.
- Gambar 14 : Para buruh wanita Jawa di perkebunan tembakau di Sumatera Timur sekitar tahun 1920.
- Gambar 15 : Pabrik Gula Colomadu di Desa Malangjiwan-Solo, didirikan oleh Pangeran Mangkunegoro IV tahun 1861.
- Gambar 16 : Pekerjaan menyortir daun teh di Perkebunan Waspada dekat Garut Jawa Barat sebelum tahun 1874.
- Gambar 17 : Proses pengeringan kelapa menjadi kopra.
- Gambar 18 : Stasiun penelitian pohon kelapa sawit di Jawa Tengah.
- Gambar 19 : Pabrik karet di Sumatera Timur
- Gambar 20 : Kebun kina di Cibeureum Jawa Barat tahun 870
- Gambar 21 : Sebuah Bank Kredit Rakyat pada awal abad ke-20
- Gambar 22 : Bank Niaga Hindia Belanda di Semarang, kantor pusatnya berada di Amsterdam sejak tahun 1863.
- Gambar 23 : Cabang kantor dagang *Nederlandse Handel-Maatschappij* (NHM) di Batavia pusat, didirikan pada tahun 1824 oleh Raja Willem.

PENDAHULUAN

Letak Nusantara pada garis katulistiwa, ditambah dengan sumber daya alamiahnya, membawa keuntungan tersendiri dalam masa pra-industri. Dalam masa itu Nusantara tidak dapat terpisah dari dunia pelayaran niaga Asia pada umumnya. Sudah lama diketahui bahwa, sejak abad-abad pertama Masehi, Nusantara berinteraksi dengan berbagai kawasan lain di Asia melalui jalur pelayaran-niaga itu. Melalui jalur ini pula Nusantara bersentuhan dengan peradaban-peradaban Hindu/Budha dan Cina, sehingga memperkaya kehidupan penduduknya.

Di zaman perekonomian Asia telah maju, berkembang dengan baik dan berkuasa luas, perekonomian dunia lain terutama Eropa belum mencapai taraf kemajuan yang demikian. Selama berabad-abad kafilah yakni rombongan aneka macam produk Asia, menempuh perjalanan jauh ke Eropa untuk menjual produk Asia tersebut dengan harga tinggi.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Eropa, permintaan akan berbagai produk Asia semakin bertambah. Kafilah-kafilah kewalahan untuk memenuhi permintaan itu. Maka kapal-kapal Eropa mulai mencari jalan berlayar ke Asia, Di abad ke-16 berbagai perusahaan dagang, terutama dari Spanyol dan Portugis, menempuh pelayaran yang jauh dan berbahaya ke Hindia Timur. Suatu hal baru bagi pedagang negara-negara Asia ialah diperkenalkan cara berniaga

orang Eropa. Bangsa Eropa mendirikan bursa besar di satu tempat, yang sepanjang tahun menampung aneka barang dagangan yang diinginkan.

Dunia pelayaran Nusantara dalam konteks yang luas itulah yang menjadi fokus dalam buku ini. Permintaan akan rempah-rempah dari Nusantara, seperti lada, pala dan cengkeh, dari berbagai belahan dunia menyebabkan Nusantara menjadi bagian penting dari suatu tatanan ekonomi dunia yang berintikan pelayaran-niaga antara-benua ketika itu. Oleh karena itu sebelum membahas dunia pelayaran-niaga Nusantara, perlu juga dibahas terlebih dahulu masa pra sejarah Indonesia yang sudah mulai terlibat dalam dunia pelayaran niaga Asia tersebut, khususnya di Samudra Hindia dan perairan Nusantara. Dengan demikian buku ini akan menguraikan sekilas tentang Nusantara di masa Pra Emporium yang meliputi ekonomi tentang Nusantara di masa Pra pertanian tradisional dan perdagangan dimasa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Selanjutnya akan diuraikan tentang keadaan Nusantara di masa Emporium dengan judul Nusantara Dalam Kurun Niaga. Bagian ini mengulas tentang pelayaran niaga di Nusantara, dominasi VOC dan Nusantara pada masa VOC tersebut. Lebih lanjut buku ini akan menguraikan tentang tindak tanduk VOC di Indonesia di dalam bab yang diberi judul Cengkeraman Kolonialisme. Bab ini akan mengulas tentang culturstelsel, perkebunan-perkebunan swasta dan perkebunan rakyat di Indonesia.

Pada bab terakhir dengan judul Menuju Kemakmuran Rakyat, memuat uraian mengenai aktivitas perekonomian dan aspek-aspek politik yang berada pada masa perjuangan baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Uraian bab ini meliputi masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin dan masa orde baru.

Meskipun uraian dalam buku ini dimulai dari masa prasejarah sampai masa Orde Baru, buku ini tidak dimaksudkan untuk memberi gambaran yang sangat lengkap tentang perkembangan perekonomian.

Uraian dalam buku ini hanya merupakan bahan informasi dan inventarisasi bagi kajian tentang sejarah perekonomian Indonesia selanjutnya yang lebih baik dan ilmiah, apabila dibandingkan dengan sejumlah besar karya-karya yang telah ditulis dan diterbitkan mengenai sejarah perekonomian di kawasan Asia Selatan, The Kian Wie menegaskan bahwa pengkajian sejarah ekonomi Asia Tenggara secara sistematis boleh dikatakan belum dimulai.. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia relatif kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu kajian dalam buku ini diharapkan akan menjadi awal dari kajian-kajian selanjutnya mengenai aspek-aspek perekonomian terutama yang akan dilakukan di dalam Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

BAB I

NUSANTARA PRA EMPORIUM

1.1 Ekonomi Prasejarah

Ekonomi Pra Sejarah Nusantara sangat erat kaitannya dengan masa prasejarah Indonesia atau Nusantara. Pra Sejarah Indonesia itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah umat manusia sendiri, bahkan sejarah alam semesta.

Dari berbagai penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi, Indonesia telah didiami manusia purba yang meninggalkan jejak mereka pada awal masa Plestosen. Manusia purba ini yang dikenal dengan *Pithecanthropus Modjokertensis*, disamping ada pula *Meganthropus palaeojavanicus*. Pada masa-masa selajutnya hidup manusia yang sudah lebih maju bentuknya yakni *Pithecanthropus erektus* dan *Pithecanthropus soloensis*. Kedua jenis manusia ini hidup pada masa plestosen tengah dan akhir bersama-sama dengan *Homosapiens* dari Wajak (*Homo Wadjakensis*).

Diterangkan bahwa berburu dan mengumpulkan makanan, merupakan corak penghidupan yang menjadi pokok dari tingkat perkembangan budaya pertama pada kala Plestosen itu. Kala Plestosen yang berlangsung kurang lebih tiga juta tahun perkembangan jasmani dan rohani manusia sangatlah lamban. Selama masa tersebut cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan, diikuti oleh manusia tanpa banyak mengalami perubahan. Dengan alat-alat yang sangat sederhana mereka melangsungkan dan mempertahankan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang sangat tergantung pada alam dan lingkungan

hidup, merupakan kegiatan utama yang berlanjut sampai masa Holosen.

Corak penghidupan yang mementingkan perburuan dan pengumpulan bahan makanan (umbi-umbi, kerang dan lain-lain) masih diteruskan. Sedangkan gejala corak hidup bercocok tanam dan beternak baru timbul sekitar 6000 tahun sebelum masehi.

Masa Prasejarah Indonesia yang berakhir pada abad ke-4 dan ke-5 masehi tidak banyak memberi informasi yang mendetail tentang perekonomian. Akan tetapi dari segi antropologi dan arkeologis kita dapat memberi gambaran secara umum tentang perekonomian dari masa tersebut.

Sampai permulaan tahun masehi manusia Indonesia sudah bertempat tinggal di gua-gua walau belum menetap. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil kegiatan manusia berupa lukisan-lukisan di dinding-dinding gua dan dinding karang. Di samping itu dengan adanya berbagai alat yang menunjukkan peningkatan kehidupan. Misalnya dengan ditemukan benda-benda dan alat-alat yang terbuat dari logam yang menggantikan fungsi dari alat-alat dan benda-benda batu. Seiring dengan itu pula manusia mulai bercocok tanam dan menggunakan perhiasan berupa gelang dari batu dan kerang (Marwati Djoened P dan Nugroho Notosusanto, SNI, 1990).

Dari beberapa penelitian yang dilakukan ahli ada laporan penelitian arkeologi dari CJH. Franssens bahwa di daerah Jawa Barat orang sudah menggunakan perhiasan gelang dari batu-batu pilihan seperti agat, kalsedon dan jaspis berwarna putih, kuning, coklat, merah dan hijau. Von Koningswald juga melaporkan menemukan gelang-gelang kulit kerang dan sejumlah manik-manik serta beliung persegi di daerah Krai dekat Surakarta. Selanjutnya MWF Tweddie mengatakan bahwa perhiasan-perhiasan tersebut dikejakan dengan cara menggurdi seperti gelang-gelang batu yang dikerjakan di Malasyia dan Thailand. Sedangkan di luar Indonesia gelang-gelang batu seperti itu, ditemukan juga oleh Szechwan, Fongtien, Siberia, Jepang, Korea, Jekol, Vietnam, Mungthai, Malaysia, Honan, Lamma dan Taiwan.

Dengan adanya bukti penemuan alat-alat dan perhiasan-perhiasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa cara hidup manusia terus mengalami perubahan dan peningkatan yang tentu sangat erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian. Masyarakat sudah menampakkan tanda-tanda menetap dan mengembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam.

Menurut R.P. Suyono dalam Sejarah Nasional Indonesia I (Marwati Djoened P dan Nugroho Notosusanto), dengan dikenalkan kegiatan bercocok tanam maka dapat diperoleh sedikit gambaran mengenai pola-pola tempat tinggal dan kegiatan perekonomian pada masa bercocok tanam tersebut. Ada kemungkinan telah terbentuk desa-desa kecil semacam pendudukan walaupun belum beraturan, ada kegiatan bercocok tanam dan sudah ada untuk perdagangan yang bersifat barter. Demikian pula hubungan antara kelompok.

Ada dua hal penting yang berhubungan erat dengan pertumbuhan masyarakat dan perkembangan peradabannya. Pertama telah ada mesyarakat yang bertempat tinggal dan kedua ada tenggang waktu antara menanam dan memetik hasil. Dalam waktu penantian lain yang berkembang di luar sektor pertanian yaitu berupa aktivitas yang menghasilkan keparluan rumah tangga seperti kerajinan anyaman, membuat gerabah, mengasah alat-alat kerja, membangun rumah secara "gotong-royong" membuat perahu, rakit dan lain-lain. Hasil dari kegiatan itu sudah diperdagangkan pula secara barter (tukar menukar barang). Barang-barang yang dipertukaran sudah diangkut dalam jarak yang jauh melalui sungai, laut dan darat. Perahu dan rakit bambu tentu memegang peranan amat penting sebagai sarana lalu lintas perdagangan dan sekaligus sebagai alat penyebar budaya.

Barang yang dipertukarkan bukan saja hasil-hasil dari aktivitas diluar kegiatan bercocok tanam seperti gerabah, anyaman dan alat-alat bekerja tetapi juga hasil-hasil pertanian/cocok tanam seperti keladi (talas), uwi, sukun, pisang, buah kelapa, durian, salak, rambutan dan duku. (Marwati P dan Nugroho Notosusanto, SNI I, 1990).

Ekonomi pra sejarah di atas dalam ilmu Antropologi lebih dekat pada "Sistem mata pencaharian hidup". Sistem mata pencaharian hidup tersebut selalu mengalami perkembangan sesuai keadaan alam, iklim

dan bentuk fisik manusia serta perkembangan peradaban. Mata pencaharian hidup prasejarah meliputi berburu, meramu, mencari ikan dan bercocok tanam. Oleh Prof. Kuntjaraningrat, ketiga bentuk mata pencaharian yang disebut lebih awal sering dikenal dengan sebutan "ekonomi pengumpulan pangan " atau "*food gathering economics*". Pada masa tersebut penghidupan terpusat pada mempertahankan diri di tengah-tengah alam yang serba penuh tantangan dengan kemampuan masyarakat yang masih terbatas. Pengumpulan pangan menjadi kegiatan pokok sehari-hari. Penangkapan ikan atau Perikanan sebagai unsur terpenting dikemudian hari dalam rangka ekonomi pengumpulan pangan biasanya terdapat pada suku-suku bangsa yang berdiam di pulau-pulau dan berhadapan dengan pantai. Dikemudian hari pula di tempat-tempat tertentu di dunia, perikanan lazim dilakukan dalam kombinasi dengan pertanian. Sedangkan meramu dan berburu sebagai unsur yang dominan sejak masa "pra Isejarah" pada akhir abad ke-19 baru mulai menghilang dari banyak tempat di dunia. (Kuntjaraningrat 1974).

Hidup menetap di suatu tempat memberi kemungkinan terjadinya perkembangan penduduk dengan pesat. Pada masa itu para wanita dan anak-anak mulai mendapat tempat dalam kegiatan tertentu misalnya dalam pembuatan gerabah. Para ahli memberi catatan bahwa teknologi pembuatan gerabah di Indonesia pada masa bercocok tanam, tingkatnya tidak setinggi teknologi yang dikenal didaratan Asia Tenggara seperti Malaysia, Muangthai, Cina, Taiwan, dan Jepang. (HR. Van Heekeren dan E. Knuth 1979). Disebutkan bahwa ditempat-tempat tersebut pada masa yang sama telah dikenal penggunaan roda pemutar serta pemakaian tetap yang dibalut dengan seutas tali atau diukir dengan bermacam pola. Hasilnya sudah diperdagangkan ke luar daerah asalnya dengan nilai yang tinggi.

Pada masa ini telah ditemukan juga manik-manik yang dibuat dari bermacam-macam bahan dengan berbagai bentuk dan warna. Diantaranya dari batu akik, kaca dan tanah liat yang dibakar. Manik-manik tersebut berfungsi sebagai alat jual beli atau alat tukar, benda pusaka disamping sebagai perhiasan. Oleh sebab itu hanya orang beradalah yang memiliki benda tersebut. Manik-manik yang ditemukan di Indonesia bermacam-macam bentuk dan ukurannya

yakni bulat silindrik, bulat panjang, berfaset-faset, dan lain-lain. Ada bentuk-bentuk terkecil yang kadang-kadang berukuran hanya sebesar-kepala jarimu. Warna-warna yang umum adalah biru, merah, kuning, hijau, atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Manik-manik berwarna hitam yang dibuat dari batu andesit konon telah ditemukan di Sangiran Jawa Tengah.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi telah meningkatkan pula kesejahteraan hidup manusia. Terdapatnya surplus dalam memenuhi keperluan hidup mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk dimana-mana. Dalam tata kehidupan yang teatur berburu binatang liar masih dilakukan. Perburuan ini selain untuk menambah mata pencaharian juga dimaksud untuk menunjukkan keberanian dan kegagahan dalam lingkungan masyarakat.

1.2 Sistem Pertanian Tradisional

Profesor Kuntjaraningrat menguraikan bahwa setelah kepandaian bercocok tanam menyebar dari kurang lebih delapan tempat persebaran di dunia, maka ekonomi pengumpulan pangan dengan bentuk berburu dan meramu mulai terdesak. Di Indonesia di beberapa tempat seperti di pantai utara Irian Jaya, di sebelah barat Jayapura, daerah-daerah di dekat Tanah Merah, beberapa tempat di pulau Seram, Maluku Tengah, di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, sampai awal abad ke-20 penduduk masih hidup dari meramu sagu. Pekerjaan itu merupakan mata pencaharian hidup yang terpenting disamping menangkap ikan.

Di Irian dan Maluku misalnya ± di akhir abad 19 penduduk sudah memiliki wilayah sagu tersendiri yang diwarisi dari orang tuanya dari garis ayah; selain seseorang dapat pula mengambil sagu di wilayah saudara laki-laki ibunya. Dalam mencari dan mengolah sagu seseorang dapat bekerjasama dengan dengan ipar (Saudara laki-laki isteri) baik di wilayah sendiri atau meminta bekerjasama dengan ipar di wilayah ipar. Dalam satu team seperti itu biasanya hasilnya dibagi rata. Kecuali apabila pengolahan dilakukan berdasarkan pesanan atau perjanjian maka pembagian hasilnya pun ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Dalam perkembangan kemudian orang mulai mengenal sekedar berkebun. Akan tetapi menurut Kuntjaraningrat berkebun yang dilakukan dengan sistem berladang itu tampaknya merupakan suatu aktifitas sambilan. Tanaman yang ditanami adalah ubi-ubian, keladi, pisang, tebu, pepaya, beberapa macam sayuran dan palawija. (Kuntjaraningrat 1977)

Di bidang perikanan, dalam masyarakat desa nelayan beberapa tempat di Maluku Tengah misalnya hampir semua nelayan memiliki sebuah perahu kecil. Perahu dikayuh oleh dua orang, yaitu si pemilik dengan pembantunya, yang biasanya adalah anaknya sendiri. Hampir setiap hari keduanya bersama-sama berlayar menyeberangi daerah ombak pantai sejauh 2 atau 3 km ke laut, di mana mereka dapat melemparkan jala untuk mendapatkan ikan. Namun jarak itu masih kurang jauh untuk dapat menangkap ikan dalam jumlah yang lebih banyak. Nelayan-nelayan miskin seperti mereka yang hanya memiliki perahu kecil hanya dapat menangkap ikan-ikan tersebar. Dengan demikian hasil usaha mereka tentu tidak terlalu besar. Mereka juga sering berlayar menangkap ikan pada malam hari, terutama pada waktu terang bulan.

Para nelayan biasanya berusaha keras untuk dapat membeli perahu besar yang dikayuh empat hingga lima orang. Dengan perahu besar mereka dapat berlayar lebih jauh sampai 7-8 km. ke laut, dimana terdapat daerah-daerah yang dilalui jenis-jenis ikan yang mondar-mandir dalam kawanan besar. Hanya para nelayan yang lebih berhasil, dan yang lebih berada saja dapat memiliki perahu-perahu besar seperti itu. Perahu-perahu biasanya mereka kemudikan sendiri dan awak kapalnya adalah anak-anak mereka sendiri atau kaum kerabat mereka yang lain. Ada juga diantara mereka yang bukan kerabat, tetapi kenalan dekat. Dalam perahu serupa itu belum ada pembagian kerja yang tegas. Semua awak kapal dapat mengemudikan kapal melepar dan menarik jala, menombak ikan, dan lain sebagainya. Mereka semuanya harus turut membantu untuk memilih, membersihkan, dan mengawetkan ikan yang tertangkap. Misalnya dengan membuat ikan asin.

Sistem upah yang mereka pakai adalah dengan bagi hasil. Dalam laporan penelitian Profesor Kuntjaraningrat, menguraikan bahwa tiap

awak kapal tidak mendapat upah berupa sejumlah uang tetap, tetapi mendapat bagian tertentu dari hasil penangkapan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, berdasarkan perjanjian antara mereka dengan pemilik perahu. Cara menghitung adalah dari hasil kotor penangkapan disisihkan untuk penanaman modal. Untuk biaya pemeliharaan perahu, untuk biaya pemeliharaan serta perbaikan jala dan alat-alat penangkap yang lain, untuk ongkos bekal makanan yang dibawa selama perjalanan dsb., sehingga tinggal sisanya yang berupa hasil bersih. Hasil bersih inilah yang dibagi. Bagian dari tiap awak kapal biasanya kurang lebih sama, walaupun sipemilik sebagai kemudi utama dan orang yang bertanggung jawab, biasanya mendapat sedikit saja lebih banyak, dan seorang anak muda yang turut sebagai pembantu yang masih belajar, mendapat bagian yang jumlahnya lebih sedikit. Demikian kalau hasil bersih dari sebuah perahu yang baru kembali adalah misalnya 60%, dan hasil ini harus dibagi antara lima orang, maka si pemilik pengemudi utama akan mendapat 14%, ketiga awak kapal yang lain mendapat 12%, dan sipembantu muda yang baru ikut berlayar mendapat 10%. Pembagian serupa itu biasanya dianggap cukup adil. Selain itu sistem bagi hasil seperti itu juga merupakan suatu perangsang bagi para nelayan serta masing-masing awak kapalnya untuk lebih giat lagi bekerja. (Kurnjajaraningrat 1974)

Di samping pemilik perahu yang berlayar- dengan awak kapalnya berdasarkan atas sistem bagi hasil, adapula pemilik perahu yang tidak ikut berlayar. Pemilik perahu semacam itu biasanya adalah nelayan yang sudah amat kaya sehingga dapat memiliki lebih dari sebuah perahu, kadang-kadang tidak hanya tiga-empat buah, tetapi sampai sepuluh atau lebih. Nelayan-nelayan yang kaya itu biasanya mempekerjakan perahu-perahu mereka kepada buruh-buruh nelayan yang berlayar dari menangkap ikan berdasarkan upah yang tetap. Mereka mendapat upah itu sesudah hasil penangkapan mereka diserahkan kepada pemilik perahu.

Pertanian mulai berkembang dengan memperhatikan bagaimana manusia mulai bercocok tanam. Menurut para ahli Pra Sejarah bercocok tanam telah dimulai dalam zaman Neolithic atau zaman Batu Bara. Di Indonesia zaman itu diduga kira-kira mulai pada 2000 tahun sebelum masehi. (Nugroho Notosusanto 1982). Namun aktivitas

bercocok tanam di Indonesia itu baru diketahui pada awal abad 1-4 sesudah masehi. Pengertian tentang sistem bercocok tanam itu sendiri dapat dibedakan dalam 2 macam yaitu : 1) bercocok tanam di ladang, 2) bercocok tanam menetap.

Bercocok tanam di ladang adalah suatu cara bercocok tanam yang terutama ada di daerah hutan rimba tropik, dan juga di daerah-daerah sabana tropik dan sub tropik. Para sarjana memakai berbagai sebutan untuk cara bercocok tanam ini, misalnya *Shifting Cultivation (Slash and Burn Agriculture)*, dan akhir-akhir ini sering di pakai istilah *Swidden Agriculture*. Istilah itu menggambarkan unsur-unsur yang terpenting dalam teknik bercocok tanam. Cara bercocok tanam di ladang itu dilakukan sebagai berikut :

- a) suatu daerah di hutan atau di sabana dibersihkan (ditebang dan dibakar),
- b) bidang tanah ladang yang dengan demikian dibuka, ditanami satu sampai paling banyak tiga kali (1-2 tahun),
- c) kemudian ladang tadi dibiarkan untuk waktu yang lama (10-15 tahun), sehingga menjadi hutan kembali,
- d) sesudah itu hutan bekas ladang tadi dibuka lagi dengan cara-cara seperti tersebut dalam sub a, dan demikian seterusnya. (P. Wayong, 1977).

Cara bercocok tanam seperti itu menyebabkan diperlukannya banyak lahan, karena setelah dua tau tiga tahun dibuka, lahan atau tanah tersebut dibiarkan untuk beristirahat.

Tanah yang dipakai untuk ladang sering kali belum merupakan hak milik dari seseorang individu. Pada banyak suku bangsa di Indonesia yang melakukan bercocok tanam di ladang, tanah itu adalah kepunyaan umum. Ini berarti bahwa tanah dikuasai oleh kelompok atau kelompok-kelompok yang menduduki daerah yang bersangkutan. Akan tetapi ada banyak suku bangsa yang melakukan bercocok tanam seperti itu juga akan terlihat adanya gejala-gejala yang akan menyebabkan timbulnya hak milik individu. Hal ini berkembang karena sering kali seorang individu setelah selesai mengerjakan dari memetik hasil bumi dari tanah desanya, tidak meninggalkan tanah itu.

Ia tetap memelihara hubungannya dengan tanah tadi dengan cara misalnya menanam pohon-pohonan dari tumbuhan-tumbuhan yang berumur panjang. Misalnya kelapa, karet, kopi, kemiri dan beberapa tanaman yang di kemudian hari bernilai ekonomis seperti pala dari cengkeh.

Perkembangan hak milik individu biasanya juga bersamaan dengan proses bertambah padatnya penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka berbagai krisis akan timbul dalam masyarakat. Masyarakat mungkin akan pecah dan sebagian akan pindah dan bermigrasi ke daerah-daerah yang masih "kosong" atau orang akan mulai merubah teknik bercocok tanamnya dari peladangan menjadi bercocok tanam menetap dengan pengolahan tanah dan dengan irigasi.

Di kepulauan Maluku di ladang-ladang seperti tersebut di atas penduduk menanam pohon cengkeh dan pohon pala di samping tanaman untuk makanan dan keperluan lokal. Hasil dari cengkeh dan pala itu sudah dapat diekspor ke Asia dan Eropa sejak abad ke - 15. Demikian pula di daerah Sumatera Selatan dan Aceh, lada merupakan hasil bumi ladang yang sudah di ekspor sejak lama. Selain itu kopi dan teh yang ditanam dengan sistem peladangan, juga merupakan hasil bumi yang penting dan sudah diekspor (Marwati Djunud dan Nugroho Notosusanto, SNI-III : 1982).

Pada tahun-tahun berikutnya karet peladangan juga merupakan suatu hasil bumi yang amat penting dari Indonesia.

Selanjutnya menurut Kuntjaraningrat, pada bercocok tanam menetap ilmu pengetahuan dan teknik manusia sudah mencapai suatu taraf tertentu, sehingga manusia dapat mengatasi berbagai macam rintangan alam. Para ahli pertanian yang membuat klasifikasi berdasarkan atas teknik bercocok tanam atau atas macam dan jenis tumbuh-tumbuhan yang ditanam atau juga atas macam dan jenis organisasi dari produksi bercocok tanam (D. Whittlesey dalam Kuntjaraningrat 1977).

Uraian mengenai sistim pertanian selanjutnya akan meliputi pertanian rakyat dan perkebunan. Pada pertanian rakyat biasanya mengusahakan tanaman untuk bahan makanan dan perdagangan sedang perkebunan terutama mengusahakan tanaman perdagangan.

Tanah yang digunakan untuk pertanian bermacam-macam status seperti tanah milik kelompok desa, tanah bagi kepala desa (di Jawa tanah bengkok), tanah milik individu atau tanah yasan (di Jawa) dan tanah pekulen. Adapula tanah datu (di Maluku) tanah iegendom dan lain-lain. Tanah tersebut digunakan untuk pertanian sawah, ladang dan perkebunan. Para petani yang menggarap tanah orang lain hasilnya dibagi antara si penggarap tanah dan yang empunya tanah.

Orang bisa juga mendapat tanah secara bagi hasil dengan orang lain yang mempunyai tanah pekulen, tanah yasan, maupun tanah bengkok, artinya orang menggarap tanah kepunyaan orang lain, dan hasil dibagi antara siempunya dan sipenggarap tanah. Besarnya bagian-bagian tentu tergantung kepada berbagai faktor seperti kualitas tanah, penawaran tenaga penggarap, atau buruh tani yang ada, dan juga pada macam tanaman yang dikerjakan. Pada tanah dengan kualitas yang baik siempunya tanah mendapat bagian yang besar, demikian pula kalau penawaran tenaga penggarap tanah besar; sebaliknya kalau penawaran tenaga penggarap itu kecil maka orang yang mengerjakan tanah tentu akan lebih mahal, dan merekalah yang minta bagian yang besar. Tergantung kepada faktor-faktot itu, di berbagai tempat ada kebiasaan pembagian untuk setiap, pihak sebesar setengah yang disebut *maro*; sering kali pula siempunya tanah bisa mendapat bagian lebih besar, sebanyak $\frac{2}{3}$ yang disebut *maratule*. Kadang kala siempunya tanah bisa mendapat bagian yang kurang, sebesar $\frac{1}{5}$, misalnya untuk tanaman kacang di desa-desa di Jawa Tengah bagian utara (Bachtiar Rivai 1958). Di bali selatan misalnya, dimana sistem bagi hasil disebut sistem sakah menyakah, ada empat sistem, ialah : *nandu*, *nelon*, *ngapit* dan *merepat*. Pada *nandu* sipenggarap menerima separoh dari hasil, sehingga sistem ini sama dengan *maro* di Jawa; pada *nelon* sipenggarap menerima dua per lima dari hasil; pada *ngapit* sepertiga; sedangkan pada *merepat* ia menerima seperempatnya. Kempat sistem ini dipakai berganti-ganti, tergantung kepada situasi dan kondisi serta faktor-faktor tertentu.

Sistem pertanian bagi hasil ini oleh Kuntjaraningrat dikatakan tidak hanya ada (di Jawa dan Bali tetapi terdapat juga di berbagai daerah di Indonesia dimana terkenal nama seperti meudua laba (Aceh), *perbalokkan* (di Karo), *bolapinang* (Toba) *mampaduakan*

(Minangkabau), *bagi dua* (Palembang), *bahandi* (pada orang dayak Ngaju), *tumoyo* (Tondano, Minahasa), *tesang* (Makasar), dan *nyakap* di Bali (Kuntjaraningrat 11977).

Sistem pertanian yang diatur dalam suatu organisasi kemasyarakatan dapat pula dilihat seperti sistem subak di Bali. Di dalam sistem pertanian tersebut hasil pertanian sudah diperhatikan baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Produksi hasil pertanian dengan demikian mulai diarahkan pada perdagangan. Pertanian sawah tidak hanya menghasilkan padi tetapi juga palawija seperti jagung, ketela pohon, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kedelai dan sebagainya.

Sampai pada abad ke-15 padi sudah menjadi tanaman yang disukai karena dimana saja ia bisa tumbuh dengan baik. Hanya di bagian timur Nusantara seperti pulau-pulau Timor, Selayar, Buton, Kepulauan Maluku dan Aru penduduknya masih bergantung pada sagu. Hal ini digambarkan Reid dan Dampier bahwa penduduk yang lebih miskin harus makan sagu tiga sampai empat bulan dalam setahun. Sagu yang menghasilkan tepung murni tersedia di sebagian besar daerah berawa bagi siapa pun yang memerlukannya.

1.3 Perdagangan di Masa Sriwijaya dan Majapahit

Zaman Sejarah Indonesia diketahui sejak adanya kerajaan Kutai dan Tarunanegara. Dari berita-berita Cina diketahui tentang kerajaan-kerajaan lain dengan nama *Sanfo-si*, *Che-li-fo chi*, *Ta-chi* dan *To-lo-mo* telah mempunyai hubungan dagang dengan India dan Tiongkok.

Van Leur melukiskan bahwa ketika itu di Asia terdapat dua jalan perniagaan besar, yaitu yang melalui darat dan yang melalui laut. Jalan darat disebut "jalan sutera" yang dimulai dari Tiongkok, melalui Asia Tengah dari Turkestan sampai ke laut Tengah, dimana jalan ini berhubungan juga dengan jalan-jalan kafilah dari India. Perhubungan darat antara Tiongkok dan India dengan Eropa sudah terkenal semenjak tahun 500 sebelum masehi. Jalan darat ini adalah jalan yang paling tua.

Selanjutnya Van Leur menerangkan bahwa jalan yang melalui laut ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui Selat Malaka ke India dari sini ada yang ke Teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah, melalui Mesir dan sampai juga di Laur Tengah. (JC. Van Leur 1967).

Perdagangan laut antara India, Tiongkok dan Indonesia dimulai dalam abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan antara Indonesia dengan daerah-daerah di barat melalui India.

Pada waktu itu rempah-rempah, kayu wangi, kapur barus dan kemenyan dari Indonesia telah sampai di India dan Kekaisaran Romawi.

Dewasa itu, ada dua golongan pedagang; Burger menyebutnya dengan golongan finansir yaitu orang-orang kaya, kaum hartawan yang memasukkan uangnya dalam suatu usaha perdagangan secara insidentil. Golongan yang lainnya adalah golongan saudagar kelontong atau pedagang keliling. Mereka ini biasanya ikut berkeliling dengan barang-barang dagangannya.

Keuntungan yang diperoleh pada masa itu biasanya sangat tinggi karena biaya pengangkutan sangat tinggi pula. Selain itu memakan waktu yang sangat lama, sehingga tidaklah aneh apabila para pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi.

Pelayaran dari Tonkin ke India misalnya digambarkan Burger sangatlah lama, kadang-kadang bisa mencapai 12 sampai 15 bulan; Dari Kanton ke Palembang 20 hari, sampai satu bulan, dari Aceh ke Tiongkok bisa enam bulan, sedang dari Aceh ke Seilon 20-30 hari. (Burger dan Prayudi 1962).

Perdagangan di Indonesia yaitu di kerajaan-kerajaan tradisional disebutkan Van Leur mempunyai sifat kapitalis. Lebih jelas disebut sebagai kapitalisme politik di mana pengaruh raja-raja dari kepala-kepala negeri dalam perdagangan itu sangat besar. Dalam perkembangannya kapitalisme semacam itu terbagi atas dua bentuk yaitu kapitalisme modern dan kapitalisme perdagangan.

Kerajaan Sriwijaya adalah suatu kerajaan pantai, negara perniagaan dan negara yang berkuasa di laut. Kekuatan serta kekayaan

disebabkan oleh perdagangan internasional melalui Selat Malaka, jadi berhubungan dengan jalan raya perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa. Jalan tersebut selama limabelas abad mempunyai arti yang penting dalam sejarah. Sriwijaya adalah pusat perdagangan penting yang pertama pada jalan raya ini, kemudian digani oleh tempat-tempat atau kota-kota lain.

Kapal-kapal yang melalui Selat Malaka singgah di pelabuhan-pelabuhan untuk mengambil air minum serta barang-barang perbekalan lainnya. Beberapa pelabuhan di pantai selat ini penting artinya sebagai pelabuhan perbekalan dan oleh karena itu Sriwijaya berusaha untuk memperoleh monopoli serta menguasai daerah pesisir di kedua belah pantai Selat Malaka ini. Usahnya berhasil ; daerah Jambi, daerah Lampung, semenanjung Malaka dan tanah genting Kra dikuasainya, bahkan pulau Sailan pun lama sekali diduduki oleh Sriwijaya setelah berperang dengan raja Cola di India dalam abad ke-11. Pada tahun 767 Sriwijaya merampas Tonkin (Indochina, Hindia Belakang). Pelayaran Sriwijaya meliputi lautan sampai di India dan Hindia belakang bahkan mungkin sampai ke Madagaskar. Kapal-kapal yang melalui perairan Sriwijaya diwajibkan singgah di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya tersebut sebagai kerajaan yang mengadakan "paksaan manimbun barang".

Raja Sriwijaya mempunyai kapal-kapal sendiri. Kekayaan harta benda raja serta kaum bangsawan berasal dari usaha perdagangan sendiri, dari bea-bea yang dipungut dari perdagangan yang melalui kerajaan, serta dari peperangan dan pembajakan laut. Selain itu ada perdagangan keliling yang diselenggarakan oleh saudagar-saudagar kelontong. Selama beberapa abad Sriwijaya berfungsi sebagai pelabuhan samudra pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan yang menguasai pelayaran dan perdagangan di bagian barat Indonesia. Semenanjung Malaya, Selat Malaka, Sumatra Utara, Selat Sunda kesemuanya masuk lingkungan kekuasaan Sriwijaya. Oleh Meilink Roelofsz digambarkan bahwa barang-barang yang diperdagangkan di sana ialah tekstil, kapur barus, mutiara, kayu berharga, rempah-rempah, gading, kain katun dan sengkelat, perak, emas, sutera, pecah belah, gula dan sebagainya. (Meilink Roelofsz 1962). Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya sering dikunjungi oleh para pedagang dari

Persia, Arab dan Cina yang memperdagangkan barang-barang dari negerinya atau negeri yang dilaluinya. Sedangkan pedagang Jawa membelinya dan menjual rempah-rempah.

Di samping Sriwijaya muncul kerajaan-kerajaan Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Timur. Struktur kerajaan-kerajaan ini berbeda dengan Sriwijaya. Pusat kerajaan tidak terletak di pantai, melainkan didaerah pedalaman. Sudah sejak dahulu penduduk pulau Jawa lebih banyak dibandingkan pulau Sumatra. Banyak sumber sejarah menerbitkan bahwa kerajaan-kerajaan Jawa Timur mempunyai perdagangan laut yang luas. Namun kekuasaannya tidak berdasar pada perniagaan, melainkan pada pertanian yaitu : pada usaha kaum tani, pada ekonomi desa dan pada kerja rodi serta kewajiban para petani untuk menyerahkan sebagian dari hasil buminya kepada para penguasa.

Dari uraian tersebut maka kerajaan-kerajaan Jawa terutama, berdasarkan pertanian, mempunyai dasar agraris. Perdagangan lautnya pun kuat, namun pertanianlah yang terpenting. Baik di Sumatera maupun di kerajaan-kerajaan Jawa golongan bangsawan berkuasa sendiri. KeKuasaan serta kekayaan mereka di Sumatera berdasarkan perniagaan, sedangkan di Jawa berdasarkan pertanian dan perniagaan.

Pada abad ke-11 Sriwijaya diserang kerajaan Cola dari India. Kemudian abad ke-13 Sriwijaya terdesak oleh kekuasaan di Jawa Timur sehingga kedudukannya sebagai pusat perdagangan mulai merosot dan akhirnya dikuasai bajak laut. Lokasi kerajaan kemudian pindah ke daerah Jambi. (Sartono Kartodirjo 1990).

Pada masa pemerintahan Kartanegara, Singasari di Jawa Timur, memasukkan wilayah-wilayah bekas daerah perngaruh Sriwijaya ke dalam kekuasaannya. Berkat ekspedisi Pamalayu nya, supremasi kerajaan Singasari dapat, diletakkan di hampir seluruh daerah pengaruh Sriwijaya di Sumatera bahkan sampai ke Tumasik. Dengan supremasi Kartanegara itu Sartono menyimpulkan bahwa dasar-dasar bagi lingkungan hegemoni Majapahit telah diletakkan.

Dalam berita perjalanan Marco Polo menyebut Tumasik dan kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan yang mengakui kekuasaan

Majapahit. Samudra Pasai juga mengaku kekuasaan Cina dan berkewajiban memberi persembahan kepada raja Cina. Samudra Pasai juga menjalin hubungan dengan Malaka yang mulai memuncak perdagangannya dalam abad 14. Sebagai pusat perdagangan Samudra Pasai menjalin hubungan dengan Gujarat dan Benggala dan di anak Benua India beberapa kota pelabuhan di pantai utara Jawa.

Selanjutnya disebutkan bahwa dalam bidang politik dan ekonomi, Samudra Pasai cukup kuat sehingga dapat mempertahankan kedaulatannya terhadap Malaka. Sebaliknya dengan kota-kota dagang di Jawa Kerajaan Majapahit terjalin hubungan yang baik. Bahkan *suzereinitas* Majapahit mudah diterima karena tidak membahayakan kedudukan ekonomisnya. (Sartono Kartodirjo 1990). Pada masa itu Kerajaan Majapahit telah merupakan sebuah kerajaan yang lengkap, struktur pemerintahan maupun birokrasinya. Dalam masa raja Hayam Wuruk, Majapahit berhasil mencapai puncak keemasannya. Sejak tahun 1293 sampai kurang lebih tahun 1500 Majapahit tampil sebagai pengganti Sriwijaya. Kekuasaannya sampai ke Sumatra Utara dari Maluku di mana tersebar banyak kota-kota dagang yang makmur. Perniagaan di sana tidak hanya perdagangan dan pelayaran pantai di kawasan Nusantara tetapi juga perdagangan seberang laut melalui Malaka ke Samudera Hindia.

BAB II

NUSANTARA DALAM KURUN NIAGA

Secara konseptual di sini Samudra Hindia lebih luas dari yang tertera di peta sekarang. Dalam pengertian ini, selain Samudra Hindia menurut peta itu, tercakup pula laut-laut Nusantara, Teluk, Persia dan Laut Merah yang sesungguhnya merupakan perpanjangan dari Samudra Hindia.

Dengan demikian seluruh wilayah pesisir Asia dan Timur Tengah yang dibasahi oleh Samudra Hindia tersebut di atas, merupakan suatu sistem komunikasi yang terpadu. Melalui sistem itu berbagai pelabuhan di Laut Merah, Teluk Persia, Laut Arab, Samudra Hindia, Laut Jawa dan laut-laut dalam lainnya di Nusantara, menjadi suatu kesatuan interaksi yang, sedikit-banyaknya, mempengaruhi sejarah wilayah-wilayah itu, terutama sejarah ekonomi.

Unsur lautlah yang menjadi pengikat wilayah maritim tersebut di atas. Penelitian Prof. Chaudhuri dari Universitas London (1989) berhasil mengungkapkan dengan Jelas sistem pelayaran niaga di Samudra Hindia tersebut. “Sejarah Kelautan” sebagai bidang studi dipelopori oleh Fernand Braudel dengan studinya mengenai Laut Tengah (1949). Kemudian sejarawan Prancis itu memperluas studinya sehingga mencakup seluruh dunia niaga Eropa, dengan Asia sebagai perbandingkannya. Studi dari Chaudhuri tersebut di atas mengkoreksi berbagai hal yang kurang tepat dari studi Braudel itu mengenai pelayaran-niaga Asia.

Seperti juga dikemukakan Braudel dalam studinya tentang Laut Tengah tersebut, Samudra Hindia dalam arti luas itu memiliki ciri-ciri geografis yang menjadikannya suatu sistem pelayaran. Laut yang menghubungkan berbagai wilayah di Timur Tengah dan Asia itu memiliki berbagai ciri yang relatif tidak berubah dalam jangka waktu ribuan tahun. Pertama-tama laut dan unsur-unsur kehidupan yang ada di dalamnya, lalu ketinggian atau volumenya yang ternyata terus bertambah, kemudian salinitas atau kadar garam yang relatif sama, arus-arus laut tertentu yang dapat dipelajari dan digunakan sebaik mungkin untuk dimanfaatkan bagi pelayaran.

Dengan demikian, unsur geografik itu menyebabkan jalur-jalur pelayaran tidak mudah berubah-ubah. Kalau pun terjadi perubahan pada aspek ini, maka perubahan, itu akan memakan waktu ratusan sampai ribuan tahun. Salah satu contohnya adalah perubahan jalur-jalur pelayaran yang terutama disebabkan oleh pertumbuhan karang yang menutupi jalur pelayaran tertentu sehingga perlu dicari jalur lain. Selain itu, garis pantai, terutama muara sungai, juga tidak mudah berubah sehingga pemukiman di pantai juga bisa berusia panjang. Seperti dikatakan Braudel, laut adalah unsur "longue duree" atau perubahan skala panjang. Unsur geografi inilah yang memungkinkan munculnya suatu sistem pelayaran niaga yang juga bertahan ratusan tahun. Tetapi menurut Braudel pula, dalam perubahan skala panjang itu ada pula perubahan-perubahan skala menengah seperti umpananya pola pelayaran-niaga.

Di antara unsur-unsur geografi yang membatasi perubahan skala panjang itu sistem anginlah yang terpenting di zaman di mana teknologi pelayaran masih bergantung penuh pada tenaga angin. Angin Musim yang berubah arah secara konsisten setiap setengah tahun itu menciptakan suatu prasarana yang penting bagi pelayaran-niaga. Para pelaut dan pedagang dapat memperhitungkan kegiatannya dengan tepat sesuai irama pertukaran arah angin yang konsisten itu.

Antara bulan Juni sampai bulan November angin bertiup dari arah Timur ke Barat dan di Nusantara dinamakan Musim Timur. Kemudian sejak bulan November hingga bulan Mei arah angin berubah dari Barat ke Timur, yang di Nusantara disebut Musim Barat. Dari kata "Musim" itulah orang Eropa mendapat kata "*monsoon*" untuk sistem angin yang

khas itu. Tentu saja ada variasi-variasinya juga. Pertama-tama sudah sejak bulan Agustus hingga bulan November muncul tanda-tanda akan terjadinya perubahan arah itu, sehingga sering juga bulan-bulan itu dinamakan masa pancaroba pada Musim Timur. Demikian pula antara April hingga bulan Mei terjadi masa pancaroba pada Musim Barat.

Perubahan arah angin ini terutama dikaitkan dengan letak matahari. Pada bulan-bulan April hingga November matahari terletak dibelahan Selatan bola bumi, sehingga di Australia terjadi Musim Panas. dan sebaliknya di Eropa terdapat Musim Dingin. Dalam keadaan itu di atas wilayah Eropa terdapat keadaan depresi, dan kekosongan di isi oleh angin yang berhembus dari wilayah Australia. Maka terjadilah Musim Timur itu.

Sebaliknya, antara bulan-bulan Desember hingga Mei matahari terletak pada belahan Selatan dari bola bumi, sehingga di Australia musim berubah menjadi Musim Panas dan di Eropa menjadi Musim Dingin. Depresi yang terjadi di atas Eropa (Barat). Dengan demikian pula terjadilah Musim Barat itu.

Keadaan tersebut menjadi lebih rumit lagi di Nusantara yang terletak di Khatulistiwa itu. Karena perputaran bumi maka arah Musim Timur maupun Musim Barat di Khatulistiwa mengalami perubahan lagi. Musim Timur beralih menjadi Angin Barat ketika melintasi Khatulistiwa; demikian pula Musim Barat Beralih menjadi Angin Timur ketika melintasi khatulistiwa. Keadaan ini sangat menguntungkan pelayaran-niaga di Nusantara karena para pelaut bisa menemuk dua arah baik pada saat Musim Barat ataupun Musim Timur ketika mereka melintas Khatulistiwa.

Arus-arus laut yang bersumber dari **Samudra** Pasifik atau dari, Samodra Hindia (dalam arti sempit) serta Laut Cina Selatan, juga mempengaruhi pelayaran niaga di Nusantara dan menambah kerumitan dari jalur-jalur pelayarannya.

Namun keadaan tersebut diatas tidak terlalu menyulitkan para pelaut Nusantara karena adanya pulau-pulau yang demikian, banyak, di Nusantara itu (sekitar 5000 buah). Pulau-pulau itu mempermudah navigasi di Nusantara sehingga bisa mengurangi sedikit unsur-unsur lain tersebut yang merumitkan. Para pelaut di Nusantara dapat

menjadikan ciri-ciri daratan (garis pantai) sebagai patokan pelayaran. Pelayaran pada umumnya berlangsung menyusuri pulau demi pulau (pelayaran pantai) sehingga para pelaut senantiasa dapat menemukan ciri-ciri daratan untuk menentukan posisinya di laut.

Sistem navigasi tersebut di atas berbeda dengan pelayaran di laut lepas, umpamanya dari Teluk Persia ke India atau dari India ke Nusantara dan dari Nusantara ke Cina. Para pelaut yang menempuh jalur-jalur lepas itu harus mahir menggunakan navigasi perbintangan dengan perhitungan-perhitungan yang cukup abstrak.

Tetapi aspek geografik itu bukan satu-satunya diterminan dalam dunia pelayaran-niaga. Perubahan sosial, Perubahan yang dilakukan oleh manusia atas tatanan-tatanan konstan seperti geografi dan sebagainya itu, menentukan pula. Menurut penelitian Chaudhuri tersebut di atas, sampai abad ke-10 pelayaran-niaga masih menempuh satu jalur yang tidak terputus-putus dari Timur ke Barat atau sebaliknya. Para pelaut dari Timur Tengah yang berlayar ke Nusantara atau ke Cina harus menempuh jarak itu sekaligus, atau kadang-kadang kalau terpaksa berlabuh dipelabuhan-pelabuhan tertentu untuk menunggu angin. Sampai abad ke-10 belum ada pelabuhan-pelabuhan yang memiliki cukup banyak fasilitas untuk dijadikan tempat singgahan dalam jalur niaga yang panjang itu.

Tetapi sejak abad ke-10 dan ke-11 muncul apa yang disamakan "emporium". ini adalah kota-kota pelabuhan yang dilengkapi dengan, berbagai fasilitas yang tidak saja memudahkan para pelaut untuk, memperbaiki kapal-kapalnya, tetapi juga memudahkan para pedagang untuk berdagang. Berbagai fasilitas ekonomi seperti kredit, gudang-gudang dan penginapan mulai tersedia di kota-kota pelabuhan tertentu sehingga menjadikannya sebagai "emporium".

Berbagai emporia yang bermunculan sejak itu umpamanya Aden dan Mocha di Laut Merah, Muskat, Bandar Abas dan Hormuz, di Teluk Persia Kambai dan kalikut di Laut Arab. Satgaon di Teluk Benggala, dan kemudian Malaka di Selat Malaka, Khanfu (kanton), Zaiton dan Nanking di Laut Cina.

Dalam setiap emporia terdapat penqusaha-pengusaha yang memiliki modal yang cukup besar. Selain menyediakan fasilitas

kredit, mereka juga sering memiliki usaha dagang sendiri. kapal- kapal bisa dibeli atau disewa untuk mengadakan ekspedisi-ekspedisi dagang ke berbagai emporia lain.

Perdagangan yang dilaksanakan para pengusaha bermodal itu tergolong apa yang dinamakan perdagangan "Commenda". Pimpinan ekspedisi dagang dipercayakan kepada nakhoda kapal yang juga dipercayakan untuk mengadakan perdagangan. Hasil perdagangan kemudian dibagi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dalam dunia pelayaran-niaga Samodra Hindia harus dibedakan antara pengusaha pemilik modal yang menetap di berbagai emporia, dan 'peddiers" atau penjajah yang mengarungi lautan dengan barang-barang dagangan milik para pengusaha tersebut.

Dapatlah dipahami bahwa dalam dunia pelayaran-niaga Asia ada pula sejenis kapitalisme yang muncul sejak abad-abad itu. Dari segi jumlah dapat dikatakan bahwa kapitalisme Asia tidak kurang penting dibanding dengan kapitalisme Eropa yang memasuki wilayah ini sejak abad ke-17. Namun, seperti dikemukakan Chaudhuri, perkembangan kapitalisme Asia hanya sejak abad ke-18 saja. Setelah itu kapitalisme Eropa menjadi dominan, dan makin dominan dalam abad ke-19 dan abad ke-20.

Pertanyaan yang timbul adalah mengapa kapitalisme Asia tidak berkembang terus. Salah satu jawaban yang dikemukakan oleh Chaudhuri berkaitan dengan sistem politik di Asia. Sistem politik di Asia ketika itu tidak memberi jaminan bagi keselamatan dan hak milik pribadi. Penguasa atau raja memiliki kekuasaan tidak terbatas. Seluruh wilayahnya serta kekayaan yang ada didalamnya Adalah milik raja. Dalam keadaan demikian modal yang berhasil dihimpun oleh para pengusaha tidak bisa ditanam dalam sektor-sektor lain, seperti sektor pertanian atau industri, karena Sewaktu-waktu dapat diambil oleh raja dengan dalih tersebut di atas. Sebab itu pula modal yang dihimpun para penusaha itu hanya berkisar dikalangan keluarga saja.

Keadaan itu berbeda dengan di Eropa. Sudah sejak semula kaum pengusaha atau "bourgeoisie" telah mendapat hak-hak istimewa dari raja. Mereka dilindungi oleh kekuasaan raja yang memerlukan dana yang mereka himpun untuk membangun tentara dan birokrasi untuk

melawan kaum feodal. Sebab itu ketika muncul kapitalisme melalui pelayaran-niaga, maka modal mereka juga dapat dilindungi melalui instituti-institusi keuangan seperti perbankan dan lain-lain. Dalam abad ke-18. dan terutama dalam abad ke-19, dana-dana yang terhimpun itu dapat dialihkan ke sektor industri. Dengan demikian muncullah industrialisasi, mula-mula di Inggris dan kemudian di berbagai negara lainnya di Eropa dan Amerika.

Sistem emporia tidak saja menimbulkan kapitalisme Asia tetapi juga memudahkan pelayaran-niaga. Fasilitas-fasilitas yang lengkap di berbagai emporium itu menyebabkan para pelaut dan pedagang tidak diharuskan menempuh seluruh jalur dari Timur ke Barat dan sekitarnya. Para pedagang dari Timur Tengah cukup sampai di Kambai atau Kalikut saja, kemudian para pedagang di India itu mengangkut barang-barang dagangan tersebut terus ke Malaka. Para pedagang dari Cina juga tidak perlu terus sampai India atau Timur Tengah, tetapi cukup saja hingga ke Malaka. Di berbagai emporia barang-barang dagangan dari Barat maupun dari Timur dapat dibeli dan diangkut terus. Sistem emporia menyebabkan jalur perdagangan menjadi lebih pendek. Ini tidak, saja menghemat tenaga dan biaya, tetapi juga mengurangi resiko kecelakaan di laut. Selain itu, jalur-jalur perdagangan dari pedalaman benua Asia (Jalur Sutra) juga memiliki percabangan-perdagangan yang bermuara di emporium-emporium tersebut.

Perkembangan sistem emporia berkaitan erat dengan perluasan Islam dari Timur Tengah ke Asia. Kota-kota pelabuhan dengan berbagai fasilitas dagang itu berpenduduk yang beragama Islam. Kesatuan umat Islam memungkinkan terjalannya perdagangan di dalam emporia, dan sekaligus mengikat berbagai emporia yang terbesar sepanjang Samodra Hindia itu.

Kenyataan itu bisa menjelaskan berbagai aspek dari sejarah Indonesia. Pertama-tama dapatlah dipahami mengapa sejak abad ke 14 di Nusantara ini juga bermunculan kota-kota dagang dengan penduduk yang beragama Islam. Kedua, juga bisa dipahami mengapa corak Islam yang muncul sejak itu banyak diwarnai oleh budaya Hindu. Hubungan berbagai emporia kecil di Nusantara dengan pusat-pusat perdagangan di India yang bercorak Islam itu memberi warna pula bagi Islam di Indonesia dalam kurun niaga.

Namun, sekalipun corak agama adalah Islam, tetapi para penguasa kota-kota pelabuhan tersebut berusaha mempertahankan netralitas dalam soal agama. Pedagang dengan latarbelakang agama apa saja bebas berdagang di kota-kota dagang itu. Keadaan juga merupakan faktor-faktor penting yang selalu diperhatikan oleh para pengusaha. Kota-kota dagang yang terkenal karena kekacauan atau secara politik tidak stabil sudah tentu dihindari oleh para pedagang. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa para pelarian dari Parsi yang menganut agama Zoroaster atau Jain (agama di Parsi dari masa pra Islam) itu bisa bertahan, dan bahkan menjadi dominan, di kota-kota dagang di pantai Barat India seperti Kambai dan Kalikut (kemudian Bombai, dll). Ini juga bisa menjelaskan mengapa berbagai bangsa dengan corak agama yang berbeda-beda bisa hidup berdampingan di Malaka, emporium yang penghubung antara Asia Barat dan Asia Timur itu.

2.1 Pelayaran Niaga di Nusantara

Dengan sendirinya di Nusantara bermunculan pula berbagai emporia dalam jalur perniagaan antara benua seperti di atas. Bahkan sesungguhnya Sriwijaya di Sumatra, bersama Funan (pelabuhan Oc Eo) di Kamboja serta Champa merupakan emporia yang penting di Asia Tenggara sejak abad pertama Masehi.

Dalam abad ke-15 Pasai, Malaka dan Brunai merupakan emporia terpenting. Jatuhnya Malaka dalam tangan Portugis pada tahun 1511 malah membawa akibat yang tidak terduga, yaitu munculnya berbagai emporia lain di Nusantara, yaitu Aceh, Banten, Demak, Gresik, dan Makasar. Selain itu di Semenanjung muncul pula Patani, Johor, Pahang; dan di Filipina muncul Manila.

Kota-kota dagang yang bermunculan di Nusantara dalam abad ke-16 itu merupakan pusat-pusat urban yang luas, bahkan ada yang lebih luas dari kota-kota di Eropa pada zaman yang sama. Namun, tidak mudah menentukan jumlah penduduk di berbagai emporia tersebut. Berbagai sumber dari tahun-tahun yang berbeda menunjuk pada angka-angka yang berbeda. Sebab itu perkiraan mengenai jumlah penduduk juga tidak dapat dikemukakan dengan pasti, angka-angka yang diberikan oleh sumber-sumber tertentu bervariasi dari tahun ke tahun.

Menurut penelitian Prof. A. Reid. Malaka sebelum direbut Portugis berpenduduk sekitar 90.000 sampai 100.000 jiwa. Pasai dalam abad ke-16 berpenduduk sekitar 12.000 hingga 20.000 jiwa. Demak sekitar 58.500 hingga 120.000 jiwa; Gresik sekitar 25.000 jiwa. Penduduk Aceh dalam abad ke-17 diperkirakan sekitar 48.000 hingga 160.000; Banten di abad yang sama sekitar 100.000 hingga 800.000 jiwa, Makasar sekitar 20.000 hingga 640.000 jiwa (Reid 1993: 69, 71, 72). Kalau jumlah penduduk berbagai emporia tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk di Batavia maka perbedaannya tidak terlalu mencolok. Pada tahun pusat perdagangan VOC itu hanya dihuni oleh sekitar 30.000 orang, puncaknya pada tahun 1670 mencapai 130.000 jiwa (Reid 1993: 73).

Angka-angka tersebut di atas memang perkiraan saja. Sensus penduduk belum di adakan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara di kurun Niaga ini. Tetapi berbagai laporan dari para pelaut dan saudagar Barat bisa digunakan sehingga menghasilkan angka-angka di atas. Menurut sumber data yang sama Prof. Reid memperkirakan bahwa kepadatan penduduk di Nusantara sekitar 1600 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Perkiraan Kepadatan Penduduk Sekitar Tahun 1600
(Dalam Ribuan)**

	Perkiraan 1800	Pertumbuhan abad 19	Perkiraan 1600	Pertumbuhan 1600-1800	Kepadatan 1600
Jawa	5.000	1.72	4.000	0.11	30.3
Sumatra	3.500	0.49	2.400	0.2	5.7
Kalimantan	1.000	0.83	670	0.2	0.9
Sulawesi	1.800	0.45	1200	0.1	6.3
Bali	700	0.25	600	0.08	79.7
Nusa Tenggara	900	0.54	600	0.2	9.1
Maluku	400	0.41	275	0.2	3.7
Jumlah	13.000		8745	0.5	5.0

Sumber: Diolah dari Reid 1988:14

Sebagian besar penduduk kota-kota dagang adalah penduduk lokal. Raja dan aristokrasi merupakan lapisan elite yang selalu terdapat dalam kota-kota dagang. Selain itu terdapat pula rakyat penduduk kota dagang yang memiliki berbagai macam peran sosial. Hubungan dengan pedalaman selalu ada, terutama untuk persediaan bahan makanan. Tetapi ada pula yang memiliki hubungan politik dengan pusat-pusat kekuasaan lain disekitarnya, seperti Makasar di abad ke-17. Kota-kota dagang di Pantai Utara Jawa, yang muncul sebagai kekuasaan-kekuasaan independen dalam kurun Niaga, di abad ke-17 berada di bawah kekuasaan kerajaan yang berpusat di pedalaman (Mataram)

Kemudian ada pula kelompok-kelompok saudagar asing yang umumnya berkelompok menurut agama, yaitu pada satu sisi kota terdapat orang-orang Cina dan sisi lainnya orang-orang yang beragama Islam.

Sebagian besar kota-kota dagang itu terletak di tepi pantai seperti Banten; ada pula yang terletak di Muara sungai seperti Makasar. Struktur kota-kota dagang di Nusantara mengikuti pola budaya lokal. Di wilayah-wilayah dengan lapisan budaya Hindu/Buddha terdapat pola perkotaan yang berbeda dengan di kota-kota dagang yang tidak memiliki lapisan budaya tersebut. Banten yang Islam itu menunjukkan pula bekas-bekas budaya Hindu dari masa sebelumnya. Pusat kota berupa lapangan yang luas dikelilingi oleh keraton di satu pihak dan masjid dan demikian para pedagang asing di lain pihak merupakan pola umum pula di kota-kota Asia Tenggara yang berbudaya Buddhis atau Hindu. Di sini muncul dengan jelas suatu konsep kosmik yang sakral seolah-olah kota yang berintikan raja itu merupakan duplikat dari alam semesta yang berintikan dewa (Reid 1993: 77-79).

Pola ini terdapat pula di kota-kota dagang lainnya di pulau Jawa. Selalu ada sebuah paseban tempat upacara dan ritual agama dilangsungkan dengan dikelilingi oleh masjid, pemukiman pedagang asing, dan lain-lain.

Makasar memiliki pola yang berbeda; lebih merupakan dua kota yang terpisah. Pada satu pihak ada istana raja (Sombaopu) yang dikelilingi tembok, kemudian terpisah dari istana, di Utaranya, terdapat pemukiman para pedagang dan pasar. Di sini tidak ada suatu logika

tertentu yang berkaitan dengan suatu konsep. Tetapi istana raja masih menunjukkan pola yang mengingatkan kita pada pola Banten; istana yang dikelilingi tembok-tembok tebal itu menghadap kearah utara dimana terdapat daerah pemukiman pedagang asing dan masjid. Disini tidak terdapat sebuah alun-alun (paseban) sebagai titik sentral yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan lainnya seperti di Jawa (Reid 1993; 821. 83). Pola yang sama dengan Makasar terdapat pula di Ternate ataupun di Tidore.

Kota-kota dagang tersebut dengan sendirinya memiliki pasar sebagai pusat kegiatan perdagangan. Di pasar-pasar itu setiap orang bebas membangun pondoknya dengan membayar pajak tertentu. Tetapi selain itu setiap jalan dalam kota dagang terdapat pula kegiatan perdagangan yang terutama dilakukan oleh wanita. Bahkan di pasar pun wanita lebih dominan dari pria, kecuali sejumlah barang yang terkait erat dengan status pria seperti senjata dan peralatan lainnya (Reid 1993:91-93).

Uang sebagai alat perdagangan sudah dikenal pula di kota dagang di Nusantara itu. Malah sesungguhnya sejak masa kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah uang dari logam emas telah di kenal . Perdagangan barter memang berlaku juga, tetapi cara itu, tidak mengherankan kalau di kota-kota dagang dalam kurun Niaga ini terdapat berbagai macam mata uang dengan nilai yang berbeda-beda. Sejak abad ke-14 uang Cina dari tembaga yang oleh orang Portugis dinamakan *caixa* (dari kata *cash* - Sanskrit), dan yang di Jawa dinamakan *picis*. Bentuknya bulat dengan lubang segi empat ditengahnya untuk merangkaikannya dengan tali. Menurut penelitian Prof. Reid, kemungkinan besar mata uang ini mulai beredar di Asia Tenggara semasa ekspedisi-ekspedi Zhheng He di abad ke-13, tetapi ada kemungkinan bahwa di Jawa (Reid 1993: 96-98).

Kemudian terdapat pula mata uang dari timah, logam yang memang banyak dihasilkan di Semenanjung. Sekalipun sudah dikenal sejak lama, tetapi pengaruh Islam membawa pula mata uang emas yang di Arab dikenal sebagai *dirham* atau *dinar*. Mata uang ini juga dihasilkan di kerajaan-kerajaan Nusantara, terutama di Sumatra. Sekalipun nilai tunai berbagai mata uang yang beredar di Nusantara pada kurun niaga sangat sulit ditentukan karena kurangnya sumber

sejarah, namun dapat dibuat perkiraan dasar sebagai berikut : Itahil (mata uang perak) sama dengan 16 emas, 1 emas sama dengan 4 kupang, dan 1kupang adalah 1600 cash (Ried: 1993: 100) .

Sebagai emporium kota-kota dagang di Nusantara juga memiliki berbagai fasilitas dagang seperti perkreditan. Terutama pengusaha dari India seperti para pedagang dari kasta Chatyar (Chetti) atau orang-orang Gujarat yang mempunyai agen-agensya di kota-kota dagang Nusantara merupakan penyedia kredit di kota-kota dagang Nusantara. Dengan demikian sistem kredit yang berawal di kota-kota dagang India itu memiliki jaringan juga di Nusantara. Surat-surat kredit (*Hundi*) yang dikeluarkan di sana, dapat diuangkan di kota-kota dagang di Nusantara (Reid 1993: 112).

Salah satu sumber yang penting mengenai kegiatan ekonomi di kota-kota dagang Nusantara adalah *Undang-Undang Melayu*. Istilah-istilah perdagangan ternyata berasal dari dunia perdagangan Islam. Tetapi ada pula yang berasal dari bahasa Austronesia, seperti *bunga* untuk keuntungan dari perkreditan. Istilah *riba* dari Arab untuk kegiatan ini tidak pernah diqunakan, tetapi sering digantikan pula dengan istilah laba. Ada pula bukti-bukti bahwa di berbagai kota dagang Nusantara praktek pencatatan transaksi dagang juga telah berlaku umum. Di Jawa umpamanya hal itu dilakukan di atas daun lontar (Reid 1993: 133).

Struktur sosial para pedagang di kota-kota dagang sudah bisa dipastikan pula. Pada puncaknya terdapat kelompok pedagang yang di Nusantara dinamakan "orangkaya". Perkataan itu sepadang dengan kata *saudagar* yang berasal dari bahasa Parsi atau *baniaga* dari bahasa Sanskrit, atau kata Cethi yang lebih umum dalam dunia Melayu (Reid 1993.: 114).

Pada umumnya mereka adalah orang asing yang berasal dari India, Parsi atau orang asing lainnya. Saudagar terbesar di Banten abad ke-17 adalah Cheti Maluku, seorang yang mungkin lahir di Maluku dari ayah berbangsa Spanyol. Selain itu ada pula Kojah Rayoan yang mungkin berasal dari Kairo. Sim Suan berkebangsaan Cina. Kemudian, para penguasa di India juga mempunyai agen-agen yang berstatus saudagar. Mir Jumla dari Golkonda mempunyai agen-agen di Aceh, Banten, dan Makasar (Reid 1993: 115, 116).

Para saudagar asing ini juga sering menjabat sebagai shahbandar di kota-kota dagang Nusantara. Hubungan-hubungan mereka dengan dunia pelayaran-niaga di sekitar Samudra Hindia menyebabkan mereka cocok untuk pekerjaan itu dan dipercaya oleh para raja dan sultan untuk menjadi perantara dengan dunia niaga itu. Pada masa ini para penguasa (aristokrat) lokal cenderung pasif dalam dunia niaga (Reid 1993: 120).

Kemudian terdapat pula pedagang lokal yang tentu saja jumlahnya paling banyak. Inilah yang oleh Van Leur dinamakan "peddlers" (penjaja). Pertama-tama adalah para wanita yang, seperti telah dikemukakan di atas, mendominasi pasar-pasar di kota-kota dagang Nusantara. Kemudian ada kelompok dagang yang dinamakan *Kiwi*. Mereka terorganisasi dalam bentuk perahu-perahu dagang dengan nakhoda sebagai penguasa tunggal di perahu, dan sekaligus agen dari para saudagar yang menyediakan modal dagang. *Undang-Undang Melayu* tersebut di atas mengandung ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai kegiatan ekspedisi dagang *Kiwi* ini. Pertama-tama hasil dagang (laba) akan dibagi antara nakhoda dan awaknya serta saudagar yang bersangkutan menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya. Tetapi resiko barang dagangan hilang karena bajak laut atau malapetaka lain sepenuhnya ditanggung saudagar. Kekuasaan Nakhoda di perahu adalah mutlak. Dia yang menentukan kemana perahu akan berlayar dan pelabuhan mana yang akan disinggahi, dia pula yang menentukan kapan boleh berdagang, dia yang juga menentukan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan para awak atau pedagang yang berada di perahunya. Pembagian kerja di antara awak perahu telah ditentukan dengan pasti, selain nakhoda ada pula mualim, serhang, jurubatu, dsb. Tetapi pada umumnya para awak adalah pedagang pula karena mereka mendapat petak-petak dalam perahu untuk barang dagangannya, dan dapat menjaja barang dagangannya setelah Nakhoda selesai dengan perdagangannya sendiri. Mayoritas dipegang teguh dalam perahu dari menjadi tugas mualim (juru mudi) untuk menegakkan aturan-aturan agama mengenai moralitas (Reid 1993: 124, 125).

Orang Melayu merupakan pedagang-pedagang yang tersebar di kota-kota dagang di Nusantara sejak Malaka direbut oleh Portugis

pada tahun 1511 (Reid 1993: 126). Mereka sering memiliki pemukiman-pemukiman sendiri di kota-kota dagang Nusantara yang dinamakan Kampung Melayu. Hubungan mereka dengan penguasa juga ditentukan secara pasti sehingga keselamatan dan pekerjaan mereka juga terjamin dari tindakan-tindakan semena-mena, seperti halnya di Makasar umpamanya (Reid 1993: 126.126). Kehadiran mereka sebagai bagian resmi dari kekuasaan kota-kota dagang di Nusantara kemungkinan besar berkaitan dengan perluasan bahasa Melayu sebagai lingua franca di kota-kota dagang di Nusantara.

Selain itu terdapat pula pedagang-pedagang Makasar yang menyebar terutama ke Indonesia Timur sejak Goa-Tallo dihancurkan VOC pada tahun 1669. Mereka pun memiliki perkampungan sendiri seperti di Maluku yang dinamakan Kampung Makasar. Bersama orang Jawa yang rupanya telah berada lebih dulu, dan kemudian disusul pula oleh-orang Bugis. Mereka merupakan penjaja-penjaja yang memenuhi fungsi distributor barang-barang dagangan impor di Maluku (Leirissa 1993).

Suatu aspek penting dari sejarah Kurun Niaga yang juga dibahas secara mendalam oleh Prof. Reid adalah apa yang dinamakannya "Revolusi Agama" di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara. Bersamaan dengan terkaitnya Nusantara secara intensif dengan jaringan pelayaran-niaga Samudra Hindia, maka meluas pula agama Islam. Para pedagang dari kota-kota dagang di India yang beragama Islam menjadi penyalur utama dari agama ini. Perubahan ini nampak pada tatanan kekuasaan sehingga istilah sultan mulai menggantikan istilah-istilah lokal (seperti raja atau kolajo di Maluku), busana juga berubah dengan munculnya tatacara berpakaian yang serba mewah, rambut yang dipotong pendek, dan sudah tentu berbagai rumah ibadah dengan para rohaniwan sebagai suatu kelompok sosial yang khas pula serta upacara-upacara keagamaannya. Proses yang meningkat sejak abad ke-14 ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari proses islamisasi yang telah berlangsung sejak abad ke-11 dan ke-12 di India.

Peranan utama kota-kota dagang di Nusantara adalah sebagai penyalur rempah-rempah di berbagai penjuru dunia melalui pelayaran-niaga Samudra Hindia. Peranan ini terutama meningkat sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sebelum itu para produsen dan pedagang rempah-rempah membawanya langsung ke Malaka. Dari Emporium

utama di Asia Tenggara itulah rempah-rempah dari Nusatenggara di ekspor ke Cina, India, dari Timur Tengah yang neneruskannya lagi ke Eropa. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa jatuhnya Malaka membawa akibat yang tidak terduga berupa munculnya berbagai emporia di Nusantara seperti Aceh, Banten, Jepara, Gresik, Makasar, Ternate, Tidore, dsb.

Rempah-rempah yang diperdagangkan terutama lada, cengkeh, pala dan fuli. Cengkeh (*Szyoium aromaticum* atau *Caryophyllus aromaticus*) berasal dari Maluku Utara. Dalam masa awal kurun Niaga ini produsen cengkeh hanyalah beberapa pulau saja di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Makian, dan Motir. Bersamaan dengan peningkatan perdagangan itu muncul pula empat buah organisasi politik yang dinamakan "kerajaan" atau kesultanan di Maluku Utara, yaitu yang berpusat di pulau-pulau Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo (Halmahera).

Pada masa Malaka (1400-1511) para pedagang dari wilayah ini maupun dari Jawa mengangkut cengkeh ke kota-kota pelabuhan di Jawa untuk diteruskan ke Malaka, dan dari Malaka para pedagang dari "atas angin" maupun dari Cina membelinya dan membawanya ke berbagai emporia lainnya di Asia dan Timur Tengah.

Tetapi setelah merebut Malaka pada tahun 1511, Portugis bertekad untuk menguasai kepulauan rempah-rempah itu. Usaha itu melahirkan hubungan dagang antara kerajaan Ternate dengan Portugis pada tahun 1512. Sejak itu Portugis menempatkan seorang agennya (*feitor*) dengan pangkat kapten di Ternate bersama pengawalnya untuk membeli cengkeh sambil menunggu armada dagang Portugis datang untuk mengangkutnya ke Eropa. Sementara itu pihak Spanyol muncul dari Manila dan mengadakan persetujuan dagang dengan Tidore. Permusuhan, antara kedua kerajaan itu makin meningkat setelah masing-masing mengadakan hubungan dagang dengan kedua kekuasaan yang bermusuhan itu (baru pada tahun 1580 Spanyol berkuasa atas Portugis sehingga kedua kerajaan itu disatukan).

Namun hubungan antara Feitor Portugis di Ternate dengan para penguasa kerajaan, Ternate (sultan dan dodato) berangsur-angur memburuk karena persaingan di kalangan masing-masing.

Penghianatan terjadi pada kalangan Portugis yang menyuruh membunuh sultan Hairun pada tahun 1570. Sejak itu putranya Baabullah mengadakan serangan-serangan dan blokade atas benteng Portugis di Ternate, sehingga pada tahun 1575, para pedagang Portugis bersama para pegawainya terpaksa meninggalkan Ternate. Dengan demikian putuslah hubungan dagang antara Ternate dan Portugis. Hubungan Tidore dengan Spanyol berlangsung terus hingga tahun 1665 ketika VOC berhasil menghalau Spanyol dari kerajaan itu pula.

Sesungguhnya, kedudukan Portugis di Ternate, maupun Spanyol di Tidore, sama sekali tidak menghentikan perdagangan rempah-rempah oleh para saudagar asing lainnya. Malah seperti telah muncul berbagai emporium lainnya di Nusatenggara untuk menggantikan peranan Malaka dan menjadi saingan utama dari menyaingi Portugis. Selain Makasa kota pelabuhan dari kerajaan kembar Goa-Tallo merupakan salah satu kota dagang utama dalam perdagangan rempah-rempah dari Timur itu; tidak kurang penting pula adalah Banten.

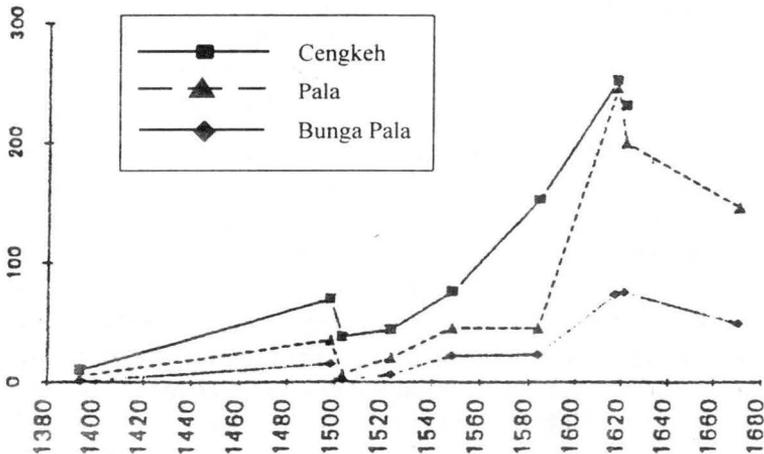
Sebab itu upaya Portugis untuk menegakkan sistem monopoli cengkeh di Maluku Utara sama sekali tidak berhasil. Perdagangan cengkeh malah mulai meningkat dengan tajam sejak sekitar tahun 1520 dan mencapai puncaknya pada tahun-tahun 1620 (lihat grafik no.1). Sampai tahun 1620-an, ketika VOC berhasil memperkuat sistem perdagangan monopolinya Maluku perdagangan rempah-rempah dari Maluku menduduki posisi penting dalam kurun Niaga.

Keadaan itu tidak berbeda dengan pala dan fuli (dihasilkan dari pohon *Myristica fragrans*) yang ketika itu hanya dihasilkan di kepulauan Banda. Berbeda dengan di Maluku Utara, di kepulauan Banda tidak timbul organisasi politik yang dinamakan kerajaan atau kesultanan. Di wilayah ini setiap kelompok pemukiman (desa atau negeri) berdiri sendiri-sendiri (otonom) tanpa adanya suatu kekuasaan yang lebih tinggi yang menyatukannya dalam organisasi politik yang mencakup teritorial yang luas. Inilah salah satu sebab mengapa dengan mudah J.P. Coen (Gubernur VOC) dapat menghancurkan penduduk kepulauan ini pada tahun 1621 dan menyerahkan perkebunan-perkebunan pala mereka untuk di kelola oleh pihak swasta (bekas pegawai VOC).

Pala dan fuli telah disalurkan ke Malaka sebelum abad ke-16, dan sesudah itu mengalir melalui berbagai emporium di Nusantara seperti Makasar dan Banten. Sebagai bagian dari jaringan-jaringan Samudra Hindia dengan sendirinya agama Islam juga muncul di sini. Demikian pula berbagai kelompok suku lainnya seperti orang Jawa dan kemudian orang Makasar muncul dan bermukim di sana untuk memperlancar perdagangannya. Frekwensi perdagangan pala dan fuli tidak jauh berbeda dengan perdagangan cengkeh seperti nampak dalam grafik no.1 dibawah ini.

Seperti nampak dalam grafik itu, awal pertumbuhan perdagangan rempah-rempah dari Maluku adalah sekitar akhir abad ke-14. Peranan emporium Malaka, yang muncul dalam awal abad ke-15 itu, dalam hal ini tentu penting sekali. Tetapi "*take off*" nya adalah justru setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, yaitu sekitar 1520. Puncaknya adalah sekitar 1570 hingga 1620, setelah itu perdagangan rempah-rempah terutama dikuasai oleh VOC.

Perkiraan Ekspor Rempah-rempah ke Eropa



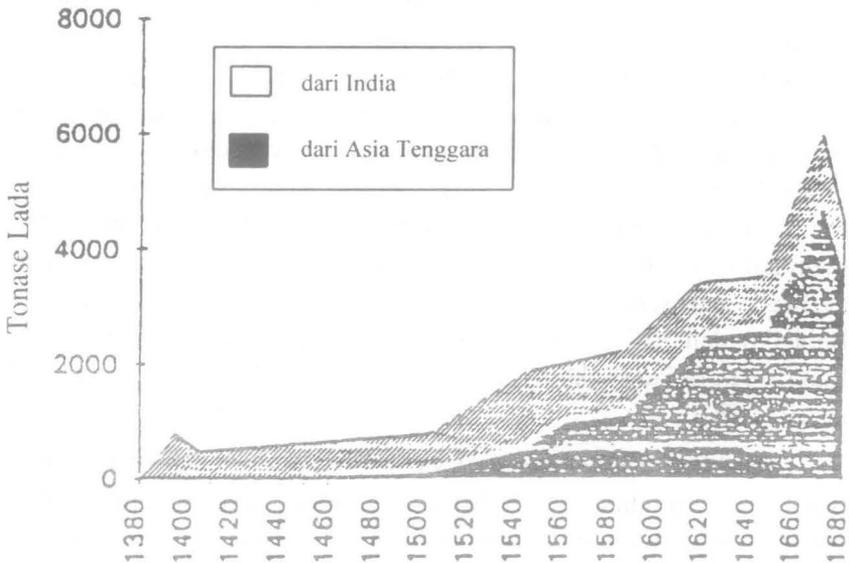
Sumber : Reid 1993: 14

Tentu ada penjelasan mengapa terjadi peningkatan sejak 1520. Permintaan utama pada mulanya datang dari Cina (malah Perkataan cengkeh berasal dari bahasa Mandarin : zhi jia atau zhen ga dalam dialek Kanton). Selain itu sejak 1400 permintaan dari Eropa juga mulai meningkat terutama melalui Venesia, Genoa dan Barcelona. Sejak itu permintaan dari Cina dan Eropa meningkat pesat, sehingga akhirnya orang Eropa memutuskan untuk mencari jalan sendiri ke daerah rempah-rempah itu agar dapat membelinya dengan lebih murah dan menjualnya lebih tinggi. Prinsip perdagangan inilah yang melahirkan berbagai perusahaan raksasa seperti VOC (untuk para saudagar Belanda) dan EIC milik para saudagar Inggris). Persaingan antara Inggris dan Belanda akhirnya dimenangkan oleh Belanda hingga abad ke-19 (1880).

Lada hitam (*paper nigrum*) yang dihasilkan di Sumatera, Jawa Barat dan kemudian juga Kalimantan Selatan, sesungguhnya bukan tanaman asli Nusantara, tetapi berasal dari India, tepatnya wilayah kerajaan India Selatan. Dari tempat asalnya itu tanaman komersial ini menjalar ke seluruh Malabar di pantai Timur India. Mungkin dalam abad ke-12 Lada Hitam telah mulai ditanam di Sumatra, tetapi ekspor komoditi ini menjadi penting sejak munculnya Pasai dan kemudian Malak, malah diperkirakan ekspor dari Pasai selama adalah sekitar 1400-1800 ton. yaitu seperoh dari Malabar. Sejak 1400 penanaman lada melintas pesat di Nusantara (demikian pun di Malabar), ke daerah Minangkabau dan semenanjung. Pada mulanya memang ekspor dari Malabar melebihi dari Nusantara, tetapi sejak orang-orang Eropa menemukan jalan laut melalui Afrika Selatan, maka sejak pertengahan abad ke-17 produksi lada dari Nusantara meningkat melebihi dari India, terutama karena diperebutkan oleh Inggris, Belanda, dan Cina (Reid 1993: 7-10).

Perbandingan ekspor lada dari India dan dari Nusantara adalah seperti berikut :

Perkiraan Ekspor Lada ke Eropa



Sumber : Reid 1993: 21

Berbeda dengan di Maluku, dimana rempah-rempah dapat dikendalikan oleh VOC di beberapa pulau saja, lada tidak sepenuhnya dikuasai VOC. Ekspor lada terbesar dari Nusantara berasal dari Aceh. Kerajaan yang menggantikan Pasai ini berhasil meluaskan kekuasaannya meliputi pesisir Sumatra Barat dan Sumatra Timur di mana lada banyak dihasilkan. Produksi lada dikendalikan oleh Aceh melalui para "panglima"-nya yang ditempatkan di titik-titik strategis sepanjang garis-garis pantai tersebut. Upaya VOC untuk menaklukkan Aceh selalu gagal, walau VOC dapat merebut Malaka dari tangan Portugis pada tahun 1641.

Upaya VOC untuk mendapat akses ke produksi lada yang dikuasai Aceh itu berawal di Sumatra Barat. Melalui perundingan-perundingan dengan para penguasa lokal, VOC berhasil menyingkirkan Panglima Aceh yang berkedudukan di pesisir Sumatera Barat. Suatu perjanjian yang dibuat pada tahun 1662 memberi hak bagi VOC untuk membeli seluruh lada di wilayah itu (Perjanjian Painan).

Selain itu VOC juga berhasil menguasai produksi lada yang dikendalikan Banten. Kerajaan itu juga berhasil menguasai produksi lada di Sumatra Selatan yang tidak dikendalikan Aceh. Jangkauan kekuasaan itulah yang antara lain menyebabkan kota dagang Banten menjadi ramai dan menggantikan peran Malaka. Upaya VOC pada awal abad ke-17 untuk menguasai kerajaan ini juga gagal, sehingga VOC terpaksa harus menyingkir keperbatasan timurnya dimana akhirnya mereka berhasil membangun sebuah benteng (Batavia) sebagai pusat kegiatan perdagangan di Asia.

Sementara itu konflik mengenai suksesi antara keluarga raja di istana Banten mendatangkan campur-tangan VOC. Salah seorang putra raja memperkuat dirinya dalam konflik mengenai suksesi itu dengan cara bersekutu dengan VOC. Dalam perang saudara yang meletus tahun 1680 VOC mengadakan intervensi atas salah satu pihak dan berhasil merebut istana. Sultan Banteng yang baru menandatangani perjanjian kerjasama dengan VOC pada tahun 1683. Antara lain ditentukan bahwa seluruh produksi lada disalurkan kepada VOC saja; dan berkaitan dengan itu semua saudagar asing yang berdiam di Banteng, baik orang Asia maupun orang Eropa, dilarang bermukim di kota dagang itu. Sejak itulah Banten kehilangan dimensi kosmopolitannya dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan VOC bersama Maluku, Makasar (yang direbut VOC tahun 1669) dan Padang.

2.2 Dominasi VOC

Pengaruh VOC dan EIC dalam pelayaran-niaga Samudra Hindia dipelajari dengan saksama oleh Chaudhuri pula (1989). Dorongan utama kedua badan dagang raksasa dari Belanda dan Inggris itu adalah untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari perdagangan rempah-rempah. Untuk itu mereka harus menyingkirkan para pedagang dari Iberia (Portugis dan Spanyol) yang telah lebih dulu memasuki Samudra Hindia. Sekalipun motivasi Spanyol dan Portugis ke Asia pada mulanya adalah soal agama (menyebarkan agama Kristen dan melawan Islam), namun ketika mereka berhasil melintasi Tanjung Harapan dan berhadapan dengan kekayaan pelayaran-niaga Samudra

Hindia maka unsur-unsur komersial menjadi lebih dominan. Kegiatan perdagangan orang-orang Iberia itu malah berhasil mematahkan jalur-jalur dagang Timur Tengah ke Eropa melalui kota-kota dagang di Italia seperti Venesia, Genoa dan Barcelona.

Mengapa orang-orang Eropa Barat (Inggris dan Belanda) dapat merebut pasaran di Samudra Hindia yang telah dimasuki oleh Portugis adalah suatu pertanyaan yang selalu menarik. Ada yang mengemukakan kenyataan bahwa perbedaannya adalah dalam sistem manajemen perdagangan: organisasi Perdagangan orang-orang Iberia adalah perusahaan negara" karena dikuasai oleh raja dan para bangsawan, sedangkan perusahaan-perusahaan dagang Inggris dan Belanda (EIC, VOC) adalah perusahaan-perusahaan swasta milik kaum "bourgeoisie" sebagai pemegang saham.

Perbedaan dalam organisasi perdagangan memang dampak penting dalam jangka panjang. "Perusahaan negara" mencari keuntungan tetapi demi kerajaan, perusahaan swasta mencari keuntungan juga tetapi demi para saudagar itu sendiri. Para pejabat Portugis dan Spanyol adalah pegawai raja yang melakukan tugas "kerajaan". yang mengambil kesempatan untuk memperkaya diri sendiri melalui perdagangan itu. Hal ini terjadi juga dalam perusahaan swasta tetapi lebih mudah diawasi oleh pimpinan perusahaan.

Sistem pembukuan VOC, umpamanya, memang berwujud ganda. Pada satu pihak ada pembukuan yang dilakukan di negeri Belanda oleh Pimpinan perusahaan, pada pihak lain Batavia juga memiliki sistem pembukuan sendiri. keduanya tidak pernah cocokkan; mengingat komunikasi yang sulit hal itu memang tidak mungkin dilakukan. Sebab itu orang tidak pernah dapat mengatakan banyak modal yang dimiliki VOC, seberapa banyak sesungguhnya keuntungan yang diperolehnya setiap tahun. Tetapi jelas sekali bahwa selama abad ke-17 VOC mencapai keuntungan yang besar, dan para pemegang saham mendapat dividen secara teratur (Gaastra 1989, 1991). Sekalipun kemudian mengalami kemunduran secara ekonomis, tetapi para pimpinan perusahaan di Eropa tetap berhasil meyakinkan para pemegang saham atas kemampuan VOC. sebab itu VOC tetap bertahan sampai akhir abad ke-18. Hal yang sama tidak bisa dikatakan

mengenai kegiatan perdagangan yang dikendalikan kerajaan di Portugis.

Aspek lain dari perusahaan-perusahaan besar dari Eropa Utara itu adalah apa yang oleh Chaudhuri dinamakan "administrative trade". Sistem perdagangan VOC dan EIC ditunjang oleh sebuah administrasi yang terlepas dari sistem pegawai kerajaan.

Sistem administrasi VOC yang berpusat di Batavia itu bertumpu pada jenjang kepegawaian pegawai yang dinamakan "*koopman*" (pedagang). Orang biasanya mulai dari jenjang yang paling bawah, yaitu "*onderkoopman*" (calon pedagang), kemudian bisa meningkat menjadi "*koopman*" (pedagang), dan akhirnya kalau nasibnya baik bisa mencapai "*opperkoopman*" (pedagang besar). Tetapi para pedagang (*koopman*) itu bisa juga diberi tugas-tugas politik yang lebih luas manakala kantor-kantor dagang VOC ditempat-tempat tertentu harus memelihara hubungan-hubungan politik dan sosial dengan masyarakat sekelilingnya. Sebab itu pada tingkat yang paling rendah, dimana VOC tidak memiliki kepentingan-kepentingan non-busines yang luas, kepala kantor dagangannya hanya berpangkat "comandant", seperti umpamanya di Pandang setelah Perjanjian Painan. Kemudian karena perluasan kegiatan pangkat kepala kantor itu menjadi residen, seperti halnya juga di Manado. Tetapi kalau hubungan-hubungan itu mulai meluas, maka wewenang kepala kantor dagang pun meluas, dan pangkatnya menjadi Residen. Sejumlah residen di suatu wilayah, seperti di Maluku atau Makasar dan di Pantura, dikoordinasi oleh seorang Gubernur. Semua Gubernur maupun Komandant berada di bawah seorang Gubernur Jendral yang berkedudukan di Batavia. Sistem ini mulai berlaku sejak Jan Pieterszoon Coen menjabat sebagai Gubernur Jendral di Batavia (1619). Gubernur jendral pun memiliki sebuah staf penasehat (*Raad van Indie*) dengan sebuah staf administrasi yang luas. Dibandingkan dengan organisasi dagang Portugis yang feodalistik itu sistem VOC lebih rasional.

Alasan lain mengapa Portugis dan Spanyol akhirnya dihalau dari dunia pelayaran niaga Samudra Hindia adalah soal politik. VOC adalah sebuah badan dagang yang sekalipun dimiliki kaum Calvinis (Protestan) di Belanda berupaya untuk bersikap netral dalam soal perdagangan di Asia. Sebaliknya Portugis dan Spanyol yang pernah

berhadapan dengan kekuasaan Islam di benua Iberia itu, tetap diliputi oleh sentimen-sentimen anti Islam yang sulit ditundukkan demi perdagangan. Sebab itu pula VOC dalam periode awalnya dapat bergerak dengan leluasa di kota-kota dagang Nusantara yang bercorak Islam

Padahal, menurut Chaudhuri, dalam soal strategi perdagangan sesungguhnya VOC (maupun IEC) hanya meniru cara-cara yang telah ditempuh Portugis selama seabad sebelum kehadiran mereka di Samudra Hindia. Sistem "pass jalan" yang oleh Portugis dinamakan "*caratas*" ditiru oleh VOC dan EIC. Juga sistem perbentengan di kota-kota dagang yang penting adalah cara Portugis yang ditiru pula. Pengawasan jalur-jalur perdagangan, umpamanya antara Goa di India dan Malaka di Semenanjung melalui sistem pas jalan dan armada yang menghubungkan benteng-benteng di kedua tempat itu, kemudian muncul pula dalam masa VOC (dan EIC).

Aspek kemiliteran ini yang terdapat baik pada organisasi perdagangan Portugis maupun pada VOC dan IEC, oleh Chadhuri dinamakan "*armed trade*" (perdagangan bersenjata). Dalam hal ini pun ternyata VOC dari EIC lebih unggul dari Portugis. Belajar dari pengalaman orang-orang Iberia itu para saudagar dari Eropa Utara berhasil menciptakan kapal-kapal layar yang lebih kecil dan lebih gesit. Dengan demikian dalam pertempuran-pertempuran laut kapal-kapal Portugis yang besar dan sulit dikendalikan itu cenderung kalah baik dan VOC maupun dari IEC.

Sebab itu tidak mengherankan kalau persaingan antara VOC dan Portugis di Nusantara tidak berlangsung lama dan seru. Dua pusat kekuasaan Portugis dengan mudah direbutnya, yaitu pertama benteng di Ambon pada tahun 1605 yang oleh VOC dinamakan "*Victoria*" (kemenangan), kemudian Malaka direbut pada tahun 1641.

Persaingan dengan EIC dan para saudagar Eropa lainnya seperti orang-orang Denmark, Prancis, dan lain-lain, dan para pedagang dari Asia berlangsung lebih lama dan seru. Dalam proses itu VOC menduduki berbagai kota dagang Nusantara di mana para pedagang itu berada. Seperti telah disebut di atas, Makasar diduduki pada tahun 1669 untuk mencegah "penyelundupan" rempah-rempah dari Maluku. kemudian juga telah disinggung jatuhnya Banten pada tahun 1683.

Kota-kota dagang di pantai utara pulau Jawa jatuh ke tangan VOC karena alasan lain. Semasa Sultan Agung (1613-1677) kota-kota pelabuhan itu dikendalikan dengan ketat oleh keraton. Para bupati tidak bisa berdagang sendiri tanpa izin dari keraton. Malah kegiatan mereka sangat dibatasi.

Tetapi Sepeninggal Sultan Agung kerajaan Mataram dikuasai oleh raja-raja yang lemah. Peperangan senantiasa berkobar dalam wilayah kerajaan. Dalam keadaan itu Amangkurat I meminta bantuan VOC umpamanya dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo. VOC selalu menuntut imbalan setelah perang usai. Sebab itu berangsur-angsur pantai utara pulau Jawa diserahkan kepada VOC. Pada tahun 1677 praktis semua bupati wilayah itu tunduk pada VOC, bulan lagi pada keraton. VOC lalu membatasi kegiatan perdagangan mereka baik ke Maluku maupun ke Banten (yang baru dikuasai pada tahun 1683 itu). Dengan demikian berangsur-angsur pula peranan saudagar-saudagar dari India maupun Timur Tengah menghilang dan selanjutnya para bupati berhubungan langsung dengan VOC atau melalui para pedagang Cina.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1680 VOC berhasil menguasai semua jalur perniagaan rempah-rempah di Nusantara. Kota-kota pelabuhan pengekspor rempah-rempah dikuasai dan para saudara asing yang menetap di kota-kota dagang itu dihalau. melalui "administrative trade" dan "armed trade" yang sangat efektif VOC berhasil mengorganisasikan Nusantara dari pola pelayaran-niaga Samudra Hindia.

Dengan demikian pula Kurun-Niaga bagi Nusantara yang mulai meningkat sejak 1400 itu praktis mulai mundur berangsur-angsur sejak 1620 dan sejak 1680 berhenti samasekali. Padahal di wilayah-wilayah lainnya dari Samudra Hindia pola itu masih berlangsung hingga pertengahan abad ke- 18, ketika bangsa-bangsa Barat muncul dengan industrialisasinya yang membutuhkan bahan-bahan baku lain. Dalam perkembangan itu kapitalisme Samudra Hindia tidak sanggup bersaing. Maka berakhirilah sebuah zaman yang gemilang dalam sejarah Asia.

Seiak itu bangsa-bangsa Barat yang telah menguasai pelayaran-niaga Asia itu beralih ke bidang pertanian. Maka muncullah suatu proses komersialisasi pertanian sebagai bagian dari kolonialisme di Asia. Asia sejak itu menjadi pemasok bahan-bahan baku industri di Eropa yang meningkat pesat sejak abad ke-19.

2.3 Nusantara Semasa VOC

Namun adalah keliru kalau dikatakan bahwa sejak tahun 1680 VOC telah menguasai seluruh ekonomi Nusantara. VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu (rempah-rempah). Selain itu VOC tidak memikirkan untuk membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk, kecuali bahan-bahan pakaian (tekstil) yang produksinya di India dikasasinya juga. Maka di tengah celah yang disediakan sistem VOC itu muncullah pola perdagangan lain yang samasekali berada dalam tangan penduduk lokal.

Penelitian belum banyak dilakukan mengenai aspek ini. Satu hal adalah jelas, yaitu bahwa pola perdagangan ini tidak bersifat kapitalis dalam arti mengejar keuntungan dan kekayaan untuk inventasi dan perluasan usaha. Sistem nilai yang berada dibalik kegiatan perdagangan ini lain samasekali dan mengacau pada sistem budaya setempat. Sebab itu terdapat cukup banyak variasinya. Di sini dikemukakan dua varian, yaitu di Jawa dan Bugis - Makasar. Pasa kasus Jawa nampaknya motivasi utama para penguasa ikut dalam perdagangan adalah untuk memperkuat kekuasaannya melalui kekayaan. Dalam kasus Bugis-Makasar unsur solidaritas sosial nampaknya lebih menonjol.

Pertama-tama perlu dikemukakan adanya pendapat bahwa setelah VOC menguasai kota-kota dagang di pantai utara pulau Jawa maka hubungan ekonomi antara wilayah "pesisir" dengan pedalaman (keraton) telah terputus. Penelitian Dr. V.J.H. Houben dari Universitas Leiden, membuktikan adanya kenyataan yang sebaliknya (houben 1994). Pembahasannya didasarkan pada penelitian sumber VOC serta

kesimpulan sejumlah sarjana lainnya yang juga mempelajari masalah ini seperti Dr. P. Carey dan Prof. M. Ricklefs.

Dari penelitian-penelitian itu ternyata baik sumber sejarah lokal seperti *Babad Tanah Jawi* maupun sumber-sumber VOC menunjukkan bahwa para penguasa di Mataram tetap berkepentingan dengan para bupati di pesisir untuk urusan dagang. Gerbang-gerbang tol terutama sepanjang Bengawan Solo yang selalu menjadi sumber keuangan penting dari keraton menunjukkan bahwa arus perdagangan antara pedalaman ke pesisir melalui sungai tetap penting. Pada tahun 1746 Gubernur Pantai Utara Jawa, G.W. van Imhoff berhasil merundingkan gerbang-gerbang tol itu sehingga Pakubuwono kedua bersedia menyerahkan pengelolaannya kepada VOC sejak tahun 1175 dengan imbalan keuangan yang cukup menguntungkan. VOC kemudian melelang gerbang-gerbang tol itu kepada para saudagar Cina. Baru pada tahun 1812 seluruh hak atas gerbang-gerbang tol itu diserahkan sepenuhnya kepada Belanda sehingga menyebabkan kerugian besar bagi keraton.

Setelah tahun 1755 (Perjanjian Gianti) kehidupan ekonomi di wilayah Mataram malah meningkat pesat sekalipun secara politik telah terjadi kekacauan, antara lain akibat aneksasi-aneksasi oleh VOC. Interaksi ekonomi antara pedalaman dan pesisir terus berlangsung pesat. Namun sejak 1755 keuntungan tidak lagi terutama dipetik oleh keraton tetapi oleh para *sikep* atau petani pemilik tanah yang bertindak sebagai *entrepreneur* juga. Namun sudah sejak tahun 1816, ketika Belanda kembali menguasai Jawa, muncul *entrepreneur* Barat yang kuat dalam permodalan yang mengusahakan berbagai tanaman dagangan seperti kopi, indigo dan gula di wilayah kerajaan. Tetapi keadaan itu berubah lagi sejak tahun 1830 yaitu setelah Perang Diponegoro, ketika pemerintah sendiri menjadi pengusaha perkebunan dan memunculkan *Cultuurstelsel* atau sistem Tanam Paksa (Houbert 1994).

Seperti halnya Houbert, Dr. Nagtegaal juga membuktikan bahwa perdagangan merupakan suatu masalah yang penting dalam kehidupan para bupati. Malah ia menciptakan suatu konsep untuk menjelaskan soal itu, yaitu "*political entrepreneur*". Penelitiannya mengenai

sejumlah bupati pesisir dan pedalaman menunjukkan, bahwa para bupati sangat berkepentingan dengan perdagangan. Kegiatan itu dilakukan bukan terutama untuk menupuk kekayaan sehingga bisa meningkatkan kemampuan usaha (investasi), tetapi lebih banyak berkaitan politik. Dengan memiliki banyak uang yang dihasilkan dari perdagangan, maka para bupati juga bisa mengokohkan kedudukan dan kekuasaannya. Malah tidak jarang terjadi persaingan segi-tiga antara bupati, VOC dan keraton. Bupati berusaha tetap bertahan pada kedudukannya sekalipun sudah tidak dianggap layak oleh keraton dengan cara mencari dukungan dari VOC. VOC pun mencoba meyakinkan keraton bahwa bupati yang bersangkutan layak dipertahankan karena ada keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh VOC melalui bupati tersebut (Nagtegaal 1994).

Keadaan di Maluku dengan sendirinya sangat berlainan dengan di Jawa. Seperti telah dikemukakan di atas, sudah sejak tahun 1620-an Maluku diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran-niaga Samudra Hindia. Kebijaksanaan ekonomi VOC terhadap Maluku sejak itu bersikap dualistik. Pada satu pihak VOC berusaha agar daerah-daerah produksi cengkeh di Maluku Utara yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo, dihilangkan, melalui berbagai perjanjian tertulis dengan para sultan yang diperbaharui dari waktu ke waktu. pihak kerajaan menyetujui keinginan VOC agar cengkeh dan pala tidak diproduksi dan dijual di Maluku Utara. Untuk melaksanakan hal itu hampir setiap tahun (biasanya pada akhir tahun) diadakan apa yang dinamakan "*extirpatie*" atau penebangan pohon-pohon cengkeh atau pala yang terdapat dalam wilayah kerajaan-kerajaan tersebut. Sebagai imbalannya para sultan dan bobato (pejabat kerajaan) menerima sejumlah uang yang dinamakan "*recognitiepenningen*". (Leirissa 1977) Sejak tahun 1620-an VOC berhasil memindahkan produksi cengkeh dari Maluku Utara ke kepulauan Ambon. Wilayah inilah yang kemudian dikenal sebagai produsen cengkeh yang terpenting di Maluku (Knaap 1987).

Keadaan di kepulauan Banda yang memproduksi pala dan fuli sedikit berlainan. Seperti dikemukakan di atas, di sini tidak terdapat kerajaan seperti halnya juga di kepulauan Ambon. Sejak tahun 1621 VOC berhasil mengatasi daerah ini dan menyerah kepada bekas

pegawai VOC untuk mengelola perkebunan-perkebunan tersebut. Kebun-kebun pala itu dibagi dalam kapling-kapling yang dinamakan "*perken*", dan para pengelolanya dinamakan "*perkeniers*". Penduduk kepulauan itu sebagian besar melarikan diri ke Seram Timur atau ke Makasar, sedangkan para pemimpinnya diangkut ke Jakarta untuk dijadikan tenaga kerja.

Dengan beralihnya jalur-jalur perdagangan rempah-rempah dan daerah produksi remah-rempah ke tangan VOC, maka pertanian yang muncul adalah bagaimana proses pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal? VOC dengan sendirinya tidak bisa mengambil-alih fungsi itu karena akan sangat merugikan perusahaan. Kepentingannya adalah pasaran di Eropa yang membutuhkan rempah-rempah. Kegiatan ekonomi lain yang tidak membawa *omzet* yang besar hanya akan menjadi beban.

Suatu penelitian yang dilakukan oleh R.Z. Leirissa mengenai perdagangan di sekitar Laut Seram membuktikan bahwa kegiatan perdagangan tidak berhenti di wilayah ini sekalipun memang bukan rempah-rempah yang menjadi primadonanya seperti sebelum 1620-an. Di samping "*administrative trade*" yang dikelola VOC dan terutama menyangkut rempah-rempah, terdapat pula "*non-formal trade*" yang dilakukan oleh para pedagang lokal dan Bugis-Makasar. Pusat-pusat "*administrative trade*" yang menyangkut kebutuhan penduduk adalah di "pasar kompeni" yang terdapat baik di Ternate maupun di Ambon. dan pusat dari non-formal trade terutama terdapat di Seram Timur dan Seram Utara. Juga *country traders* (pedagang swasta Inggris) yang mulai memasuki Maluku sejak pertengahan abad ke-18 harus dimasukkan dalam *non-formal trade*. Hubungan pedalaman dan pesisir di Seram yang dilakukan melalui suatu sistem barter yang khas dengan perantara-perantara di pesisir yang dinamakan *kamai* (Seram Utara) tergolong non-formal trade (Leirissa 1994). Malah di wilayah formal trade seperti pulau Ambon yang dikuasai sepenuhnya oleh VOC terdapat pula non-formal trade yang dilakukan oleh pegawai-pegawai pensiunan Belanda atau golongan "*burger*" (golongan penduduk ota yang bukan pegawai VOC). Hubungan-hubungan semacam ini ternyata lebih bersifat pribadi daripada hubungan ekonomi yang rasional (Leirissa 1982).

Selain itu para pedagang Makasar-Bugis memenuhi suatu fungsi yang penting dalam dunia ekonomi. Banyak di antara mereka yang berdiam di kota-kota Ambon dan Ternate dalam pemukiman-pemukiman sendiri yang dinamakan kampung Makasar. Peranan mereka di sini termasuk *formal trade* karena mereka berdagang dengan izin (surat izin berlayar) yang dikeluarkan VOC. Tetapi selain itu terdapat pula pemukiman-pemukiman Makasar di Seram Utara dan Seram Timur. Kegiatan perdangangan mereka tergolong *non-formal trade*. Banyak di antara mereka telah menyatu dengan masyarakat setempat melalui perkawinan seperti di kepulauan Gorong dan Seram Laut. Fungsi mereka adalah sebagai agen yang mengumpulkan berbagai produk laut yang setiap tahun akan diangkut oleh para pedagang Makasar yang memasuki wilayah ini tanpa izin VOC dengan paduakang-paduakangnya. Melalui jalur perdagangan ini wilayah Laut Seram (dan kemudian juga Laut Banda) terkait dengan para saudagar Makasar dari Bugis yang bermukim di Bali, Lombok dan Sumbawa yang pada gilirannya meneruskan produk-produk laut dari Maluku itu ke Singapura yang muncul sebagai bebas sejak tahun 1824 (Leirissa 1883).

PENILAIAN

Penelitian mengenai VOC kini mulai diigiatkan kembali, terutama setelah Prof. Dr. Meilink-Roelotsz membentuk suatu team penelitian di Universitas Leiden. Berbagai masalah memang masih perlu diteliti. Masalah pembukuan VOC merupakan suatu hal yang cukup memusingkan seperti dikemukakan oleh Gaastra dalam bukunya tersebut di atas. Soal perkapalan juga masih menunggu selesainya penelitian yang kini ditangani sejumlah sejarawan di Leiden. Selain itu tentu diperlukan pula penelitian mengenai kegiatan VOC diberbagai bentengnya di Nusantara. Mengenai hal ini Dr. G.J. Knaap telah memelopori dengan studinya mengenai VOC di kepulauan Ambon untuk melengkapi buku dari Rumphius yang diterbitkan tahun 1912 itu.

Masalah lain adalah dampak VOC pada pola pelayaran-niaga di Nusantara. Di atas telah dikemukakan beberapa hasil penelitian mengenai Maluku. Tetapi bagaimana keadaannya di pantai Utara

pulau Jawa belum bisa dikatakan dengan pasti. Demikian pula keadaan VOC di Makasar, di Banjarmasin di Padang, dan sebagainya.

Semua masalah tersebut masih menunggu para penelitian yang mahir, bukan saja dalam masalah-masalah metodologi sejarah tetapi juga dalam bahasa dari tulisan Belanda abad-abad dan ke-17 dan ke-18.

Sementara itu bisa disimpulkan bahwa pengaruh VOC di Nusantara sesungguhnya terdapat dalam dunia ekonomi saja khususnya pelayaran-niaga. Semua kota dagang pengeksport rempah-rempah di Nusantara sampai tahun 1680 berangsur-angsur dikuasai VOC. Hanya Aceh saja yang tidak dapat dikuasainya. Kerajaan Brunei yang sesungguhnya telah muncul pula bersamaan dengan Pasai, malah samasekali tidak disentuh oleh VOC. Hal ini disebabkan terutama karena Brunai bukan kota dagang pengeksport rempah-rempah. Dalam jangka panjang dapat dikatakan bahwa terlepasnya Brunai dari genggaman VOC membawa akibat masuknya Inggris di wilayah itu.

Sejarah memang penuh dengan unsur-unsur kebetulan (*incidents*), di samping hasil upaya yang sengaja direncanakan atau yang sudah menjadi pola yang sulit diubah. Selain Brunei, juga Timor-Timur tidak menjadi perhatian VOC, sekalipun banyak orang Portugis yang diusir oleh Babullah dari Ternate pada tahun 1575 melarikan diri ke tempat itu. Perkembangan yang berbeda terjadi di Ambon di mana sebagian dari orang Portugis yang melarikan diri dari Ternate itu menetap dan berhasil mendirikan benteng yang kuat di sana pada tahun 1580. Kedudukannya yang strategis dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku, maka pada tahun 1605 VOC merebutnya dari Portugis. Minahasa adalah kasus lain lagi. Di sini kepentingan VOC pertama-tama bukan rempah-rempah tetapi beras yang diperlukan untuk makanan bagi awaknya di berbagai benteng di Maluku. Perkembangan sejarah Minahasa dengan demikian mempunyai pola yang berlainan dengan perkembangan di Maluku. Semua ini masih memerlukan penelitian yang mendalam sebelum bisa disimpulkan dengan pasti kedudukannya dalam sejarah ekonomi.

BAB III

CENGERAMAN KOLONIALISME

Dari segi ekonomi VOC samasekali tidak mengubah tatanan agraria di Nusantara kecuali di Maluku. Di wilayah tersebut intervensi VOC mengakibatkan daerah produksi cengkeh yang sebelumnya berlokasi di beberapa pulau di Maluku Utara Ternate, Tidore, Makian, dan Motir dialihkan ke kepulauan Ambon (Ambon, Haruku, Saparua dan Nusalaut). Sebab tindakan VOC di Maluku Utara dan di kepulauan Ambon berbeda sekali. Kalau di Utara ditegakkan larangan menanam dan menjual rempah-rempah (*extierpa tiestelsel*) maka di kepulauan Ambon justru penduduk diwajibkan menanam cengkeh untuk dijual kepada VOC (*cultuur stelsel*). Di kepulauan Banda terjadi perubahan sedikit pula dengan mengalihkan pengelolaan kebun-kebun pala milik penduduk kepada orang Eropa (perkeniers). Untuk menjamin mutu produksi maka pengawasan dalam rangka pemeliharaan, pemetikan dan penyerahan ke loji-loji VOC di jalankan dengan ketat oleh VOC, baik di Ambon maupun di Banda.

Selain itu, di wilayah Priangan, VOC berhasil mengadakan kerjasama dengan para bupati untuk mengerahkan penduduk menanam kopi untuk dijual pada VOC. "*Preangerstelsel*" ini terutama terdapat di abad ke-18 di beberapa kabupaten di Priangan. Kopi memang bukan tanaman asli di Nusantara, tetapi berasal dari Semen. Sudah sejak abad ke-17 VOC mulai membeli kopi di wilayah Timur Tengah itu karena ada pasarannya di Eropa. Kegemaran minum kopi, seperti juga nanti kegemaran minum teh, ketika itu masih terbatas pada kalangan elite karena harganya yang sangat tinggi. Untuk mencapai keuntungan

yang lebih besar lagi dari perdagangan kopi, maka VOC membuka perkebunan-perkebunannya sendiri. Hubungan politik dengan para bupati Ptiangan yang dianggap telah menjadi kawula VOC karena dialihkan oleh Mataram pada tahun 1677 merupakan faktor utama yang memungkinkan hal itu.

Selebihnya di Nusantara, VOC tidak mengadakan intervensi dalam produksi agraria yang terutama terdiri dari lada itu. VOC hanya berusaha memperoleh hak pembelian dan penjualan tunggal (monopoli) saja. Itupun tidak seluruh wilayah produksi lada bisa dikuasai VOC, karena terutama kerajaan Aceh berhasil menghindari sistem monopoli itu.

Keadaan yang berlangsung dalam abad ke-17 dan ke-18 tersebut di atas mulai berubah secara mendasar dalam abad ke-19, dan bermula di Jawa. Bermula dengan suatu sistem perkebunan yang mirip dengan apa yang telah diselenggarakan di kepulauan Ambon maupun di Priangan, yaitu "*cultuurstelsel*". kemudian dalam paruh kedua abad ke-19 meluas menjadi perkebunan swasta. Selain di Jawa "*cultuurstelsel*" juga dilaksanakan di Minangkabau dan di Minahasa, keduanya sama-sama sistem pembudidayaan kopi.

Kemudian Belanda juga membuka kesempatan bagi modal swasta untuk menggarap pertambangan. Infrastruktur berupa sistem perkapalan yang mencakup seluruh Nusantara dilaksanakan juga dalam paruh kedua abad ke-19. Manufaktur secara kecil-kecil juga muncul di sana-sini. Sistem perekonomian ini berlangsung terus sampai bagian kedua abad ke-20. Bahkan berangsur pula setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945. Baru dalam tahun-tahun 1950-an ketika hubungan ekonomi maupun politik antara R.I. dengan Belanda terputus samasekali, terjadi perubahan yang pada dasarnya hanyalah perubahan pemilikan. Perubahan mendasar, yaitu Industrialisasi, baru mulai berlangsung dengan jelas di masa Orde Baru.

Perkembangan kapitalis dalam tatanan agraria Indonesia itulah yang akan dikemukakan dalam bab ini, baik segi positifnya maupun segi negatifnya. Dengan demikian diharapkan muncul kejelasan mengenai beberapa hal.

Pertama, pembangunan ekonomi Indonesia sesungguhnya sudah mulai berlangsung di abad ke-19.

Kedua, pmbangan ekonomi sejak abad ke-19 itu adalah ekonomi kolonial, di mana Indonesia hanya menjadi wilayah produksi bahan baku, sedangkan industri yang mengelolanya ada di Eropa (Belanda).

Ketiga, sistem ekonomi kolonial itu adalah ekonomi pulau per pulau karena hubungan struktural di seluruh Nusantara, kecuali sistem perhubungannya, tidak ada.

Keempat, pembangunan ekonomi berdasarkan sistem kapitalisme ini membawa dampak yang negatif maupun positif dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia.

Sumber sejarah untuk bab itu, seperti juga bab III adalah sumber sekunder berupa hasil analisis sejumlah ahli sejarah ekonomi yang mulai bermunculan sejak tahun 1970-an. Berkembangnya sejarah ekonomi justru adalah tanggapan atas keberhasilan pembangunan Orde Baru. Pernyataan pokok adalah bagaimanakah pembangunan ekonomi dilangsungkan di masa kolonial, dan sampai dimana pembangunan itu kondusif atau menghambat pembangun Orde Baru.

3.1 Cultuur Stelsel

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda antara tahun 1830 hingga petengahan abad ke-19 itu mereka namakan "*cultuurstelsel*". Dalam historiografi Indonesia yang tradisional istilah itu diganti menjadi "Tanam Paksa" yang menonjolkan aspek normatif dari sistem itu, yaitu penderitaan rakyat. Istilah yang digunakan Belanda itu selain terbatas pada aspek ekonominya, sehingga padanan kata itu dalam bahasa Indonesia sesungguhnya adalah "sistem pembudidayaan". Namun, dari segi pengelolaannya dapatlah dilihat bahwa aspek politik menonjol sini. Produksi sesungguhnya dilaksanakan oleh rakyat/petani dengan pengawasan para bupatinya hubungan politik antara Belanda dan Mataram yang telah menjadi saling tergantung sejak tahun 1755 itu, dan terutama setelah Perang Diponegoro di mana Belanda membantu pihak keraton, merupakan format politik yang memunculkan terselenggaranya sistem ini. Dalam

aspek tersebut terakhir itu kasus di Jawa ini dan kasus-kasus di kepulauan Ambon dan di Priangan tidak berbeda. Sistem ini memang maksud untuk menghidupkan kembali sistem VOC.

Culturstelsel di Jawa dimulai pada tahun 1836 atas inisiatif seorang yang berpengalaman dalam hal ini, yaitu van den Bosch yang telah mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perkebunan di wilayah kekuasaan Belanda di kepulauan Keribia. Tujuan Van den Bosch yang dijadikan Gubernur Jendral, adalah "..... mentransformasi pulau Jawa menjadi exportir besaran-besaran dari produk-produk agraria, dengan keuntungan dari penjualannya terutama mengalir kekeuangan Belanda. Tujuan van den Bosch dengan sistem *culturstelsel* di Jawa itu adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Untuk mencapai tujuan itu ia menganjurkan pembudidayaan berbagai produk seperti kopi, gula, indigo (nila), tembakau, teh, lada, kayumanis, dan sebagainya. Persamaan dari semua produk itu adalah bahwa petani dipaksakan oleh pemerintah untuk memproduksinya dan sebab itu tidak dilakukan secara "*voluter*" (Fasseur 1992:239).

Menurut penelitian Prof. Fasseur dari Universitas Leiden, pada tahun 1840 sekitar 75.5% dari penduduk Jawa dikerahkan dalam *culturstelsel*. Penduduk di karesidenan Batavia dan daerah kesultanan di Jawa Tengah atau *Vortsenlanden* tidak mengambil bagian dalam sistem ini. Jumlah itu kemudian berfluktuasi tetapi tidak turun secara drastis. Pada tahun kemudian 1850, umpamanya jumlah itu telah menurun menjadi 46%; tetapi ditahun 1860 naik lagi menjadi 54.5%

Sekalipun demografi belum muncul di masa ini, dan data kependudukan yang diperoleh dari laporan-laporan para pejabat Belanda sering simpang siur, namun dapat dikatakan bahwa sistem *cultur stelsel* ini jelas menekan penduduk Jawa.

Luas tanah garapan yang digunakan untuk *culturstelsel*, menurut perhitungan itu, pada tahun 1840 adalah 6% saja. Pada tahun 1850 menurun menjadi 4%. Pada tahun 1860 tertentu naik lagi sedikit.

Jenis tanah yang dibutuhkan juga berbeda-beda untuk masing-masing tanaman. Tebu (untuk gula) memerlukan tanah persawahan

yang baik, karena tebu membutuhkan irigasi yang lancar. Tetapi kopi justru memerlukan tanah yang agak tandus (*woeste gronden*), yang tidak dapat digunakan untuk persawahan, terutama di lereng-lereng gunung. Indigo membutuhkan daerah yang padat penduduknya. Pada dasarnya sistem ini membawa perubahan pada sistem pemilikan tanah. Karena penyelenggaraannya dilakukan per desa, maka tanah-tanah juga dianggap milik desa, bukan milik perorangan (Fasseur 1992: 28, 29).

Prof. Fasseur berhasil membuat kalkulasi mengenai berbagai komoditi yang ditanam tahun 1830 dan membawa hasil sekitar tahun 1840 (Fasseur 1993; 34). Dalam waktu sepuluh tahun (1830-1840) semua karesidenan (18 buah) di Jawa telah terserap dalam sistem ini (kecuali karesidenan Batavia). Kopi diusahakan mulai dari Banten hingga karesidenan Basuki di Jawa Timur. Tetapi produksi kopi terbesar berasal dari karesidenan-karesidenan Priangan (Jawa Barat). Kedu (Jawa Tengah), Pasuruan dan Basuki (Jawa Timur).

Dalam jangka waktu yang sama gula telah berhasil diusahakan di 13 karesidenan. Pusatnya terutama di Jawa Timur, yaitu karesidenan-karesidenan Surabaya, Pasuruan, dan Basuki (dalam tahun 1840 produksi dari wilayah ini mencapai hampir 65%). Selain itu terdapat gula pula di karesidenan-karesidenan Japara, Semarang, Pekalongan, dan Tegal (Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Barat).

Dalam jangka waktu yang sama pula Indigo berhasil diusahakan di 11 karesidenan, Tetapi produksi utama berasal dari dua karesidenan di Jawa Tengah, yaitu Bagelen dan Banyumas, yang menghasilkan 51%. Juga di Cirebon dan Pekalongan ada diusahakan sedikit indigo.

Tembakau yang diusahakan melalui *cultuurstelsel* dilakukan di karesidenan Rembang dan sekitar Pacitan (Jawa Tengah). Sedangkan kayumanis diselenggarakan di Karawang (Jawa Barat).

Dalam penyelenggaraan *cultuurstelsel* pihak Belanda berusaha agar sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengan petani. Sebab itu penyelenggaraannya diserahkan kepada para bupati dengan para kepala desa, dan masyarakat desa sendiri. Kepentingan pemerintah hanya pada hasilnya, yang dihitung dalam *pikol* (\pm 62 kg) yang diterima oleh gudang-gudang pemerintah. Selain itu penyelenggaraannya juga bervariasi dari satu tempat ke tempat lain

karena pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan penguasaannya kepada para pejabat Belanda setempat (para kontrolir) yang mempunyai motivasi untuk meningkatkan produksi karena mereka memperoleh "*cultuurprocent*" prosentasi tertentu dari hasil panen. Untuk itu sampai tahun 1860 dikerahkan tidak kurang 90 orang kontrolir dan sekitar orang pegawai berkebangsaan Belanda.

Mobilisasi penduduk dilakukan sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam tatanan politik Mataram, yaitu apa yang oleh Belanda dinamakan "*heerendiensten*" (Djuliati Suryo 1993). yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan bayaran. Hak ini kemudian beralih pada Belanda yang sejak Perang Diponegoro dianggap sebagai penguasa, kecuali di Vortsenlanden. "Kapan saja pemerintahan membutuhkan tenaga rakyat, maka para bupati, sesuai dengan instruksi yang diberikan pada mereka, harus mengupayakan agar setiap desa menyediakan tenaga kerja secara adil." (Ibid). Beberapa jumlah penduduk yang harus dikerahkan di setiap desa itu diserahkan sepenuhnya pada para bupati. Tetapi sesuai kebiasaan pula, hanya mereka yang memiliki hak atas penggarapan tanah (*sikep*) yang wajib memenuhi panggilan bupati tersebut. Ini pula sebabnya selama dilaksanakannya *cultuurstelsel*, diadakan pembagian tanah bagi penduduk yang tidak memiliki (numpang), sehingga muncul sikep-sikep baru yang wajib melaksanakan "*heerendiensten*" pula (fassuer 1992: 30).

Tugas petani bukan sekedar menanam, tetapi juga memproses hasil panennya untuk diserahkan di gudang-gudang pemerintah. Pengangkutannya ke gudang-gudang tersebut adalah tugas petani pula. Terutama produksi kopi seluruhnya dalam tangan petani; dalam hal gula muncul pula pabrik-pabrik gula yang dikelola secara modern dengan modal asing (Fassuer 1993: 33).

Penduduk mendapat bayaran untuk hasil kerjanya. Tetapi para ahli sejarah belum bisa memastikan bagaimana pemerintah menentukan tinggi rendahnya upah itu. Maksud semula Van den Bosch adalah agar upah disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar, namun hal ini dianggap tidak praktis. Mungkin karena para petani belum memahami kaitan perkerjaan mereka dengan mekanisme pasar. Menurut penelitian Prof. R. Van Niel dari Universitas Hawaii, jumlah upah disesuaikan dengan jumlah pajak tanah (*land rent*) yang harus

dibayar petani. Tetapi sejak semula Van den Bosch menginginkan agar upah yang diterima petani harus memungkinkan mereka "menikmatinya" dan itu berarti harus lebih banyak dari hasil persawahan. Tetapi kemudian ternyata berbagai faktor lain turut menentukan tinggi rendahnya upah petani. Masalah kesuburan tanah (sawah untuk tebu) tentu diperkirakan lebih tinggi pembayaran pajak tanahnya dibandingkan dengan tanah gersang untuk kopi. Masalah iklim, teknologi yang digunakan, dan lain sebagainya, turut menentukan tinggi rendahnya upah. Dengan demikian upah bervariasi, bukan saja untuk masing-masing komoditi tetapi juga dari karesidenan-karesidenan (fasseur 1992 : 42)

Contoh yang diberikan oleh Prof. Fasseur mengenai masalah upah ini diambil dari dua komoditi yang berbeda, yaitu gula dan indigo (nila). Dalam tabel 2 dan tabel 3 dibuat kalkulasi mengenai upah yang diterima per bahu dan upah yang diterima per keluarga (secara perkiraan).

Tabel 2 Upah Gula Tahun 1840 Dalam Mata Uang Guilders

Keresidenan	(kurang lebih)	(kurang lebih)
Banten	34.113	5.49
Banyumas	44.20	8.110
Besuki	83.50	27.33
Cerebon	64.09	14.15
Jepara	51.34	11.62
Kediri	71.30	16.92
Madiun	23.100	6.38
Pasuruan	66.80	18.64
Pekalongan	64.20	14.90
Rembang	25.72	5.41
Semarang	49.30	12.10
Surabaya	72.44	10.00
Tegal	49.104	10.50
Jawa	62.26	13.51

Sumber : Fasseur 1992: 35

Tabel 3 Upah Indigo (Nila) Tahun 1840 Dalam Gulden

Keresidenan	Per Bahu (perkiraan)	Per Keluarga (perkiraan)
Bagelen	65.13	12.73
Banten	11.20	0.117
Banyumas	75	17
Besuki	59.08	16.20
Cerebon	65.48	15.63
Jepara	26.40	4.75
Kediri	33.40	6.75
Madiun	43.30	8.95
Pekalongan	62.60	15.100
Priangan	16.80	3.45
Tegal	37.50	7.76
Jawa	60.97	12.69

Sumber: IFasseur 19921: 36

Dengan demikian salah satu dampak dari *cultuurstelsel* adalah masuknya ekonomi uang di pedesaan. Penduduk membayar pajak tanah (*land rent*) yang diintroduksi oleh Raffles dengan uang. Juga berbagai bahan kebutuhan dapat dibeli dengan uang. Kenyataan ini saja sudah menunjuk adalah perubahan dalam kehidupan pedesaan.

Suatu masalah yang penting pula adalah apa yang dinamakan "*cultuur procent*" (Fasseur 1993: 46-50), yaitu jumlah persentasi yang diterima para pejabat Belanda maupun sesuai dengan produksi yang diserahkan pada gudang-gudang pemerintah. Jumlah itu tidak jarang jauh lebih besar dari gaji yang diterima. Van den Bosch sengaja menambah hal ini untuk mendorong para pejabat tersebut bekerja keras. Lagi pula cara itu juga sudah dipakai dalam *Preangerstelsel*. Dengan demikian, cara ini sesungguhnya bukan ciptaan van den Bosch.

"*Cultuur procenten*" ternyata membawa dampak yang kurang baik dalam korps kepegawaian Belanda karena menimbulkan perbedaan pendapatan yang mencolok antara mereka yang terlibat

dengan *culturrstelsel* dan yang tidak dan juga antara mereka yang bekerja di daerah "gemuk" dan yang bekerja di daerah "kurus". Ketidakpuasan pada pihak pejabat Belanda nampak dari permintaan untuk di pindahkan ke daerah lain.

Contoh yang diberikan Fasseur untuk menjelaskan sistem *cultuur procent* ini diambil dari beberapa keresidenan untuk tahun 1850--1860 (dalam gilders)

Tabel 4 Kultur Persen yang Diterima Para Residen

Residen	cultuur procent
Bagelen	10.401
Banten	1.301
Banyumas	6.297
Besuki	7.152
Cerebon	7.543
Jepera	5.714
Kediri	4.905
Kedu	4.293
Madium	4.165
Pasuruan	25.064
Pekalongan	3.123
Priangan	5.994
Probolinggo	10.599
Rembang	2.737
Semarang	5.977
Surabaya	14.213
Tegal	5.274

Sumber : Fasseur 1992 : 47

Perbedaan pendapatan dari *cultuur procent* dengan sendirinya juga berlaku di kalangan para bupati, Tetapi tidak mudah membuat suatu tabel lengkap mengenai hal ini. Contoh diberi Prof. Fasseur adalah untuk keempat bupati Banten antara tahun-tahun 1858 hingga 1860 sebesar f2500 setiap tahun; sedangkan lima bupati Priangan dalam jangka waktu yang sama menerima f90.000 setiap tahu. Pada jangka waktu itu juga para bupati di Pekalongan menerima f38.000 setiap

tahun, dan keempat bupati di Rembang menerima f3.600 saja setiap tahun (Fassuer 1992: 49). Berbeda dengan para residen, para bupati tidak bisa menuntut mutasi ke tempat lain, dan pemecatan bupati sangat jarang terjadi di masa ini.

Suatu kenyataan bahwa secara keseluruhan para bupati menerima lebih banyak dari para residen. Untuk tahun 1858 hingga 1860 saja seluruh *cultuur procent* untuk para bupati adalah f800.000, sedangkan untuk jangka waktu yang sama yang disediakan untuk para residen hanya f250.000 (Ibid).

Pertanyaan lain adalah berapa keuntungan yang diterima oleh pemerintah dari sistem pertanian tersebut. Sekali lagi perhitungan Prof. Fasseur bisa membantu memberi gambaran yang agak baik. Dengan mengambil tahun-tahun 1840 hingga 1849, ia sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 5 Keuntungan Pemerintah

Tahun	Kopi	Gula	Indigo	Cochinela
1840-44	40.277.637	8.217.907	7.835.77	20.421
1845-49	24.549.042	4.136.060	7.726.362	519.661

Tahun	Kayumanis	Lada	Teh	Tembakau	Batig slot
1840-33	151.310	132.744	514.394	-----	39.341.651
1845-1849	171.798	56.548	1.666.496	94.560	35.056.820

Sumber : Fasseur 1992: 37

Dengan demikian bagi pemerintah Belanda keuntungan paling besar datangnya dari kopi. Antara tahun 1840-1849 saja mereka memperoleh sekitar 65 juta gulder dari penjualan komoditi yang paling banyak diproduksi di Priangan itu. Sedangkan dalam jangka waktu yang sama indigo hanya membawa keuntungan sebesar 15 juta

gulder. Menurut Fasseur keuntungan yang demikian besar dari kopi disebabkan harga jualnya memang tinggi tetapi harga belinya sangat rendah (Fassuer 19921: 36). kemudian gula juga menjadi komoditi ekspor yang besar setelah kopi. Tetapi gula baru menjadi primadona setelah tahun berdasarkan Undang-Undang Gula (1870) modal swasta diperkenankan memasuki perkebunan tebu. Indigo atau Nila yang dalam masa *cultuurstelsel* tidak terlalu jauh berbeda dari gula itu, kemudian mengalami kemerosotan sehingga tidak berarti. Demikian pun komoditi-komoditi lainnya terdesak samasekali setelah tahun 1870.

Sebab itu menunggu perhitungan-perhitungan yang lebih lengkap, dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari Van den Bosch telah tercapai. Keruntuhan keuangan Belanda disebabkan berbagai macam peperangan yang harus dibiayai (terutama dalam perang Napoleon), telah dapat diatasi melalui *cultuur stelsel*. Maka ungkapan yang kemudian muncul bahwa "*Java is de kuruk waarop Nederland drijft*" (Jawa adalah gabus yang membuat Belanda bisa mengambang)" tidak terlalu meleset.

Maka tidak mengherankan pula kalau kemudian setelah krisis keuangan negara Belanda dapat diatasi, muncul suara-suara sejak pertengahan abad ke-19, terutama dari kalangan liberal, yang menuntut dihapuskannya sistem itu dan menggantikannya dengan modal swasta dan kerja bebas (*free labor*). Salah seorang intelektual yang paling terkemuka dari kalangan ini adalah Pendeta Van Baron Heovell yang mendesak di *Tweede kamer* (DPR) agar dikeluarkan undang-undang penghapusan *cultuurstelsel*. Dalam tahun-tahun 1860-an desakan itu menjadi makin kuat. Perubahan nyata muncul ketika pemerintah konservatif yang mendukung sistem *cultuurstelsel* itu jatuh pada tahun 1860. Pemerintah baru yang dibentuk oleh kaum liberal sejak tahun 1962 mulai mengadakan perubahan-perubahan mendasar sehingga akhirnya menjelang abad ke 20 seluruh sistem itu lenyap samasekali digantikan oleh sistem lain.

3.1.1 *Cultuurstelsel di Luar Jawa*

Cultuurstelsel dilakukan juga di beberapa tempat di luar Jawa, sekalipun dalam ukuran yang lebih kecil. Di Minahasa sejak tahun 1822 telah diselenggarakan *cultuurstelsel* untuk kopi. Sistem ini baru

dihapus pada tahun 1899. Selain itu di Sumatra Barat sejak tahun 1847 (seusai Perang Padri) juga diadakan *cultuurstelsel* untuk kopi yang baru dihapus pada tahun 1908. Di Madura terdapat pula *cultuurstelsel* untuk tembakau. Selain itu *cultuurstelsel* juga masih tetap berlangsung di Maluku (dari masa VOC), yaitu cengkeh di kepulauan Ambon dan pala di kepulauan Banda. Bentuk ini baru dihapuskan pada tahun 1860.

Seperti dikatakan dalam bab II, Minahasa telah terkait dengan pola pelayaran-niaga VOC sebagai pemasok beras. Kewajiban ini baru dihapus pada tahun 1852. Sementara itu Belanda telah mengadakan *cultuurstelsel* di sini sejak tahun 1822. Berbagai wilayah yang sesuai dengan ekologi kopi, yaitu Dataran Tinggi Tondano, merupakan lahan yang paling cocok untuk itu. Wilayah ini adalah bagian dari Minahasa yang padat penduduknya sehingga memungkinkan diadakannya mobilisasi tenaga kerja secara tradisional baik untuk penanaman kopi itu sendiri maupun untuk membangun prasarannya. Kopi mulai diusahakan di distrik Romboken dan meluas ke distrik-distrik di sekitarnya seperti Sonder, Kawanokoan, dan Tomohon (Schouten 19931: 51-72).

Tanah-tanah yang digunakan untuk pembudidayaan kopi terutama ialah tanah *kalekeran*, yaitu tanah kosong milik distrik yang tidak digarap penduduk karena kondisi tanahnya kurang baik untuk persawahan atau kebun. Pekerjaan ini memang sangat memberatkan penduduk karena letak lahan-lahan itu selalu jauh dari pedesaan. Pada pihak lain upah yang diterima tidak memadai. Pembayaran yang diberikan oleh Belanda adalah f10 setiap *pikol*, padahal setiap keluarga hanya bisa menghasilkan kurang dari satu *pikol*, belum lagi dihitung tindakan-tindakan curang yang dilakukan para pengawas ketika menimbang kopi. Selain itu, tekanan pada penduduk juga diakibatkan oleh masalah pengangkutan. Pada mulanya penduduk harus memikul sendiri hasil panen kopi (yang dimasukkan dalam kurung) untuk dibawa ke gudang-gudang pemerintah yang terletak di kota-kota di pantai. Tetapi sejak tahun 1851 pemerintah membuka gudang-gudang di pegunungan sehingga pekerjaan itu menjadi lebih ringan; pengangkutan ke pantai dilakukan oleh para pengangkut yang diberi upah (Ibid).

Tetapi penduduk tetap terikat secara tradisional untuk melakukan kewajiban-kewajiban lain yang menyangkut pembangunan prasarana untuk melancarkan pengangkutan kopi. Jalan-jalan dan jembatan mulai muncul sejak ini. Dengan dipimpin oleh para pemimpin tradisional di desa (para "kepala walak") penduduk sewaktu-waktu mendapat panggilan secara bergiliran untuk bekerja tanpa upah pada berbagai proyek pekerjaan umum itu. Pekerjaan ini sering membawa kesengsaraan karena letak proyek-proyek itu jauh dari desa atau pada tempat-tempat yang menyulitkan. Pekerjaan ini juga memberatkan karena pada saat-saat penduduk harus memanen kebun makanannya, sering datang panggilan untuk mengerjakan prasarana itu (Ibid.).

Namun demikian, dari segi ekonomi, hasilnya tidak terlalu rendah. Banyak pejabat Belanda mengakui bahwa "Kopi Manado" jauh lebih baik dari "Kopi Padang". Malah dalam bagian kedua abad ke-19 kopi Manado juga mengungguli "Kopi Jawa". Sekalipun demikian, dari segi kuantitatif produksi Minahasa jauh lebih rendah dibandingkan dengan Padang yang rata-rata menghasilkan 191.000 pikul setiap tahun, apa lagi dibanding dengan "Kopi Jawa" yang bisa mencapai 2 Juta pikul setiap tahun (Schouten 1993:59).

Di Minangkabau kopi telah diusahakan secara peorangan antara 1820 hingga 1840-an sebelum diberlakukan *cultuurstelsel* (Young 1988: 136-164). Budidaya kopi di sini juga dilakukan di daerah pengunungan seperti halnya di Minahasa. Lahan yang digunakan pun termasuk yang tidak bisa digunakan untuk pertanian lain. Sebagian besar terdapat di sekitar kampung-kampung dalam wilayah hutan sehingga disebut juga "kopi hutan". Seperti halnya di Minahasa di sini pun penduduk harus membuka prasarana jalan dan kembatan untuk pengangkutan kopi dari pegunungan ke Padang tanpa diberi imbalan apapun. Para penghulu bertugas mengerahkan penduduk untuk berbagai tugas tersebut di atas.

Dalam penelitiannya tersebut di atas Prof. Kenneth Young menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan pembudidayaan kopi di Minangkabau bisa berhasil. Pertama adalah kebijaksanaan upah yang tidak membingungkan petani. Harga per pikul ditetapkan f20 (sekitar 32 sen per kg), dan setelah dipotong berbagai ongkos petani menerima f4 per pikol atau 5 sen per kg. Kedua adalah tersedianya tenaga kerja yang banyak yang bisa dikerahkan untuk pekerjaan itu.

Ketiga adalah tradisi dagang yang telah lama tertanam di Minangkabau yang menyebabkan orang terdorong untuk mencari uang.

Di samping itu, Young juga menyimpulkan sebab-sebab kegagalan sistem ini. Pertama-tama adalah habisnya lahan pertanian sehingga ini. Pertama-tama adalah habisnya lahan pertanian hingga tidak bisa diadakan ekspansi terus-menerus. Kedua adalah penyakit tanaman kopi yang sulit diatasi. Ketiga adalah perang Aceh yang berlangsung sangat lama dan membutuhkan perhatian penuh dari pihak Belanda. Keempat adalah cara-cara pengelolaan yang kurang baik.

Berikut ini adalah tabel yang mengilustrasikan hal-hal tersebut. Kalau di Jawa produksi kopi terus meningkat selama abad ke-19 dan bagian pertama abad ke-20, keadaan di Minangkabau justru menurun terus sejak tahun 1886. Minahasa keadaanya berfluktuasi dengan beberapa puncak pada tahun 1865 (sekitar 35000 pikol) dan 1889 (sekitar 37500 pikol), kemudian sejak 1879 (35000 pikul). dan sejak itu menurun dalam bentuk fluktuasi hingga pernah mencapai titik terendah pada tahun 1890 (100 pikul), dan saat penghapusan (1899) hanya mencapai sekitar 6000 pikul).

Tabel 6
Penjualan Kopi dari Minangkabau 1842-- 1906 (dalam jutaan kg)

Tahun	Terjual	Rata-rata setahun
1842-46	23.1	3.0
1847-51	20.0	4.0
1852-56	40.0	8.0
1857-61	45.8	9.2
1862-66	43.7	8.7
1867-71	49.6	9.9
1872-76	35.5	7.1
1877-81	37.0	7.4
1882-86	30.4	6.1
1887-91	21.2	4.2
1892-96	14.4	2.9
1897-1901	11.9	2.4
1902-06	10.1	2.0

Sumber : Young 1988

3.1.2 *Kaitan Cultuur Stelsel dengan Masyarakat*

Pertanyaan yang lebih sulit dijawab adalah mengenai dampak *cultuurstelsel* pada masyarakat Jawa. Semua peneliti mutahir sepakat bahwa sistem ini tidak bermoral, tidak menusiawi dan tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini harus dibedakan antara sistem itu sendiri (yang dianggap tidak dapat dibenarkan), dan dampaknya pada masyarakat. Para penelitian belum sampai pada kata sepakat mengenai masalah kedua itu. Pada satu pihak ada pendapat, bahwa sistem ini paling kurang bermanfaat karena menyebabkan ekonomi uang masuk ke desa. Tetapi penelitian mengenai sistem ekonomi masa VOC tersebut di atas menunjukkan bahwa proses monetisasi sesungguhnya telah muncul dalam masyarakat Jawa dalam masa VOC (Houben 1993). Dan kemungkinan besar sebelumnya juga telah beredar berbagai macam uang dalam masyarakat itu (lihat bab II).

Berkaitan dengan hal tersebut terakhir di atas, Prof. Van Niel dari Universitas Hawaii mengemukakan pendapat bahwa penyertaan modal dalam *cultuurstelsel* pertama-tama bukan berasal dari orang-orang atau institusi-institusi keuangan di Barat (Belanda ketika itu malah sedang bangkrut sehingga malah memerlukan sistem ini untuk mendatang uang dengan cepat). Permodalan untuk pabrik-pabrik gula yang dikelola pihak swasta datangnya justru dari berbagai pihak di Jawa sendiri, seperti para pensiunan pegawai negeri, perusahaan-perusahaan impor-ekspor, dan sudah tentu para saudagar Cina (Van Niel 1988). Kalau pendapat ini benar, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa moneterisasi memang sudah berlangsung jauh sebelum *cultuurstelsel* diselenggarakan.

Hasil penelitian dari Prof. M.R. Fernando dan Prof. O'Malley mengenai perkebunan kopi di Lerebon malah memperlihatkan adanya segi-segi positif dari *cultuurstelsel* pada masyarakat Jawa. Dengan mengukit sejumlah sarjana yang pernah meneliti masalah ini, seperti R. Van Neil, Lison R. Knight, dan Fernando, kedua sejarawan itu mengatakan bahwa "..... bukti sejarah telah mulai memperlihatkan bahwa pertumbuhan pertanian komersial sesudah tahun 1830 mempunyai efek perangsang pada ekonomi pedesaan, dengan komersialisasi menjurus pada peningkatan taraf kehidupan bagi mayoritas penduduk pedesaan, paling tidak selama dasawarsa pertengahan abad ke-19" (Booth, O'Malley, weideman 1988: 236).

Dalam salah satu uraian lain, Prof. Fernando mengemukakan, bahwa dampak *cultuurstelsel* adalah (terjemahan dari penulis): "Cara hidup keluarga subsistensi yang lama yang menghasilkan sendiri kebanyakan dari kebutuhan materilnya berangsur-angsur mulai berganti dengan suatu cara hidup materal yang komersial. Penduduk pedesaan menjadi makin terbiasa untuk membeli berbagai macam keperluan rumah tangga. Dampak ekonomi dari kebiasaan konsumen dari penduduk pedesaan itu tercermin dari (meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi non-agraris" (Fernando 19913). Kesimpulan itu dibenarkan pula oleh suatu penelitian lain yang dilakukan oleh Dr. Sugiyanto Padmo dari Universitas Gajah Mada (1993)..

Dalam sebuah tabel Prof. Fernando menunjukkan diversifikasi pekerjaan tersebut di atas (agriculture-non agriculture)

Tabel 7
Komposisi Tenaga Kerja di Jawa, 1880

Propinsi	tani	%	Manufaktur	%	Pedagang	%	Jasa	%
Jabar	720.532	74.9	27.628	2.9	107.855	11.2	22.678	2.4
Jateng	1103.782	77.1	49.851	3.5	174.982	12.2	34.079	4.2
Jatim	741.660	76.8	45.271	4.7	72.896	7.5	26.023	2.7
Jumlah	2565.974	76.4	122.270	3.7	355.733	10.6	82.780	2.5

Sumber : Fernando 1993. disederhanakan oleh Penulis

Selain itu, Prof. R.E. Elson yang secara khusus meneliti masalah-masalah kemiskinan dengan mengajukan pertanyaan hipotetis apakah *cultuurstelsel* menimbulkan kemiskinan atau tidak. Ia pun mengakui bahwa masalah ini sulit ditetapkan karena keadaan sumber sejarah, terutama data statistik yang "membingungkan". Ia sampai pada kesimpulan bahwa tidak dapat dikatakan apakah *cultuurstelsel* menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat Jawa atau membawa kemakmuran. Ia hanya bisa mengatakan dengan pasti bahwa ".....sistem itu langsung atau tidak langsung paling tidak dalam jangka pendek, memberi peluang-peluang untuk suatu pengelolaan secara lebih mantap bagi kehidupan ekonomi pangan serta

membuka kemungkinan-kemungkinan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat tani, yang sebelumnya amat terbatas pilihan-pilihannya." (Elson 1988).

3.2 Perkebunan Swasta

3.2.1 Perkebunan Swasta di Jawa

Sesungguhnya perkebunan swasta telah dimulai sejak tahun 1816 di daerah kesultanan (*vorstenlanden*) yang kemudian tidak dikenalkan *cultuurstelsel* itu. Para entrepreneur Barat maupun Cina menyewa tanah-tanah dari kaum bangsawan dan mengusahakan perkebunan kopi, gula, tembakau, indigo dan lain-lain. Selain itu juga ditanah-tanah partikelir di sepanjang pantai utara Jawa (dibeli oleh orang Cina sejak masa VOC).

Dr. H.V.J. Houben menunjukkan betapa pentingnya perkebunan swasta ini dibandingkan dengan *cultuurstelsel*. Statistik antara tahun-tahun 1845 dan 1860 menunjukkan gambaran sebagai berikut :

Tabel 8
Perbandingan Produktivitas Perkebunan Pemerintah
dan Perkebunan Swasta Antara 1845--1860

Tahun	Gula (pikul)		Kopi (pikul)		Indigo (pon)	
	pemerintah	swasta	pemerintah	swasta	pemerintah	swasta
1845	1.073.103	50.000	633.031	120.321	1.432.799	-
1851	1.406.464	--	1968.879	---	614.767	200.000
1860	1.764.505	1.277.864	982.134	120.001	467.672	335.141

Sumber : Houben 1993

Namun demikian perkebunan swasta berkembang dengan pesat setelah kabinet liberal mengambil alih pemerintahan di Negeri Belanda dan menyiapkan prasarana hukum untuk memberi jaminan bagi penanaman modal swasta di Indonesia. Perkembangan di pulau Jawa yang sudah mengalami proses komersialisasi jauh terlebih dahulu dari luar Jawa itu menunjukkan perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok.

Selama periode antara 1870 hingga 1942 perkembangan modal swasta dalam sektor perkebunan mendominasi perekonomian Indonesia. Beberapa komoditi yang penting di Jawa adalah gula, kopi, tembakau, teh, karet, kina, dan kelapa. Di luar Jawa karet, kelapa sawit dan tembakau merupakan produk utama.

Dalam Periode ini gula telah menggantikan kopi sebagai primadona di Jawa. Daerah-daerah utama penghasil gula adalah pantai utara pulau Jawa yang memiliki sistem pengairan sawah yang sangat baik, yaitu karesidenan-karesidenan antara Cirebon sampai Semarang, kemudian daerah selatan Gunung Muria hingga Juana. Kemudian daerah kesultanan (*vorstenlanden*) termasuk produsen gula yang baik pula, menyusul karesidenan-karesidenan Madiun, Kediri dan Besuki di Jawa Timur. Selain itu wilayah Probolinggo, Pasuruan, Malang dan daerah-daerah Surabaya hingga Jombang di pantai utara juga termasuk produsen utama gula.

Suatu tabel yang dibuat Prof. O'Malley berdasarkan berbagai dokumen Hindia Belanda mengenai jumlah perkebunan tebu dan luas arealnya adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Jumlah Perkebunan Tebu dan Luas Arealnya, 1900--1929

Karesidenan	1900	1910	1920	1929
Priangan				
Perkebunan	1	--	--	--
Ha 35	--	--	--	--
Cirebon				
Perkebunan	15	13	13	11
Ha 7.133	8.871	8.855	111.831	
Tegal				
Ha 11	--	--	--	
Pekalongan				
Perkebunan	4	15	18	17
Ha 2.497	10.751	16.015	17.870	

Semarang				
Perkebunan	3	12	12	11
Ha 1.973	8.453	9.600	11.089	
Jepara				
Perkebunan	11	--	--	--
Ha 5.868	--	--	--	
Rembang				
Perkebunan	--	--	1	--
Ha	--	--	375	--
Surabaya				
Perkebunan	41	40	36	35
Ha	19.855	25.308	26.931	29.045
Pasuruan				
Perkebunan	18	22	29	27
Ha	6.556	18.930	23.687	26.896
Probolinggo				
Perkebunan	13	--	--	--
Ha	6.948	--	--	--
Yogyakarta				
Perkebunan	15	18	17	17
Ha	5.580	7.932	10.298	17.983
Surakarta				
Perkebunan	16	17	16	16
Ha	5.615	6.286	6.571	14.498
Besuki				
Perkebunan	13	11	9	12
Ha	5.615	6.286	6.571	14.498
Banyumas				
Perkebunan	4	5	6	5
Ha	2.246	3.107	4.974	7.176
Bagelen				
Perkebunan	1	--	--	--
Ha	496	--	--	--

(Lanjutan)

Madiun				
Perkebunan	5	6	6	6
Ha 3.611	4.591	6.581	9.756	
Kediri				
Perkebunan	17	22	21	21
Ha 9.101	13.817	20.271	21.658	
Batavia				
Perkebunan	--	6	--	--
Ha --	92	--	--	
Kedu				
Perkebunan	--	2	2	2
Ha --	1.629	3.707	4.715	
Jumlah				
Perkebunan	189	196	185	180
Ha 89.481	117.113	149.117	189.602	

Sumber: Booth, O'Malley, Weidememann 1988 : 210, 211

Perkebunan tebu merupakan tahapan pertama dari industri gula. Untuk menjadikannya gula yang dapat diperjual-belikan dan digunakan oleh konsumen diperlukan pengilingan tebu (pabrik tebu). Seperti dikemukakan di atas, pabrik-pabrik tebu di Jawa diusahakan oleh pihak swasta. Pada masa *cultuurstelsel* pihak swasta dapat mengajukan permintaan izin pada pemerintah (*zuikercontracten*). Tetapi setelah itu pabrik gula dapat diusahakan oleh swasta tanpa mengajukan izin. seperti dikemukakan oleh Prof. Van Niel atas pemodal utama pada masa *cultuurstelsel* berasal dari dalam negeri", yaitu dari para pensiunan pegawai, dari perusahaan-perusahaan impor-ekspor, ataupun dalam penggilingannya.

Di bawah ini dikemukakan tabel yang dibuat oleh Prof. O'Malley mengenai persebaran pabrik gula berdasarkan sumber-sumber sejarah untuk periode 1870 hingga 1890

Tabel 10
Pabrik Gula yang Bekerja dengan Pemerintah, 1870--1890

Keresidenan	1870	1875	1880	1885	1890
Cerebon	10	10	10	10	10
Tegal	8	8	8	8	8
Pekalongan	3	3	3	3	3
Semarang	4	4	4	4	4
Jepara	9	9	9	9	9
Rembang	1	1	1	1	1
Surabaya	20	19	19	19	19
Pasuruan	17	17	17	16	11
Probolinggo	10	10	10	10	10
Besuki	5	5	5	5	5
Banyumas	1	1	1	1	1
Madiun	2	2	2	2	2
Kediri	6	4	6	6	6
Jumlah	95	93	95	93	87

Sumber : Booth, O'Malley, Weidemann 1988 : 206, 207

Perkembangan kopi yang di masa cultuurstelsel merupakan primadona terdesak ke tempat kedua setelah gula di masa perkebunan swasta. Wilayah-wilayah penghasil kopi yang utama dikemukakan dalam tabel berikut ini yang juga dibuat oleh Prof. O'Malley

Tabel 11
Kopi Pemerintah dan Rumah-tangga yang Teribat di Dalamnya

Keresidenan	1856	1875	1900	1915
(Lanjutan)				
Banten	33.440	20.406	56.688	82.830
Kerawang	1.595	2.201		
Priangan	93.998	20.092		
Cerebon	22.528	52.096	1.485	
Tegal	7.727	20.885	15.268	
Pekalongan	8.187	15.905	6.547	15.494
Semarang	30.411	49.971	14.152	13.549

Jepara	5.101	9.308		
Rembang	3.021			
Surabaya	2.805	6.988	.567	
Pasuruan	22.216	38.147	36.886	66.495
Probolinggo	14.210	17.909	15.744	
Besuki	22.929	36.271	16.488	3.140
Banyuwangi	3.495	3.910		
Banyumas	25.925	74.034	5.612	
Bagelen	26.705	38.401		
Kedu	69.314	70.594	2.370	2.395
Madiun	14.170	42.892	9.791	7.014
Kediri	25.787	35.387		
Jumlah	455.229	575.397	184.698	190.917

Sumber : Both. O'Malley, Welaemann 1988 :216

Tembakau yang di masa *cultuurstelsel* kurang berhasil kecuali di wilayah kesultanan, di masa perkebunan swasta mulai meningkat pesat. Wilayah produksinya di Jawa adalah Kedu, Kediri, Semarang, Surabaya, Klaten, dan Jember, dan Besuki. Kemudian teh juga meningkat pesat, terutama dihasilkan di pegunungan Priangan. Karet, seperti halnya kopi, diproduksi di wilayah-wilayah yang berpenduduk tipis. Kina juga terutama di Priangan. Kelapa ditanam diberbagai tempat s di pulau Jawa.

Adapun perbandingan luas areal perkebunan tersebut di atas adalah seperti tertera dalam tabel berikut ini yang juga dibuat oleh Prof. O'Malley.

Tabel 12

Tahun	Gula	Kopi	Teh	Karet	Nila	Tembakau
1835	12.357				14.810	
1840	22.701		1.868		30.396	808
1845	27.346		2.937		29.506	2.616
1850	29.204		1.643		19.488	1.241
1855	28.816		1.952		13.368	1.162
1860	27.976		1.820		11.743	1.248
1865	30.760				6.532	901

(Lanjutan)

1870	32.347	3.082			
1875	32.520	4.429			
1880	37.483	5.776			76.553
1885	42.697	6.041			65.105
1890	44.020	7.747			73.048
1895	77.116		9.173		171.792
1900	91.049				93.758
1905	105.761	79.706		10.117	137.346
1910	126.525	51.231	49.439	63.943	151.533
1915	151.165	33.053	73.886	109.215	159.484
1920	153.366	105.886	78.247	157.299	129.302
1925	176.267	95.357	84.682	180.478	165.261
1930	198.007	97.520	98.589	238.933	182.169
1935	27.575	96.460	104.415	230.162	173.686
1940	90.765	83.061	104.967	240.956	173.037

Sumber : Booth, O' Malley, Weidemenn 1988 : 221

Kalau tabel 11 diperhatikan, maka nampak bahwa areal untuk tiga jenis perkebunan mengalami perluasan secara kontinu, yaitu tebu, teh dan tembakau, kecuali antara 1855 dan 1860. Nila atau indigo menghilang sejak tahun 1870, sedangkan kopi dan karet baru menjadi penting sejak teratur setiap tahun. Depresi ekonomi dunia tahun 1930 hanya mempengaruhi perkebunan gula dan kopi, sedangkan teh, karet dan tembakau tetap mengalami peningkatan terus. Keadaan ini mungkin sekali disebabkan tindakan-tindakan drastis melalui apa yang dinamakan "Urdonansi Krisis", di mana perkumpulan-perkumpulan perkebunan sejenis mengadakan semacam dana untuk membantu yang lemah dalam situasi krisis itu. Dengan demikian berdirilah "*Coffienfonds*", "*Theefonds*", "*Kubberfonds*", "*zuikerfonds*" dan lain-lain. Penelitian mengenai pendanaan darurat ini belum pernah diadakan, sehingga tidak dapat dikatakan dengan pasti seberapa jauh pendanaan tersebut efektif menanggulangi perkebunan-perkebunan tersebut selama kritis 1930-1933.

3.2.2 Perkebunan Swasta di Luar Jawa

Perkembangan modal swasta di luar Jawa baru muncul secara kontinu sejak awal abad ke-20, kecuali di Sumatera Timur (sudah sejak 1860-an). Selain itu tidak seluruh wilayah Luar Jawa mengalami pertumbuhan. Ada wilayah-wilayah yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tetapi ada pula yang tertinggal samasekali. Daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan adalah Sumatera Timur (tembakau. Karet. Kelapa sawit, minyak, dan lain-lain. Palembang (karet), Riau (timah, minyak), Kalimantan Tenggara (karet), Sulawesi Utara (Kelapa) dan Sulawesi Selatan (kelapa). Wilayah-wilayah yang tertinggal adalah Maluku, Lampung, Bengkulu, sebagian dari Sumatra sebagian dari Sulawesi, Nusatenggara, dan Irian.

Indikasi pertumbuhan ekonomi di Luar Jawa terutama berasal dari angka-angka ekspor dari wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan (Lindbad 1993). Di antara wilayah-wilayah itu pulau Sumatera menunjukkan tingginya variasi komoditi ekspor. Pulau ini sampai tahun 1870 berada diluar kekuasaan Belanda sesuai dengan perjanjian dengan Inggris pada tahun 1842 (perjanjian London). Tetapi perkembangan modal swasta yang demikian pesat, baik di Sumatera maupun di semenanjung menyebabkan Inggris dan Belanda terpaksa mengubah kesepakatan itu pada tahun 1870 (Traktat Sumatera). Sejak itu Inggris diperkenankan memasuki Semenanjung dan Belanda diperkenankan memasuki Sumatra.

Sumatra Timur merupakan wilayah pertama yang mengalami pertumbuhan sejak Nienhuis membuka perkebunan tembakau di sana pada tahun 1864. Tembakau Deli menjadi terkenal di pasaran Eropa sehingga berbagai pengusaha lainnya menyusul. Karena penduduk lokal tidak bersedia bekerja di perkebunan maka pada mulanya diusahakan tenaga kerja dari Cina. Tetapi kemudian tenaga kerja diperoleh dari Jawa. Sistem tenaga kerja paksaan ini memang sangat menguntungkan sebab pemilik perkebunan diberi hak untuk menghukum Para Pekerja yang lalai melakukan pekerjaannya (*poenale sactie*). Baru pada tahun 1932 *poenale sanctie* terpaksa di hapus karena Amerika Serikat melarang impor barang-barang yang dihasil kan melalui tenaga kerja paksaan.

Komposisi tenaga kerja asing di Sumatera Timur dijelaskan oleh Dr. Thee Kian Wie melalui tabel berikut ini :

Tabel 13
Tenaga Kerja di Sumatera Timur

Tahun	Cina	Jawa	India dll.
1884	21.136	1.771	1.528
1900	58.516	25.224	2.460
1916	43.689	150.392	
1920	23.900	212.400	2.000
1925	26.800	168.400	1.500
1929	25.934	239.281	1.019

Sumber Thee Kian Wie, 1989

Pertumbuhan produksi dan ekspor tembakau antara 1864 hingga 1940 dijelaskan oleh Dr. Thee Kian Wie melalui tabel di bawah ini.

Tabel 14
Ekspansi dan Kontraksi Perkebunan Kopi di Sumatera Timur

Tahun	Jumlah perkebunankopi	Penjelasan
1864	1	
1872	22	periode ekspansi
1880	49	
1888	148	
1896	120	
1904	114	kritis harga 1891
1912	97	
1920	82	
1928	72	
1931	67	periode kontrasi
1932	61	
1934	45	
1940	45	

Sumber : Thee Kian Wie, 1989

Sejak tahun 1872 jumlah perkebunan kopi terus meningkat (ekspansi) hingga krisis 1891. Setelah itu jumlahnya terus menurun, dan menurun drastis sejak Depresi ekonomi dunia (1930). Sudah sejak krisis harga tembakau pada tahun 1891 para pengusaha mulai mencari alternatifnya. Maka muncullah perkebunan-perkebunan baru dengan komoditi baru seperti kelapa sawit, kopi, teh. Seratmanila (abaka), dan karet. Kemudian menyusul pula minyak.

Tanah-tanah yang dipergunakan untuk kopi mulai digunakan untuk kelapa sawit, sisal dan karet (Thee Kian Wie 1989: 146, 147).

Kelapa sawit mulai diusahakan di Sumatra Timur sejak tahun 1991. Karena memerlukan pabrik pengolahan yang mahal maka tidak mengherankan bila penduduk tidak mengembangkan komoditi ini seperti halnya dengan karet (karet rakyat). Peningkatan perkebunan kelapa sawit justru meningkat setelah depresi 1921. Perkembangan perkebunan kelapa sawit dikemukakan dalam tabel 14.

Teh terutama diusahakan dipegunungan daerah Simalungun oleh pengusaha Inggris dan Jerman antara 1910 dan 1920. Kemudian perusahaan Belanda (Handels Vereniging Amsterdam - HVA) juga menanam modalnya di sini. Perkembangan perkebunan teh dikemukakan dalam tabel 15.

Tali manila atau abaka (sisal) mulai diusahakan pada tahun 1917 di wilayah Laras, tetapi bagian terbesar di wilayah Simalungun.

Karet terutama terdapat di Jambi, tetapi berbagai tempat lain juga menghasilkannya. Lihat tabel 16.

Tabel 15
Pertumbuhan Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Timur

Tahun	Luas areal perkebunan (hektar)
1911/12	414
1913	1.309
1914	2.551
1915	3.018
1917	3.911
1918	4.972

1919	6.004
1920	8.462
1921	9.810
1922	12.188
1923	15.7985
1924	18.801

Sumber : Thee Kian Wie. 1989

Tabel 16
Pertumbuhan Perkebunan Teh

Tahun	Luas areal perkebunan (hektar)
1915	3.237
1920	10.099
1925	12.835
1930	21.273
1935	
1938	21.5888

Sumber : Thee Kian Wie. 1989

Tabel 17
Pertumbuhan Perkebunan Karet di Sumatera Timur

Tahun	Luas areal perkebunan (hektar)	areal produktif
1902	176	0
1904	651	0
1906	2.078	0
1908	13.090	0
1910	29.471	0
1915	103.112	36.453
1920	150.156	101.428
1925	188.875	146.773
1930	273.094	172.905
1932	284.213	178.438
1935	0	0
1940	0	0

Sumber : Thee Kian Wie. 1989

Karet sesungguhnya tidak dihasilkan di Sumatra Timur saja, malah produsen tersebar justru di Sumatra Selatan. Tetapi yang terakhir ini berkaitan dengan karet rakyat yang akan dikemukakan kemudian.

Tabel 18
Ekpor Karet dari Sumatera dan Kalimantan

Wilayah	%ekspor	
	pertama	selanjutnya
Sumsel	14.19	33.50
Jambi	15.59	10.67
Bangka-Biliton	1.46	2.05
Tj. Pinang (Riau)	2.97	2.75
Indragiri	5.62	1.35
Sumatra Barat	2.89	3.49
Bengkalis	6.22	2.88
Tapanuli	3.92	9.38
Sumatra Timur	5.94	5.60
Aceh	0.61	1.20
Kalimantan Tenggara	19.39	11.10
Kalimantan Barat	21.09	16.03
	100.00	100.00

Sumber . Thee Kian Wie. 1989

3.3 Pertambangan di Luar Jawa

Pertumbuhan Luar Jawa terutama juga disebabkan oleh berkembangnya pertambangan yang padat modal itu. Tiga jenis pertambangan yang paling penting adalah , timah, batu-bara, dan minyak bumi.

Timah di kepulauan (Riau Bangka, Belitung dan Singkep) telah dikenal mulai ditambang oleh orang-orang Cina dan Melayu sejak awal abad ke-18. Orang-orang Cina dari Semenanjung membentuk satuan-satuan kerja yang dinamakan kongsi masing-masing dengan pemimpinnya (*thaiko* = *Rakka*) untuk menambang dan memasarkan timah ke India dan Hongkong. Kemudian oleh VOC tambangan ini

juga dijadikan monopoli dan diperdagangkan di Asia pula. Setelah Belanda secara syah menguasai wilayah ini berdasarkan perjanjian London, maka pertambangan timah pun mulai mendapat perhatian. Dengan modal swasta dibentuklah dua perusahaan untuk menggarap timah oleh *Billiton Maatschappij*.

Sejak tahun 1885 sistem kongsi mengalami perubahan di pulau Belitung. Satiap anggota kongsi mendapat upah sesuai jumlah timah yang telah ditentukan yang diserahkan pada perusahaan ("sistem kuantitas"). Kelebihannya dibayar pula oleh perusahaan. Sistem kongsi samasekali dihilangkan ketika perusahaan mulai menggunakan teknologi canggih. Sejak itu perusahaan mempekerjakan para pekerja Cina secara pribadi. Keadaan di pulau Bangka berbeda dengan di Belitung. Kalau di Belitung para pekerja diupah setahun sekali, maka di Bangka mereka menerima upah setiap bulan (Thee Kian Wie 1989).

Batubara pertama kalinya ditambang di Martapura (Kalimantan) pada tahun 1846 dan 1849 oleh dua perusahaan milik pemerintah ("de Hoop" dan "Oranje-Nassau". Hanya perusahaan kedua yang dapat bertahan lama. Hasilnya dibeli oleh angkatan laut Belanda. Tetapi perusahaan kedua itupun akhirnya gulung tikar karena musibah kebakaran tahun 1884.

Sebelumnya pada tahun 1861 pemerintah telah membuka perusahaan pertambangan baru di Palahan (Kutai) untuk kebutuhan Angkatan Lautnya. Tetapi perubahan ini pun tidak dapat bersaing dengan perusahaan Inggris.

Perusahaan pertambangan batubara yang ternyata berhasil adalah di Umbilin (Sumatra) yang dibuka pada tahun 1868. Keberhasilan itu menarik para investor untuk membuka perusahaan pertambangan di Labuan (Kalimantan) sejak tahun 1889. Selain itu telah dibuka juga perusahaan di Sadong (1873) dan Muara (1882). Tenaga kerja di Kalimantan terutama adalah orang Cina. Persaingan dengan Perusahaan-perusahaan Inggris di Sarawak cukup kuat. Tetapi perusahaan-perusahaan tersebut ternyata dapat bertahan.

Sekalipun penduduk di Sumatra telah lama menggunakan minyak bumi kasar untuk penerangan, namun baru pada tahun-tahun 1890-an ada perusahaan swasta yang menanamkan modalnya dalam pertambangan minyak bumi. Pertambangan pertama dibuka di Telaga

Said dan Darat (Sumatera Utara) . Kemudian menyusul perusahaan lain yang mendapat di Senga-senga (aliran sungai Mahakam) pada tahun 1891. Menyusui pertambangan di Baku yang terutama diekspor ke Amerilta Serikat.

Persaingan dalam bidang ini juga cukup ketat terutama dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Untuk mengatasinya maka Royal Dutch yang menguasai pertambangan di Kalimantan itu membentuk sebuah usaha patungan (joint venture) dengan Shell (Inggris) untuk melawan *Starsdard Oil* sehingga terbentuk *Asiatic Petroleum*. *Royal Dutch* sendiri beroperasi melalui dua perusahaan, yaitu *Bataavsche Petroleum Maatschappij* (BPM) yang menguasai semua koneksi di Hindia Belanda, dan *Anglo Saxon Petroleum Company* (ASPC) yang lebih banyak bergerak di Sarawak.

3.4 Perkebunan Rakyat

Perkembangan yang cukup menggembirakan dalam periode sejak awal abad ke-20 adalah munculnya perkebunan rakyat. Terutama karet dan kelapa yang tidak membutuhkan investasi dalam bentuk pabrik pengolahan (manufaktur) mudah dikerjakan oleh rakyat. Sepanjang yang diketahui (telah diteliti) karet rakyat terdapat di Kalimantan Tenggara dan di Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatra Barat. Dalam bagian ini akan dikemukakan dua contoh, yaitu karet rakyat di Sumatra Selatan, dan kelapa rakyat di Sulawesi Utara.

Karet rakyat di Sumatra Selatan berkembang di awal abad ke-20. Pelopornya adalah orang-orang Melayu yang sekembali naik haji singgah di memenanjung dan membawa buah karet untuk ditanam di ladang-ladangnya. Ekologi karet ternyata tidak berbeda jauh dengan ekologi perladangan. Sebab itu dengan mudah rakyat dapat menanam dan memelihara karet diladang-ladangnya dengan teknologi yang telah mereka kenal untuk perladangan. Selain itu pengolahan karet tidak membutuhkan mesin-mesin yang tidak mungkin dibeli oleh rakyat. Pengolahannya menjadi komoditi dagangan cukup diasapi dengan cara yang sederhana saja.

Karet rakyat terutama dibeli oleh para tengkulak dari Singapura. Mutunya kurang baik tetapi dapat laku di pasaran. Sampai tahun 1930

ternyata volume ekspor karet rakyat jauh melampaui volume karet perkebunan.

Ketika Depresi ekonomi dunia melanda Hindia Belanda pada tahun 1930 dan memukul perkebunan karet karena harga-harga jatuh drastis di pasaran dunia, ternyata karet rakyat dapat bertahan. Hal ini terutama karena faktor resiko tidak terlalu besar dalam karet rakyat. Pengelolaan karet rakyat tidak dilakukan melalui perusahaan modal besar sehingga tidak ada tanggung jawab pada pemegang saham. Dalam keadaan buruk pun para petani karet masih dapat hidup melalui ladang-ladangnya. Sistem perkebunan dan sistem ladang memang berkaitan erat dalam budidaya karet oleh rakyat.

Keadaan itu juga berlaku bagi "kelapa rakyat". Kelapa rakyat di Minahasa terutama dihasilkan di wilayah-wilayah bergunung api seperti distrik Tonsea, distrik Amurang dan distrik Manado. Tanah berporus akibat lahar gunung berapi yang mengeras itu ternyata menjadi penyimpan air cukup banyak, sehingga kelapa dapat tumbuh sampai-sampai ke lereng-lereng gunung atau daerah dengan curah hujan yang kecil.

Kelapa dipanen setiap empat bulan sekali. Setiap keluarga di Minahasa sanggup memelihara sebuah kebun kelada dengan sekitar 200 pohon kelapa. Ada pula yang dapat memperluas kebunnya dengan cara membeli tanah dari orang lain. Cara pengolahannya juga sangat sederhana seperti halnya pengolahan karet rakyat. Selain upah untuk pemetik, hanya diperlukan tempat-tempat pengasapan (tempat fufu) yang bisa dibangun di Keburi-kebun dengan material yang ada disekitarnya.

Kelapa dari Minahasa (dan daerah-daerah lainnya) mulai memasuki pasaran sejak awal ke-20 untuk memenuhi permintaan dari berbagai pabrik yang menghasilkan sabun dan lain-lain. Jaringan pemasaran kopra terdiri atas petani ke perantara kemudian kepada saudagar pengeksport yang berkedudukan di Manado atau Amurang. Hubungan antara perantara (yang kebanyakan adalah orang Cina yang telah bergenerasi berdiam di Minahasa) merupakan suatu bentuk "Trade alliance" yang unik dan dinamakan "*copracontracten*".

"*Copracontractern*" atau kontrak kopra adalah hubungan dagang antara petani kelapa di Minahasa dari para pedagang perantara yang bermukim dan memiliki warung-warung di wilayah-wilayah produksi kopra. Kontrak antara berbagai petani dan perantara bisa dibuat secara tertulis (sering di depan notaris) untuk jangka waktu lima sampai sepuluh tahun. Pada saat penandatanganan kontrak petani dapat memperoleh uang sebanyak kopra yang akan diserahkannya selama jangka waktu itu. Ini merupakan jumlah uang yang sangat banyak dibandingkan apabila petani menjual dalam jumlah yang sedikit empat bulan sekali. Selanjutnya kredit yang diberikan oleh perantara itu harus dibayar oleh petani setiap kali panen sepanjang jangka waktu yang ditentukan pula. Uang yang diperoleh para petani sebagian terbesar dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik seperti membangun rumah, merenovasi rumah, membeli pakaian, atau mengirim anak-anak ke sekolah Belanda, dan lain-lain. Pengeluaran konsumtif di masa ini masih sangat jarang terjadi akibat dominannya budaya Zending yang masuk ke wilayah ini sejak abad ke-19.

Sistem "*copracontracten*" mulai kehilangan fungsinya sejak Depresi ekonomi dunia yang di Indonesia mulai terasa pada tahun 1930. Ketika itu banyak petani tidak sanggup membayar kreditnya karena harga kopra jatuh drastis di pasaran dunia. Suatu cara yang ditempuh untuk mengatasi keadaan itu adalah melalui pembentukan koperasi.

Perkoperasian memang telah berkembang subur di daerah ini. Setiap desa memiliki koperasi simpan pinjam yang diawasi oleh pihak berwajib (*Volkcredietwezen*). Dalam keadaan kesulitan di atas pada tahun 1930, atas inisiatif beberapa petani kelapa di Airmadidi (Tonsea), pemerintah daerah (Karesidenan) membentuk sebuah koperasi kopra yang diberi nama "*Verkoop Centrale Minahasa*" yang berpusat di Manado dengan pimpinan Arnold Mononutu. *Algemeene Volkscrediet Bank* milik pemerintah juga mengulurkan tangan untuk menyediakan keuangannya.

Sementara itu pemerintah juga membenahi sistem "*copracontracten*" dengan cara menegosiasi kembali jumlah hutang para petani dengan para pedagang perantara. Suatu landasan legal

dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan "*copracontracten*" dalam masa-masa selanjutnya dikeluarkan data dinamakan "*Copra Ordonantie*". Dalam peraturan itu Asisten Residen Minahasa mendapat kewajiban untuk mengawasi pelaksanaannya, dan setiap pedagang perantara harus memiliki izin untuk mengadakan kontrak itu.

Namun keadaan berubah lagi dengan meletusnya Perang Dunia kedua di Eropa pada tahun 1939. Sejak itu kopra, maupun komoditi lainnya dari Indonesia, tidak bisa diekspor lagi karena kapal-kapal dagang tidak aman dari torpedo-torpedo Jerman. Saat inilah para perkebunan swasta bergabung membentuk berbagai "*fonds*" berdasarkan peraturan pemerintah "*Crisies Ordonantie*", sehingga muncullah "*Rubberfonds*" (untuk perkebunan karet), "*Kina fonds*", "*Coffiefonds*", "*Theefonds*", dan lain sebagainya.

Perkebunan rakyat jelas tidak memiliki kemampuan untuk mengimpun dana daruratnya sendiri. Sebab itu pemerintah pusat di Batavia mengulur tangan membantu petani kopra dengan membentuk apa yang dinamakan "*Coprafonds*" pada tahun 1940. Dananya diperjuangkan melalui Volksraad yang mengalokasikan sejumlah uang bagi pemerintah untuk membeli kopra dari petani dan menimbunya di beberapa tempat dengan harapan akan dijual lagi kalau perang telah usai. Tetapi perubahan tidak sampai di situ saja. Dengan pendudukan Jepang (1942-1945) seluruh sistem itu hancur. Perkebunan kelapa dan perdagangan kopra mulai dihidupkan kembali Setelah usai perang, terutama di tahun-tahun 1950-an (Leirissa 1994).

3.5 Integrasi Ekonomi

Suatu permasalahan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia sejak paroh kedua abad ke-19 itu adalah apakah terjadi semacam integrasi ekonomi di seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Kalau di perhatikan sejarah ekonomi periode pra-VOC (khususnya dalam abad-abad ke-15 dan ke-16), jelas bisa dikatakan bahwa integrasi ekonomi ketika itu ada, walau sudah tentu mencakup wilayah yang lebih luas dari wilayah Hindia Belanda (antara lain

mencakup juga Malaka). Kemudian dengan caranya sendiri VOC juga berhasil mengintegrasikan ekonomi Nusantara dalam kaitan Asia, sekalipun hubungan dengan Negeri Nusantara lebih dominan.

Pertanyaan semacam ini pernah diuji dalam suatu Seminar Sejarah Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan di Australian National University di Canberra tahun 1992. Ternyata hubungan ekonomi, khususnya melalui komoditi-komoditi padat modal seperti pertambangan, lebih banyak terkait dengan negara-negara industri daripada dengan pulau-pulau di Indonesia sendiri.

Untuk konteks Indonesia pertanyaan ini selalu diajukan oleh para ilmuwan yang mempelajari pertumbuhan ekonomi di luar Jawa (Lindbland 1993). Pada dasarnya dicapai kesimpulan bahwa integrasi ekonomi di dalam wilayah Hindia Belanda sendiri tidak pernah terwujud. Pertumbuhan ekonomi di luar Jawa (seperti juga di Jawa) didorong oleh permintaan dari luar, bukan dari wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Keadaan ini memang mirip dengan keadaan pra-VOC ketika rempah-rempah memasuki pasaran dunia juga karena permintaan dari luar (Cina dan Eropa). Tetapi ketika itu ada jaringan perniagaan Nusantara yang berintikan berbagai imporium di Nusantara yang terkait dengan umporium Malaka. Dalam hal Hindia Belanda, masing-masing daerah produksi mengekspor komoditinya langsung keluar negeri, tanpa harus diperdagangkan dulu di Nusantara seperti di masa pra-VOC.

Masalah ini berkaitan dengan pertanyaan mengapa di Hindia Belanda tidak diadakan industrialisasi padahal bahan baku untuk itu telah ada (Howard Dick 1989). Menunggu hasil penelitian selanjutnya, kita hanya bisa mengadakan perkiraan apabila ketika itu terjadi industrialisasi maka kemungkinan besar arus komoditi dari satu pulau bisa mengalir ke pulau lainnya. Tetapi apakah dengan demikian terjadi integrasi ekonomi masih belum jelas karena faktor daya beli masyarakat juga penting untuk memanfaatkan hasil industri tersebut. Ataukah bentuk industrinya sekedar manufaktur pengelola bahan baku untuk diekspor, bukan pabrik yang menghasilkan bahan jadi. Ini semua belum bisa dikatakan dengan pasti seorang.

Namun demikian ada satu hal yang memperlihatkan adanya upaya integrasi ekonomi di masa Hindia Belanda, yaitu pembentukan perusahaan pelayaran yang mencakup seluruh Hindia Belanda (KPM). *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) dibentuk pada tahun 1888 dan mulai beroperasi tahun 1992. Sebelumnya jalur-jalur pelayaran di Hindia Belanda dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pelayaran Inggris maupun Cina yang berpusat di Singapura. Selain itu terdapat juga pelayaran tradisional yang belum banyak diteliti pula (Leirissa 1993). Pihak Belanda hanya memiliki perusahaan pelayaran antara benua yang menghubungkan Indonesia dengan negeri Belanda (*Rotterdamsche Lloyd*); selain itu berbagai perusahaan lainnya dari Jerman, Inggris dan Australia juga memiliki perusahaan perkapalan antar benua. Pada tahun 1847 memang ada usahawan Belanda, Corres de Vries, yang mendapat konsesi dari pemerintah untuk membuka perusahaan pelayaran Nusantara. Tetapi perusahaan ini tidak bertahan lama. Kemudian pada tahun 1863 pemerintah Belanda mengajak sebuah perusahaan Inggris untuk membentuk perusahaan pelayaran Nusantara, *Nederlandsh-Indische Stoomvaart Maatshappij* (NISM). Tetapi ini pun tidak banyak memberi keuntungan bagi kepentingan Belanda.

Menurut sejarawan yang mempelajari sejarah KPM, DR. J.N.F.M. a Campo, persoalan utama yang dihadapi Belanda adalah Singapura. Kapal-kapal yang berinduk di Singapura itu dengan sendirinya merugikan kedudukan Batavia sebagai pusat Hindia Belanda (a Campo 1992). Sebab itu pemerintah Belanda mengadakan perundingan dengan sejumlah pengusaha Belanda, termasuk direktur *Rooterdamsche Lloyd*, sehingga akhirnya pada tahun 1888 terbentuk KPM.

Misi KPM secara tersurat adalah menyelenggarakan jasa pelayaran di Nusantara. Tetapi tersirat pula misi lain, yaitu menjadi perusahaan pelayaran yang memegang monopoli atas pengangkutan semua barang dan personil pemerintah. Jadi sekalipun bukan perusahaan negara, tetapi tugas politiknya jelas menonjol (Ibid.).

Dalam perkembangannya hingga tahun 1914 KPM berhasil membangun suatu jaringan perhubungan hingga tahun 1914 KPM berhasil membangun suatu jaringan perhubungan laut yang mencapai

hampir seluruh pelosok Nusantara. Baik kota-kota besar sampai pada kota-kota kecil dan bahkan yang terpencil sekalipun dijangkau oleh kapal-kapalnya. Lebih dari itu jadwal pemberangkatan dan kedatangannya selalu tepat sehingga bisa diandaikan para pedagang dipelosok Indonesia. Namun demikian perusahaan ini tidak pernah mendapat laba besar-besaran seperti perusahaan-perusahaan Belanda lainnya, umpamanya BPM (minyak bumi). Ini disebabkan adanya misi politik yang kadang-kadang lebih menonjol dibandingkan dengan misi dagangnya.

Aspek politik ini nampak pertama-tama dari kewajiban kapal-kapal KPM untuk mengangkut personil pemerintah ke mana saja dibutuhkan. "Kapal putih" (badan kapal-kapal KPM semuanya di cat putih), dan seragam putih (pakaian dinas pejabat Belanda) merupakan lambang kekuasaan yang biasa menjangkau semua pelosok Hindia Belanda. Selatan itu kapal-kapal KPM juga berkewajiban mengangkut tentara Belanda (KNIL yang dibentuk pada tahun 1830) ke segenap pelosok untuk menumpas "pemberontakan" (Ibid.).

Sebab itu dari segi kolonialisme bisa dikatakan bahwa KPM berfungsi sebagai faktor-faktor integratif. Seluruh wilayah yang dikuasai Belanda itu dapat dijangkau melalui kapal-kapal KPM. Tetapi apakah dengan demikian juga bisa dikatakan bahwa KPM menjamin adanya integrasi ekonomi merupakan suatu masalah menyangkut lalu lintas barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain.

BAB IV

MENUJU KEMAKMURAN

Sejarah ekonomi Indonesia pasca Kolonial Hindia Belanda memperlihatkan usaha pemerintah Republik Indonesia mentransformasikan perekonomian kolonial menjadi ekonomi nasional. Struktur perekonomian kolonial yang memiliki ciri dualistik dan diskrepansi spasial hendak dirombak menjadi ekonomi nasional yang terintegrasi. Pandangan ekonomi nasional ini belum menemukan kancah penerapannya pada masa revolusi. Pada masa ini situasi ekonomi masih terpengaruh oleh perekonomian perang yang diintroduksi oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Pemerintah Militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengeralahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Sebagai akibatnya terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi dari masa sebelumnya terhenti bahkan kesejahteraan rakyat merosot tajam. Sektor industri perkebunan yang menjadi andalan utama ekspor pada masa Hindia Belanda mengalami kemunduran drastis. Sektor pertanian rakyat yang bertumpu pada tanaman padi yang sempat mengalami swa sembada tahun 1940 menurun tajam. Malahan terjadi bencana kekurangan pangan. Hal yang serupa dialami oleh sektor produksi lainnya seperti industri manufaktur, sektor distribusi dan jasa. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam tiga daerah pemerintahan yang berbeda menghancurkan jaringan perhubungan ekonomi yang ada.

Pada masa revolusi kemerdekaan, ancaman kembalinya kekuatan kolonialisme Belanda menyita seluruh perhatian Republik yang masih berusia muda. Sektor-sektor produksi tidak dapat dijalankan sama sekali. Sementara situasi politik dalam negeri masih mencari bentuk yang selaras dengan tujuan bersama ketika itu yakni mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan keadaan masyarakat meletakkan prioritas utama program kabinet pemerintahan pada pemulihan ekonomi, meski dalam kenyataannya program pemulihan itu sulit dilaksanakan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan justru banyak disokong oleh partisipasi masyarakat. Kekuatan perjuangan banyak berhutang budi pada penduduk pedesaan yang kerap menyuplai kebutuhan pangan mereka. Kebutuhan perjuangan lainnya diperoleh dengan berbagai cara, seperti penyeludupan dan penyitaan milik musuh. Selain itu, keutuhan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan mendapat ujian serius dengan pembentukan negara boneka oleh Van Mook. Perjuangan nasional memulihkan keutuhan ini banyak menyita perhatian pemerintah Republik. Keadaan seperti ini menghantar Republik Indonesia menuju pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda pada tahun 1949 yang diikuti oleh pemulihan integritas Republik Indonesia pada tahun 1950.

Perolehan kedaulatan dan pengakuan kemerdekaan bukanlah berarti penyelesaian masalah, terutama di bidang ekonomi. Sejumlah persoalan kesejahteraan, perbaikan keadaan dan penciptaan struktur ekonomi nasional kembali muncul dalam bentuk yang lebih nyata untuk segera diatasi. Pemikiran membangun suatu perekonomian nasional muncul kembali dan menempati agenda utama kabinet pemerintahan. Sejumlah persoalan dihadapi oleh Republik Indonesia dalam memulai kiprahnya sebagai negara merdeka berdaulat penuh. Pemerintah mempunyai anggaran yang jauh dari mencukupi untuk membiayai suatu rencana pembangunan. Untuk itu, sumber pemasukan keuangan yang mampu menyediakan keperluan tersebut. Sementara sistem perpajakan yang masih tradisional tidak dapat diandalkan sebagai sumber pemasukan. Sedangkan alternatif mencari sumber pembiayaan dari lingkungan internasional merupakan pilihan yang tidak pernah terlintas dalam pemikiran pembuat kebijakan ekonomi. Di samping itu pemerintah menghadapi masalah pembentukan suatu

badan perencanaan pembangunan, perbaikan pelayanan masyarakat melalui pelembagaan birokrasi ekonomi yang makin meluas. Prasarana dan sarana perhubungan antar jajaran birokrasi pemerintahan memerlukan penanganan yang terkendali. Perhubungan antar daerah masih menjadi penghambat dalam mekanisme jaringan ekonomi ekspor ke manca negara. Selain itu pergolakan daerah yang mengancam keutuhan dan kesatuan nasional tidak dapat diabaikan dan ikut mempengaruhi pengerahan sumber daya pemerintah.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah mencanangkan sejumlah program dan kebijakan ekonomi. Sejumlah perencanaan pembangunan disusun yakni antara lain Rencana Urgensi Perekonomian tahun 1951, Rencana Lima Tahun atau Rencana Juanda tahun 1955, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahun 1961, dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa Orde Baru. Dalam periodisasi sejarah politik Indonesia, rencana pembangunan ini berakar pada periode tertentu. Rencana Urgensi Perekonomian dan Rencana Juanda lahir pada masa demokrasi parlementer. Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) digagaskan pada masa Demokrasi Terpimpin. Sedangkan Repelita merupakan produk politik ekonomi masa Orde Baru. Secara keseluruhan selain Repelita, rencana pembangunan ekonomi lainnya tidak berjalan secara maksimal atau lebih banyak tinggal rencana di atas kertas, apalagi di masa demokrasi terpimpin yang justru memperlihatkan gejala kemunduran ekonomi. Oleh itu pula, target dan sasaran yang direncanakan semula banyak yang tidak tercapai, terutama perwujudan ekonomi nasional. Berbagai taktor menjadi penyebab tidak tercapainya gagasan yang telah muncul pada masa awal Republik Indonesia.

Target dan sasaran pembangunan mulai tercapai pada masa Orde Baru. Repelita I sampai IV menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan menakjubkan. Pada tahun 1984 Indonesia mencapai target swa sembada beras yang berpuluh tahun menjadi impian seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 1980-an pula integrasi ekonomi antara sektor produksi dan spasial diperoleh, bersamaan dengan laju pertumbuhan sektor industri (manufaktur) yang melampaui sektor pertanian. Selanjutnya sumbangan ekspor produksi sektor industri

berhasil melampaui sektor minyak bumi dan gas (migas) dalam penerimaan devisa negara. Melalui trilogi pembangunan, masalah-pemerataan pendapatan masyarakat mendapat perhatian dan pada awal Pelita VI yang disebut sebagai awal Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) persoalan pengentasan kemiskinan menjadi pokok perbincangan dan target pembangunan. Repelita yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dipandang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian nasional, khususnya menciptakan sistem ekonomi nasional.

4.1 Masa Pendidikan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan 1942--1950

Masa Kolonial Hindia Belanda meninggalkan dampak yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi masyarakat di masa selanjutnya. Pada struktur perekonomian kolonial memperlihatkan adanya dualisme. Di satu pihak terdapat sektor industri modern yang berorientasi pasar, padat modal dan produksi massal. Di pihak lain berkembang sektor ekonomi tradisional yang berorientasi padat karya dan berskala kecil. Selain itu terdapat pula diskrepansi spasial produksi. Persoalan ini yang dihadapi kelak oleh pemerintah Republik Indonesia dalam upaya mengintegrasikan perekonomian nasional.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah kepada bala tentara Jepang, dalam hal ini Angkatan Darat XVI. Sejak itu Indonesia berada dalam pendudukan Jepang yang membawa dampak perubahan ekonomi besar-besaran. Jepang meletakkan penyerbuannya ke wilayah selatan dengan tujuan eksploitasi ekonomi dalam rangka mendukung Jepang dalam Perang Pasifik. Produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer menempati prioritas utama. Perubahan besar lainnya berlangsung di sektor pertukaran dan perdagangan. Pulau Jawa yang menggantungkan diri pada perdagangan luar negeri untuk produk-produk tertentu mengalami kesulitan dengan terputusnya mata rantai perdagangan. Substitusi barang-barang impor harus diproduksi sendiri seperti tekstil. Untuk itu penanaman tanaman bahan baku tekstil digalakkan oleh

pemerintah Jepang. Sementara pengusahaan komoditi ekspor yang kini tidak lagi memperoleh pasar dibatasi dan dialihkan ke sektor penanaman lainnya.

Di bidang pertanian pada bulan November 1943 Jepang memperkenalkan suatu program yakni *Kinkyu Shokuryo Taisaku* (Tindakan-tindakan Mendesak Mengenai Bahan Makanan) yang meliputi, pengenalan jenis padi baru, inovasi teknik penanaman, peningkatan infra struktur pertanian, perluasan sawah dan propaganda dan pelatihan petani. Di sektor perkebunan tanaman bahan baku sandang makin digalakkan, seperti kapas, rami, yute, rosela dan sisal. Sementara perkebunan besar lainnya yang telah diusahakan sejak masa Hindia Belanda tidak berhasil mempertahankan tingkat produksinya (Kurasawa 1993).

Program pertanian Jepang tidak mencapai sasarannya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Situasi ekonomi perang tidak memungkinkan investasi pemerintah yang diperlukan dalam melancarkan programnya, sementara kondisi perekonomian petani tidak memungkinkan pengadaan kebutuhan sendiri dalam mendukung kehendak pemerintah. Hilangnya pasar dan pengerahan tenaga kerja bagi kebutuhan perang ikut menghalangi pelaksanaan program tersebut. Sementara perubahan mendadak dan pengenalan teknik baru menimbulkan berbagai ketidak menentuan sikap dan penerimaan petani. Akibatnya, mereka tidak dapat meningkatkan produksi dan terbelit dalam kesulitan pangan.

Pemerintah Militer Jepang memilih pulau Jawa sebagai daerah pemasok kebutuhan beras bagi wilayah Asia Tenggara, disamping Siam, Birma dan Cochin China. Sehubungan itu, badan-badan pengendalian penyediaan beras dibentuk, mulai dari *Beikoku Tosei Kai* (Persatuan Kontrol Beras), *Shokurya Kanri Zimusho* (Kantor Pengelolaan Makanan) sampai dengan *Shokurya Kanri Kyoku* (Biro Pengelolaan Pangan). Badan ini mengorganisir penggilingan beras dan pedagang beras yang keanggotaan bersifat wajib. (Kurasawa 1993)

Pada bulan April 1943 suatu kebijaksanaan beras dilancarkan yang menentukan bahwa pasar bebas beras dilarang dan petani harus menyerahkan sebagian panen mereka kepada pemerintah. Sedangkan

jumlah wajib serah itu diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah, tergantung kemampuan produksinya. Kebijakan ini makin memperberat beban rakyat Indonesia, sehingga tidak jarang terdengar berita bencana kelaparan di berbagai tempat.

Ketidakmenentuan perkembangan perekonomian berkelanjutan ke masa berikutnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Sukarno dan Hatta atas nama rakyat Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disusun dan struktur pemerintahan dibentuk. Namun situasi yang berlangsung di tengah-tengah pemberlakuan status quo oleh pihak Sekutu terhadap seluruh wilayah pendudukan Jepang sebagai pihak yang kalah perang dan disusul oleh bayang-bayang kembalinya kekuatan kolonial Belanda tidak memungkinkan kabinet yang dibentuk menjalankan roda pemerintahan sebagai semestinya. Situasi bergulir seiring dengan pengerahan kekuatan masyarakat membentuk kekuatan perjuangan.

Mempertahankan kemerdekaan adalah tekad dan target utama bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dalam konteks itulah, dapat dipahami mengapa suatu program pembangunan ekonomi yang berencana dan berjangka panjang tidak diketemukan pada setiap program kabinet. Penekanan program ekonomi diletakan pada pemulihan dan perbaikan keadaan. Oleh karena jangankan mengupayakan pemasukan devisa sebagai anggaran pembiayaan pembangunan, pembiayaan perjuangan diusahakan melalui berbagai cara dan tidak terkoordinir terpusat. Penyeludupan menembus blokade Angkatan Laut Belanda merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan tersebut, selain dukungan masyarakat pedesaan.

Kabinet pemerintahan yang dibentuk senantiasa memasukkan butir-butir rencana di bidang perekonomian dalam program-programnya. Kabinet Sjahrir I yang menggantikan kabinet presidensi pada November 1945, mencanangkan beberapa Program pokok yang mencakup aspek ekonomi, yakni memperbaiki kemakmuran rakyat di antaranya melalui distribusi pangan dan menanggulangi keuangan Republik. Pergolakan politik intra parlemen menyusul setelah pembentukan kabinet yang melumpuhkan kegiatannya. Pada kabinet

Syahrir II beberapa pokok program di bidang ekonomi meliputi penyempurnaan produksi, distribusi pangan dan sandang, dan pengambilalihan perusahaan perkebunan asing.

Di tengah-tengah gejolak revolusi itu, sempat muncul suatu pemikiran ekonomi yakni Siasat Pembangunan Ekonomi yang dicanangkan pada masa kabinet Syahrir tahun 1947. Mohammad Hatta ditunjuk sebagai ketua komite Siasat Ekonomi. Akan tetapi, komite ini belum sempat membuahakan hasil seperti yang dikehendaki yakni berupa pembuatan rencana pembangunan ekonomi yang menyeluruh.

4.2 Masa Demokrasi Parlementer 1950--1957

Pada tahun 1950-an pada dasarnya Indonesia belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Langkah-langkah yang ditempuh hanyalah berupa rehabilitasi struktur perekonomian dan penanggulangan kesulitan keuangan. Ketika itu belum ada pemikiran dan upaya untuk mengkaitkan tindakan laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Walau laju pertumbuhan penduduk mulai terasa, seiring dengan perpindahan penduduk ke daerah perkotaan yang lebih berhubungan dengan persoalan keamanan.

Pada tahun 1951 diperkenalkan suatu kebijakan ekonomi yang dikenal dengan Rencana Urgensi Perekonomian. Pada hakekatnya, program ini baru berbentuk daftar proyek-proyek yang menampilkan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam menanggulangi persoalan ekonomi yang mendesak. Dengan perkataan lain, program ini bukanlah suatu perencanaan jangka panjang, namun lebih merupakan rencana tindakan darurat mengatasi kemerosotan ekonomi. Walau demikian Rencana Urgensi Perekonomian dilandasi suatu gagasan mulia, yakni mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, dengan industrialisasi sebagai motornya. Sejalan dengan itu sektor pertanian sebagai realitas dominan yang ada di masyarakat, tidak dikesampingkan. Sektor industri yang diprioritaskan adalah industri kecil.

Persoalan ekonomi yang sangat menonjol pada masa itu, yang erat kaitannya dengan suasana politik, adalah keadaan keuangan negara yang menunjukkan terbatasnya jumlah devisa yang tersedia. Kecenderungan politik negara yang baru terlepas dari cengkraman Colonialism tidak mementingkan usaha pencarian bantuan luar negeri. Pada hal Amerika Serikat dan PBB telah memberikan isyarat akan pentingnya bantuan modal dan teknologi bagi negara baru merdeka dalam menggerakkan roda pembangunan. Situasi dunia sendiri memperlihatkan ada polarisasi dua blok yang diselimuti dengan Perang Dingin (*Cold War*). Sikap Indonesia jelas terlihat ketika Kabinet Sukiman mendapat kecaman keras dari kekuatan-kekuatan politik dalam negeri karena menandatangani **Mutual Security Act** dengan Amerika Serikat.

Kebijakan lainnya yang muncul pada periode Demokrasi Parlemerter ini adalah mendorong terciptanya lapisan pengusaha nasional. Sejumlah fasilitas disediakan pemerintah agar pengusaha nasional dapat bangkit dan mampu menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekonomi nasional. Kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan Kebijakan Benteng yang menekankan Indonesianisasi. Kebijakan Benteng melonggarkan fasilitas memasukkan barang dari luar negeri kepada pengusaha nasional bumiputra, yang dimaksudkan agar mereka mampu memupuk sumber dana untuk tumbuh sebagai pengusaha bermodal tangguh. Namun hasil yang diperoleh tidak seperti yang dicanangkan semula.

4.3 Masa Demokrasi Terpimpin 1958–1966

Pada akhir tahun 1956 dan awal 1957, Presiden Sukarno membuat serangkaian pidato yang melatarbelakangi memususnya demokrasi parlementer yang berlaku sejak pembentukan kabinet Hatta pada bulan Desember 1949, dan penggantinya adalah suatu bentuk pemerintahan yang memusatkan kekuasaan negara kembali ke pangkuan Presiden. Sistem politik yang berkembang kemudian dikenal sebagai masa Demokrasi Terpimpin.

Ketika Kabinet Ali II akhirnya jatuh pada bulan Maret 1957, kemudian digantikan pada bulan berikutnya oleh suatu kabinet ahli

ekstra parlementer yang dipilih oleh Presiden Sukarno, dan dipimpin oleh ahli perencanaan yang sangat disegani, Juanda, menandai berakhirnya masa Demokrasi Parlementer.

Pada masa kabinet Juanda, yang melansir Rencana Juanda, suatu bangunan ekonomi Indonesia yang dilandaskan pada suatu pemikiran ekonomi disusun oleh Biro Perancang Negara. Instrumen ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yang berguna untuk perhitungan proyek-proyek yang membutuhkan investasi mulai digunakan dalam perencanaan pembangunan. (Sjahrir, 1986). Gagasan industrialisasi besar-besaran yang bertujuan merombak struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional diperbincangkan kembali. Sehubungan hal tersebut terdapat dua pilihan strategi yakni Strategi *Big Push Development* dan *Balanced Growth*.

Strategi *Big Push Development* beranggapan bahwa sehubungan dengan dana yang terbatas, konsentrasi pembangunan dipusatkan pada sektor-sektor tertentu agar mampu berkembang menjadi besar. Pada suatu ketika sektor yang telah berkembang akan membawa serta sektor lainnya. Sedangkan strategi kedua berkecenderungan penyebaran dana ke berbagai sektor pembangunan, dengan penekanan keseimbangan. Sektor industri dan sektor lainnya dikembangkan bersama-sama hingga mencapai tingkat tertentu dimana masing-masing sektor dapat saling menyediakan kebutuhan lainnya.

Situasi yang ada ketika itu memalingkan perhatian seluruh pihak pada pilihan kedua. Oleh karena semua sektor perekonomian memnunjukkan keadaan yang menyedihkan. Apabila dilakukan strategi *Big Push Development* maka dibayangkan sektor-sektor yang diabaikan akan makin terlantar. Sementara kecenderungan yang hidup di berbagai kalangan perencana ekonomi adalah pertumbuhan yang Heiman dengan terciptanya perkembangan berbagai sektor yang saling menunjang. Namun perkembangan politik ikut mempengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan ini.

Walaupun rencana Juanda yang disusun pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II dimatangkan untuk siap diterapkan pada saat Juanda menjabat sebagai Perdana Menteri, situasi politik nasional telah berubah dan tidak lagi kondusif bagi implementasinya. Pengaruh

Presiden yang memiliki pandangan tersendiri mengenai strategi pembangunan Indonesia telah makin menguat. Kabinet Juanda merupakan awal peralihan dari kabinet parlementer menjadi kabinet presidensial. Rencana Juanda tidak mendapatkan peluang untuk dilaksanakan sepenuhnya.

Beberapa kebijakan industri yang digariskan dalam Rencana Lima Tahun itu antara lain adalah mendorong perusahaan kecil padat karya dan pendirian perusahaan industri dasar di bawah pengelolaan negara. Perusahaan Induk industri didirikan yang mengkhususkan diri pada jenis industri tertentu. Perusahaan induk berfungsi memberikan bantuan bagi perusahaan industri kecil dalam hal pembelian bahan baku, penjualan, pelatihan dan produksi agar dapat mencapai tingkat efisiensi dan kualitas yang diharapkan.

Peran negara dalam pengembangan industri dijalankan oleh Bank Industri Negara yang didirikan pada tahun 1951. Perusahaan ini menerjunkan diri dalam sektor usaha yang tidak diperhatikan oleh sektor swasta dan yang memerlukan pembiayaan yang besar, seperti pemintalan, semen, pupuk, industri kimia dan kertas. Industri tekstil yang mengalami kehancuran pada masa sebelumnya dipulihkan kembali dan berkembang cukup pesat.

Sementara periode antara bulan April dan November ditandai oleh ketegangan yang berkepanjangan antara Jakarta dan daerah-daerah yang mendirikan Dewan-Dewan daerah. Pada akhir tahun tersebut, keadaan memburuk ketika dua orang mantan perdana menteri (M. Natsir dan Burhanuddin Harahap) bersama-sama pakar ekonomi Sumitro dan Sjafruddin Prawiranegara menggabungkan diri dengan kekuatan di Padang dan pada bulan Februari 1958 suatu kabinet tandingan didirikan, dipimpin oleh Sjafruddin. (Leirissa 1992). Pada saat itu, Sukarno sedang berkunjung ke manca negara, dan pemimpin partai Masyumi di Jakarta sedang mengupayakan penyelesaian; khususnya diusulkan agar suatu pemerintahan persatuan nasional dibentuk di bawah mantan wakil presiden M. Hatta. Namun Sukarno kembali ke Jakarta pada bulan Februari dan segera mengambilalih kendali; pada bulan berikutnya Militer, di bawah Mayor Jenderal Nasution memulihkan kekuasaan di sejumlah tempat di Sumatera dan

Sulawesi. Semua pihak yang terlibat dalam pemberontakan diproses dan beberapa di antaranya dibuang. Perlahan-lahan partai-partai politik pada umumnya dibatasi kegiatannya, dan selama dua tahun setelahnya Presiden Sukarno memperkuat kekuasaan pribadinya. Pada bulan Juli 1959, kebijakan Kembali ke Undang-Undang Dasar '45 membatasi kekuasaan dan pengaruh parlemen, dan pada bulan Maret 1960, setelah seluruh kelompok oposisi bersepakat menolak usulan Anggaran, presiden membubarkan semua anggota parlemen, dan mengangkat wakil-wakil rakyat yang baru, untuk menyokong kehendaknya. Sejak itu, ia memegang sepenuhnya kekuasaan dalam bidang ekonomi seperti juga di bidang lainnya.

Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda pada akhir tahun 1957 dilancarkan, bersamaan dengan keadaan perang saudara di beberapa wilayah ekspor yang penting, menuju suatu penurunan dalam hasil pada beberapa sektor ekonomi pada tahun 1958, walaupun terdapat beberapa silang pendapat mengenai tingkat Penurunan.

Pidato Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1956 menyangkut pembatalan perjanjian KMB secara unilateral. Dengan sendirinya terpaut di dalamnya adalah pembatalan pembayaran hutang-hutang Republik seperti yang termaktub dalam perjanjian. Selain itu pidato tersebut mengisyaratkan pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda, yang mulai dilaksanakan pada bulan Desember 1957. Perangkat Undang-undang yang dipersiapkan untuk tindakan nasionalisasi itu adalah UU nomor 86/ 1958 dan sebagai pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 2/1959. Pengambilalihan ini diberi kompensasi yang diatur melalui suatu kepantian yang dibentuk oleh pemerintah.

Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) dibentuk, yang bertugas mengatur serta mengawasi kelancaran jalannya nasionalisasi. Kelompok pertama perusahaan Belanda yang terkena nasionalisasi adalah 38 perusahaan tembakau yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan besar, yakni NV Verenigde Deli Mij, NV Senembah Mij, NV *Veregnig de Klatensfche Cultuur Mij.* dan lainnya, Selanjutnya kurang lebih 205 perusahaan perkebunan lainnya menyusul terkena nasionalisasi (Oey 1991).

Setelah itu dilancarkan nasionalisasi sektor perbankan. Bank-bank yang terkena adalah Nationale Handelsbank, Escompto Bank, dan NHM. Kemudian sektor transportasi mengalami tindakan serupa dengan diambilalihnya Semarang-Cirebon Stoomtram mij, Madoera Stoomtram mij dan Nederlandsch-Indische *Spoorwegmaatschappij*. Akan tetapi pengembangan dan pengelolaan sektor-sektor ekonomi tersebut mengalami sejumlah kendala seperti kurangnya tenaga ahli dan kelangkaan alat-alat produksi.

Perkembangan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dapat dilihat dalam sajian data kuantitatif berikut ini. Angka-angka dalam Buku Tahunan PBB mengenai penghitungan pendapatan untuk tahun 1960 menunjukkan suatu penurunan sekitar 3%, seluruhnya di sektor manufaktur dan jasa; namun data Badan Perancang Nasional yang dikutip oleh Paauw. (Paauw 1967) menampilkan suatu penurunan yang lebih tajam sekitar 12,4%. Angka terakhir tampaknya berlebihan karena dampak utama dari kepergian modal Belanda lahir oleh sektor manufaktur dan jasa modern, dan keduanya relatif kecil, sehingga walaupun penurunan 40% pada pertambahan angka manufaktur yang terlihat pada angka PBB hanya diterjemahkan pada penurunan 4,15% dalam GDP (*Gross Domestic Product*), dan hal ini ditutup dalam nian. jumlah tertentu oleh perkembangan pertanian. (Booth 1993)

Sejak 1958 sampai dengan 1967 pertumbuhan GDP membaik namun lebih rendah dibandingkan masa 1950-1957; pertumbuhan rata-rata per tahun menurut Laporan Bank Dunia/PBB adalah 1,71%; Laporan lainnya menjadikan suatu pertumbuhan tahunan 1,4%. Kedua perkiraan ini menyiratkan jatuhnya pertumbuhan per kapita, seperti jumlah penduduk meningkat sekitar 2% per tahun pada dekade 1950 hingga 1970. Laporan Bank Dunia menampilkan penurunan mutlak GDP pada tahun 1963, terutama berkaitan dengan penurunan yang disebabkan kekeringan dalam hasil pertanian. Sejak 1964 hingga 1967, pertumbuhan GDP di bawah 2% per tahun, di bawah rata-rata pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1967 GDP per kapita dengan demikian tetap di bawah tingkat yang ada pada tahun 1957, dan juga di bawah tingkat yang ada pada tahun 1938. (Paauw 1967).

Gambaran pertumbuhan yang relatif menurun antara tahun 1960 dan 1967 diperlihatkan pada setiap sektor utama ekonomi, dengan pengecualian sektor jasa pemerintah, yang mana berkembang 4,6% per tahun, atau lebih dua kali pertumbuhan GDP. Namun alasan bagi gambaran yang menurun dari tiap sektor utama lebih berbeda. Pada sektor pangan, upaya dilancarkan untuk mendorong teknologi pemupukan yang baru dalam produksi beras melalui program produksi beras tiga tahun yang dicanangkan pada tahun 1959. Di bawah program ini, pemasukan pupuk meningkat dari 250.000 hingga 450.000 ton, namun oleh karena penggantian hujan yang minim, khususnya di Jawa, pada tahun 1961, 1963, 1965 dan 1967, pertumbuhan panen beras mengecewakan. Pada tahun 1963 pertanian padi jatuh 10% sebagai akibat musim Kering yang tidak seperti biasanya; di Jawa pada tahun 1964 kembali jatuh. Walaupun terdapat sejumlah bukti peningkatan hasil di daerah Jawa dimana pupuk diterapkan lebih intensif, di mana-mana hasil tetap dari 1960-1967.

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi Terpimpin memperlihatkan kemunduran, terutama apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kemerossotan ekonomi berpengaruh besar pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Di bidang moneter terjadi pemotongan nilai mata uang yang menyisakan nilai sepersepuluh dari nilai mata uang kertas yang sedang beredar. (Paauw, 1967) Peredaran uang yang makin meningkat dibarengi dengan laju tingkat inflasi yang tinggi. Berdasarkan perbandingan dengan peredaran uang tahun 1950, sebesar 4.300 juta rupiah, tingkat inflasi tahun 1960 adalah 11 kali lipat dan tahun 1965 sebesar 512 kali lipat. Seraya itu Pula anggaran belanja pemerintah berada pada keadaan defisit, seperti halnya pula cadangan devisa negara yang menurun drastis.

Perkembangan ekonomi yang menurun ini memberi sumbangan besar pada keresahan sosial yang timbul di berbagai tempat. Keadaan ini menjadi pemicu pergolakan politik yang kemudian bermuara pada kejatuhan Sukarno. Indonesia memasuki babak politik dan ekonomi yang baru dan berbeda dengan masa sebelumnya, yang dikenal dengan Orde Baru.

4.4 Masa Orde Baru : Repelita I--V

Perubahan sistem politik dari Demokrasi Terpimpin menjadi Demokrasi Pancasila atau Masa Orde Baru membawa perubahan pula pada orientasi dan kebijakan pembangunan ekonomi. Program pembangunan nasional dituangkan ke dalam suatu perencanaan bertahap, yakni Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun dan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pada masa Orde Baru pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional mendapat prioritas utama, yang memerlukan prasyarat penciptaan stabilitas politik. Kebutuhan akan biaya pembangunan sebagian besar, pada awalnya, diperoleh dari bantuan luar negeri. Susunan kabinet sebagai pengemban dan pelaksana program pembangunan lebih bersifat kabinet zaken.

Kabinet Pembangunan I yang dibentuk Presiden Soeharto pada tanggal 6 Juni 1968 mengemban tugas yang dikenal sebagai Panca Krida (5 Tugas) yakni,

1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk pelaksanaan dan keberhasilan Rencana Pembangunan Lima tahun dan Pemilihan Umum.
2. Merumuskan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima tahun.
3. Menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tanggal 5 Juli 1971.
4. Meningkatkan ketertiban umum dan keamanan dengan memusnahkan sisa-sisa gerombolan pemberontak, dan usaha apapun yang hendak menyalahgunakan, menyelewengkan dan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945.
5. Meningkatkan efisiensi pemerintah dan membersihkan korupsi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. (Wilson, 1992)

Pada tanggal 15 Juni 1968, Presiden Suharto menunjuk sebuah tim yang terdiri dari 8 ahli dan teknokrat berlatarbelakang pendidikan barat. Mereka diserahi tanggung jawab untuk memonitor atau mengatur perkembangan dan trend ekonomi. Selain itu opini, rencana dan rekomendasi mereka juga diharapkan dapat memberkan arah pembangunan ekonomi. Hasil pemikiran para pakar tersebut

dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima tahun (Repelita).

Repelita I memberi tekanan pada kebijakan pangan. di sekitar bidang produksi dan konsumsi beras. Pada masa itu kebijakan pangan identik dengan beras. Penyediaan beras yang cukup merupakan inti kebijakan pemerintah Orde Baru, oleh karena produksi beras merupakan inti kesejahteraan rakyat. Produksi beras ditargetkan meningkat sebesar 47 % menjelang akhir Pelita I (1974).

Sejak semula disadari oleh pemerintah Orde Baru bahwa pelaksanaan program Bimas, peninggalan dari masa sebelumnya, memerlukan sejumlah perbaikan. Pada pertengahan tahun 1966, Kolognas (Komando Logistik Nasional) dibentuk dan bertugas menangani masalah logistik penyebaran barang-barang kebutuhan pokok serta menyalurkan dana kepada peserta Bimas melalui aparat pemerintah yang ditunjuk, yakni Gubernur dan Bupati. Langkah-langkah ini mulai menunjukkan hasil yang nyata dengan meningkatnya produksi lahan-lahan pertanian. Pada tahun 1967 Kolognas diganti oleh Bulog, Badan Urusan Logistik yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.

Pada tahun itu pula Indonesia dilanda krisis besar, yang disebabkan berlangsungnya musim kering yang panjang. Harga beras naik tidak terkendali. Persediaan beras dunia menurun sehingga impor beras mengalami kesulitan. Menghadapi situasi ini, pemerintah melancarkan usaha memenuhi kebutuhan beras dan mengendalikan harga. Beras jenis PL 480 dari Amerika Serikat dengan segera didatangkan. Bersamaan dengan itu jenis pangan lainnya diluncurkan ke pasaran sebagai alternatif pengganti beras. Krisis beras ini kian menguatkan prioritas pemerintah dalam kebijakan pangan, yakni kebijakan beras.

Mengantisipasi situasi krisis tersebut program Bimas makin digalakkan dan lebih disempurnakan menjadi Bimas Gotong Royong. Tujuannya adalah menuju suatu program penyuluhan yang intensif disamping penyediaan pupuk, pestisida dan kredit. Program ini berhasil dalam memperkenalkan para petani dengan teknologi

pertanian modern yang berkaitan dengan pemakaian pupuk dan bibit unggul yakni varietas unggul IRRI (PB5 dan PB8).

Akan tetapi mencapai swa semesta pangan bukanlah suatu proses yang mudah. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target pembangunan yang dikerahkan melalui peningkatan investasi pemerintah. Untuk itu, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan bertambah menjadi 3 kali lipat selama Pelita I. Sebagian besar dari target produksi tercapai, kecuali produksi beras, yang bertambah sekitar 25 % dengan kenaikan rata-rata setiap tahun sebesar 41,5%.

Untuk itu perbaikan dilakukan terhadap program Bimas dan program penunjang lainnya. Mulai tahun 1973 BUUD diikutsertakan dalam menjaga kestabilan harga minimum beras, yang sebelumnya merupakan tugas Bulog. Langkah-langkah ini memperlihatkan prospek yang cerah. Angka produksi beras setiap tahun menunjukkan peningkatan. Antara tahun 1968/1969 sampai dengan tahun 1973/1974 memperlihatkan kenaikan 4,5%, walau secara keseluruhan angka kenaikan antara tahun 1968/1969 hingga tahun 1977/1978 berkisar pada 31,8 % setiap tahun. (Booth, Mc. Cawley 1990)

Keadaan sektor industri pada masa sebelum tahun 1966 pada umumnya tidak menggembarakan. Suasana ekonomi dan politik yang serba tidak menentu memberikan andil dalam pertumbuhan sektor industri. Pada masa Orde Baru iklim konstruktif bagi pertumbuhan industri dibina. Beberapa kebijakan dicanangkan seperti perombakan sistem devisa yang mana transaksi luar negeri menjadi lebih bebas dan disederhanakan agar bahan baku dan modal tidak sukar diperoleh, mendorong pertumbuhan sektor swasta dengan mengurangi fasilitas-fasilitas yang sedianya khusus dinikmati oleh perusahaan swasta, dan kemudian diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1966.

Tujuan dan arah pembangunan sektor industri yang ditetapkan pada Repelita I adalah industri yang mendukung dan saling berkaitan dengan sektor pertanian, industri yang dapat menghasilkan atau menghemat devisa dengan cara substitusi impor, industri padat karya, dan industri yang mendorong usaha-usaha pembangunan regional.

Sedangkan struktur industri yang ada pada masa awal Orde Baru memperlihatkan beberapa ciri. Ciri pertama adalah keanekaragaman sektor industri. Terdapat 3 golongan perusahaan yakni perusahaan besar dan sedang yang termasuk sektor industri modern, perusahaan kecil dan perusahaan industri rumah tangga. Keanekaragaman ini membawa suatu dilema bagi perencanaan ekonomi Indonesia ketika dihadapkan pada pilihan antara prioritas industri pada modal atau pada karya. Apabila tekanan diberikan pada penciptaan lapangan kerja dan memerangi kemiskinan maka penyaluran sumber-sumber ekonomi yang ada mengalir pada perusahaan kerajinan rumah tangga, yang seringkali tidak produktif dan relatif singkat usianya. Namun suatu orientasi ekonomi yang bertujuan pada pertumbuhan ekonomi mengedepankan sektor industri besar.

Ciri kedua adalah sempitnya basis industri dan ketergantungannya pada sektor pertanian. Sedikit jumlah sektor industri yang mengolah hasil pertanian yang pertanian. Pada umumnya industri pertanian berkuat pada pengolahan hasil kerajinan. Jarang ditemukan jenis usaha agro industri.

Ketiga adalah adanya perbedaan yang mencolok antara perkembangan industri di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Pulau Jawa memiliki proporsi tenaga kerja yang lebih besar. Sementara industrialisasi di Luar Jawa belum berarti banyak.

Pada tahun 1970-an awal distribusi perusahaan-perusahaan industri antar daerah masih mencerminkan pola pertumbuhan warisan jaman penjajahan. Lebih dari 80% lapangan kerja di sektor industri besar dan sedang terletak di Pulau Jawa. Industri-industri pertanian yang ada erat hubungannya dengan sumber daya alam dan lokasinya dipengaruhi oleh letak perkebunan-perkebunan yang memasok bahan mentahnya. Pencanaan UU PMA dan PMDN dimaksudkan untuk menumbuhkan industri-industri baru yang dapat mengurangi perbedaan antar daerah ini. Namun angka-angka BKPM menunjukkan bahwa 70% proyek industri yang direkomendasikannya berlokasi di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kecenderungan memilih lokasi yang telah mantap ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kemudahan menghubungi aparat

pemerintah pusat apabila berhadapan dengan prosedur birokrasi, ketersediaan jaringan pengangkutan dan komunikasi yang lancar, keberadaan lembaga keuangan utama, berdekatan dengan industri lainnya dan kecenderungan para pengusaha bertempat tinggal di kota-kota besar.

Selama Pelita I terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti untuk masa selanjutnya. Sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan peternakan terhadap GDP semakin kecil, dari 44 % pada tahun 1971 menjadi 38,71%. Sedangkan peran sektor industri dalam pembiayaan pembangunan semakin bergerak naik yakni dari 81,8 % pada tahun 1971 menjadi 10,4 % pada akhir Pelita I. Kemajuan sektor industri pada pelita I tidak hanya terletak pada diversifikasi jenis usaha industri yang semakin meluas, namun juga pada kemampuannya melakukan ekspor.

Melanjutkan pencapaian yang diperoleh dari Pelita I, Repelita II (1974/751-1979/1980) bertujuan :

- a. menyediakan pangan, sandang dan papan yang lebih baik.
- b. memperbaiki dan memperluas infra struktur untuk mendukung pembangunan industri.
- c. mengembangkan industri yang mengolah bahan baku terutama yang berasal dari sektor pertanian dan pertambangan.
- d. meningkatkan kesempatan kerja.
- e. pemerataan kesejahteraan sosial.
- f. menyediakan dana yang lebih besar untuk pendidikan, kesehatan dan program keluarga berencana.

Pada Repelita II pemerintah meletakkan laju pertumbuhan sektor industri sebesar 31,0 %, Pertambangan 10,11% dan pertanian 4,6% Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun berkisar pada 7,2%.

Strategi industrialisasi yang dilancarkan berjalan sejajar dengan strategi perdagangan internasional. Negara maju tidak memproduksi sendiri barang-barang industri mereka, namun mencari lokasi produksi di negara-negara berkembang yang menyediakan fasilitas bersaing, keterbukaan pasar, ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja murah.

Sasarannya adalah negara-negara yang sedang mengembangkan industrialisasi pengganti barang-barang impor (substitusi impor). Situasi ini diantisipasi oleh Indonesia yang menempatkan sektor industri didamping sektor pertanian dalam prioritas pembangunannya. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing menjadi tumpuan investasi di sektor industri.

Selanjutnya Repelita III 1978/1979 - 1983/1984 menekankan 3 asas utama:

- a. Distribusi hasil pembangunan yang lebih merata untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi.
- c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. (Booth, Mecawley, 1990)

Pendapatan riil nasional direncanakan akan meningkat 6,5% setahun dengan percepatan pertumbuhan sektor industri dan pengangkutan. Perincian sektoral anggaran pembangunan menunjukkan penurunan 14% di sektor anggaran pertanian dan peningkatan menjadi 19% di sektor industri, pertambangan dan energi, dan 16 % di sektor pengangkutan dan pariwisata. Menjelang akhir Pelita III diperkirakan sektor pertanian hanya mencapai sedikit lebih tinggi dari seperempat GDP. Selain itu penekanan utama juga diberikan pada pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan di Indonesia, dan pada sasaran untuk memenuhi kebutuhan pokok secara lebih merata, termasuk kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lainnya. Disamping itu, disadari bahwa lapangan kerja baru dan produktif perlu diciptakan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Pemerintah Orde Baru memasuki tahun 1980-an dengan bayang-bayang penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Pada periode 1981-85 kecenderungan pertumbuhan itu kian nyata dan mencolok. Untuk itu pemerintah segera menerbitkan serangkaian keputusan yang direncanakan secara seksama. Keputusan itu meliputi devaluasi rupiah, deregulasi, pengetatan pengeluaran pemerintah dan mendorong ekspor non migas. Deregulasi dan penghematan pengeluaran

pemerintah telah memberikan peluang kepada sektor swasta untuk mengambil peran dalam pembangunan.

Sejak tahun 1980, menurut laporan dari *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*, Indonesia telah menggungguli negara-negara berkembang lainnya dilihat dari kenaikan tahunan dalam nilai ekspor hasil-hasil industri. Selama tujuh tahun terakhir Indonesia memperoleh penghasilan sebesar 35 lebih banyak ketimbang lainnya, yang mana didapat dari ekspor sektor industri. Keberhasilan sektor industri pada tiga pelita sebelumnya yang menjadi landasan untuk masa berikutnya adalah peningkatan volume, mutu dan perluasan jenis industri. Pembangunan sektor industri pada masa tersebut telah memupuk kekuatan pada kemampuan mengelola unit usaha industri yang memperluas kesempatan kerja, menyebar ke berbagai daerah, meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja serta penguasaan teknologi. Namun dua persoalan dihadapi oleh pemerintah dalam sektor industri. Pertama adalah struktur industri yang masih menunjukkan kelemahan terutama pada keterkaitan antar industri dan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya. Pengembangan industri hulu yang dapat menyumbang nilai tambah pada produk industri baru dirintis pada Pelita III. Kemudian tingkat ketergantungan impor bahan baku, penolong dan modal masih sangat besar, yang mempengaruhi keseimbangan perdagangan luar negeri Indonesia. Impor bahan baku yang meningkat menyebabkan neraca perdagangan luar negeri menjadi berat sebelah. Persoalan kedua adalah masih lemahnya permodalan, penguasaan teknologi dan kemampuan rancang bangun serta rekayasa. Keadaan ini mengharuskan pemberian prioritas pada program keterkaitan antar skala usaha industri, dan juga dengan sektor ekonomi lainnya.

Dalam Pelita IV program ekspor komoditi industri terus dikembangkan. Dalam hal ini peran dunia usaha sangat diperlukan, sehingga kemampuan eksportir terus ditingkatkan. Sesuai pula dengan prioritas pembangunan sektor industri, usaha membangun industri dasar yang telah dirintis sejak Pelita III dilanjutkan.

Pengolahan bahan mentah dilakukan di luar pulau Jawa, mengingat sebagian besar sumber daya alam itu terdapat di kawasan

tersebut. Suatu konsepsi pengembangan wilayah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi pada zone industri disusun, dengan maksud agar pembangunan industri dasar itu tidak terpencair-pencar sehingga kurang efektif. Konsepsi itu dinamakan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang mengandung zone industri sebagai tempat kegiatan industri dasar, kawasan industri, pemukiman industri kecil dan sentra industri kecil. Pada Pelita IV ditentukan 5 WPPI, yakni di Sumatera bagian Utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Kalimantan bagian timur, dan Sulawesi bagian selatan. Sedangkan daerah lainnya direncanakan akan didirikan di masa mendatang. Dengan begitu, terlihat adanya kebijakan pemerintah yang berupaya menyebarkan sentra-sentra pengembangan industri sesuai dengan potensi dan karakteristik produk masing-masing daerah di Indonesia. (Hartarto, 1985)

Menjelang tahun 1987 Pangsa sektor industri mampu melebihi pendapatan pemerintah dari sektor ekspor migas. Ekspor hasil industri bernilai kira-kira US\$ 2,7 milyar sedangkan migas yang memberikan sumbangan 32 % dari total ekspor, berjumlah US\$ 2,5 milyar. Sektor industri memberi andil sekitar 76 % dari seluruh nilai ekspor non migas. Dengan itu, untuk pertama kalinya sektor industri menggantikan tempat sektor pertanian dan sektor pertambangan pada tahun 1987. Akan tetapi secara keseluruhan GDP berkisar 3,7 % , menurun dari tahun sebelumnya sebesar 4 %.

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam Repelita V mencatat berbagai kemajuan. Pelaksanaan pembangunan di dalam negeri tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan di luar negeri. Berakhirnya Krisis Teluk suatu pengolahan bersenjata yang berlangsung di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan sekutunya menghadapi Irak yang sebelumnya mengyering untuk menduduki Kuwait telah memberikan harapan baru akan kebangkitan kembali ekonomi dunia. Namun harapan itu tidak terwujud. Ekonomi dunia secara keseluruhan pada awal tahun 1990-an mengalami kemerosotan , dengan mengalami penurunan 0,3%. Hal yang serupa juga dialami oleh negara-negara Industri maju yang hanya bertumbuh sebesar 0.8 % pada tahun 1991. Dalam situasi itu, dampaknya segera terasa juga di negara-negara lainnya, seperti negara berkembang. (Lampiran Pidato Presiden 1992).

Di dalam negeri pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit perlambatan sebagai akibat dari kebijakan moneter untuk mendinginkan suhu perekonomian yang memanas dan terjadinya kekeringan yang melanda berbagai daerah. Keadaan ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam tahun 1989 dan 1990 laju pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 7,4 % per tahun. Pada tahun 1991 laju pertumbuhan ekonomi menurun sedikit menjadi 6,6% - Walau adanya perlambatan laju pertumbuhan ini tetap dalam batas yang memadai.

Tabel 19
Laju Pertumbuhan Beberapa Sektor Utama Tahun 1991

Sektor	Pertumbuhan
Pertanian	1,3 %
Pertambangan	9,3 %
Industri pengolahan	9,8 %
Perdagangan	5,4 %
Pengangkutan dan Komunikasi	71,0 %
Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	12,7 %

Laju pertumbuhan ekonomi yang cepat, sehingga memanas, dalam tahun 1989 dan 1990 terutama disebabkan oleh kegiatan investasi yang meningkat pesat baik dari kalangan PMDN maupun PMA. Pertumbuhan ekonomi yang cepat selanjutnya meningkatkan suhu perekonomian. Oleh karena tempo kegiatan ekonomi meningkat cepat uang yang beredar juga cenderung meningkat, dan bersamaan itu Pula berbagai kendala di bidang pra sarana mulai timbul, kelangkaan tenaga terampil muncul dan impor barang modal dan bahan baku berkembang pesat.

Menghadapi keadaan ini pada pertengahan tahun 1990 diambil langkah-langkah untuk segera memperketat peredaran uang. Langkah tersebut dipertegas dengan kebijakan pengendalian moneter pada akhir Februari 1991. Di samping itu dibentuk Tim Pinjaman Komersial

Luar Negeri (PKLN) yang bertugas mengelola sebaik-baiknya arus pinjaman komersil luar negeri agar jumlah keseluruhannya tetap dalam batas-batas yang aman bagi neraca pembayaran. Dampak segera terasa dengan mulai Bergeraknya ekspor non migas yang selama 1990/91 mengalami peningkatan kurang dari 10 %, pada tahun 1991/92 bangkit dan membubung hingga lebih 20 %.

Pada bulan Maret 1992 suatu keputusan politik ekonomi dicanangkan yang membubarkan IGGI (*Inter Governmental Group on Indonesia*). Selama 4 Pelita badan ini telah berfungsi sebagai donor pembangunan bagi Indonesia. Akan tetapi oleh karena salah satu negara anggotanya kerap menggunakan bantuan ekonomi sebagai senjata dalam mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia, badan itu dibubarkan dan diganti dengan suatu badan baru yang disebut sebagai CGI (*Consultative Group for Indonesia*).

Peningkatan ekspor non migas terutama sektor industri manufaktur tetap menjadi prioritas utama Pelita V. Paket deregulasi yang memberi peluang lebih besar kepada sektor swasta dalam mengisi pembangunan makin dipergiat. Selama Pelita V target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 % per tahun dapat dipenuhi, dengan pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 9,6 % tahun 1991, 9,7 % tahun 1992 dan 8,1% pada tahun 1993.

Peran ekspor non migas dalam penerimaan negara selama Pelita melampaui peran ekspor migas. Persentasinya dapat diikuti pada tabel di bawah ini.

Tabel 20
Ekspor non-Migas & Migas Selama Pelita, 1989--1994

Tahun Anggaran	% Migas	% Non Migas
1989/1990	39,15	60,85
1990/1991	44,79	55,21
1991/1992	36,16	43,84
1992/1993	32,30	67,70
1993/1994	23,92	76,08

Bersama itu, persentasi kontribusi pinjaman luar negeri dalam pembiayaan pembangunan juga semakin menurun dibandingkan

dengan meningkatnya pendapatan pemerintah dari sektor migas dan non migas, yakni sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Pinjaman	Pendapatan
1989/1990	68,14	31,86
1990/1991	50,92	49,08
1991/1992	47,82	52,18
1992/1993	44,40	55,60
1993/1994	43,48	56,52

Selama kurun waktu Rencana Pembangunan 25 tahun pertama peranan sektor minyak dan gas dalam kontribusinya pada penerimaan devisa negara makin menurun seiring dengan membesarnya sumbangan sektor non migas.

Periode	Sumbangan Migas	Sumbangan Non Migas
Pelita I	33,5%	66,5%
Pelita II	55,2%	44,8%
Pelita III	66,9%	31,1%
Pelita IV	50,5%	49,5%
Pelita IV	36,0%	64,0%

Sementara itu, ketergantungan Indonesia pada sumber dana internasional dalam membiayai pembangunan bervariasi tiap periode, pada Pelita I sebesar 77,1 %, Pelita II 34,8 %, Pelita III 30,0 %, Pelita IV 56,7 %, dan pada Pelita V sebesar 49,8%. Angka-angka ini apabila dikaitkan dengan meningkatnya nilai ekspor menunjukkan meningkatnya kemampuan Indonesia membayar pinjaman luar negeri.

Secara keseluruhan selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (selama 25 tahun) laju pertumbuhan ekonomi dalam perbandingan tingkat inflasi rata-rata adalah sebagai berikut :

Periode	Laju Pertumbuhan	Ekonomi Tingkat Inflasi
Pelita I	8,8 %	14,9 %
Pelita II	7,2 %	11,1%
Pelita III	6,1 %	13,2 %
Pelita IV	5,2 %	7,3 %
Pelita 1V	6,7 %	8,3 %

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 6,8 % selama rentangan waktu 25 tahun. Pengendalian laju inflasi memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menciptakan stabilitas perekonomian. Sementara pendapat nasional per kapita meningkat dari US\$ 70 pada tahun 1969 (awal Pelita I) menjadi US\$ 605 pada tahun 1992. Sementara laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan pada rata-rata 2,19 % per tahun pada periode 1971-1990. Jumlah penduduk yang bergulat di bawah garis kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15% dari jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 1990 dari sekitar 60 % dari total penduduk pada tahun 1970.

P E N U T U P

Penelitian mengenai periode kolonial dibahas dalam buku ini, masih dalam taraf permulaan. Masih banyak hal yang belum jelas, dan masih banyak perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang sudah diteliti. Ini adalah hal yang wajar dalam perkembangan sebuah ilmu yang masih muda seperti sejarah ekonomi Indonesia.

Soal-soal yang masih lebih baik adalah dampak ekonomi ini atas kehidupan penduduk. Apakah ada peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan pendapatan? Memang kini teori Geertz mulai banyak diragukan tetapi tidak dapat disangkal kenyataan bahwa sesungguhnya ada dua sistem ekonomi, pada satu pihak yang bersifat kapitalis (asing) dan pada pihak lain non-kapitalis (penduduk lokal). Memang di sana-sini muncul upaya-upaya yang cukup genius dari penduduk lokal untuk mengatasi keadaan itu, seperti hanya sistem karet rakyat atau sistem kelapa rakyat atau pun penjualan tembakau di Madura (Huib de Jonge). Penelitian-penelitian lain yang telah disebut di atas mengenai keadaan di Jawa juga sampai pada kesimpulan yang sama (Djoko Surjo 1989). Mungkin sekali kalau diteliti lebih jauh ada bentuk-bentuk lainnya yang berupaya "menjembatani" kedua sistem ekonomi itu.

Masalah pengaliran keuntungan dari daerah jajahan ke negeri induk adalah suatu hal yang sudah sejak masa penjajahan telah menjadi bulan-bulan kaum politisi. Tetapi bagaimana keadaan sesungguhnya atau masalah pembentukan modal di zaman cultuurstelsel? Bagaimana struktur ekonomi para saudagar Cina? Mengapa tidak terjadi

industrialisasi di Indonesia yang menghasilkan begitu banyak bahan baku industri? Bagaimana struktur perusahaan-perusahaan asing juga banyak menarik perhatian para peneliti. Contoh penelitian mengenai KPM di akhir bab III belum banyak menarik perhatian para peneliti. Dan masih banyak pertanyaan lain yang pasti akan muncul setelah masalah tersebut di atas diteliti.

Simpulan

Sekali pun keadaan sejarah ekonomi Indonesia masih pada tahapan awal, namun demikian kini telah bisa dibuat suatu kesimpulan yang betapapun sementara tetapi bisa membantu kita memahami sejarah okonomi Indonesia. Kesimpulan ini menggabungkan bab II dan bab III yang sesungguhnya berkesinambungan.

Nusantara kita pernah memiliki dinamikanya sendiri paling kurang sejak abad ke-15. Melalui Malaka berbagai emporium yang terbentuk di Nusantara ini menyalurkan komoditi dagang seperti rempah-rempah dan mendistribusi berbagai bahan kebutuhan yang dihasilkan diberbagai penjuru dunia. Menurut perhitungan Prof. Anthony Reid, perkembangan ekonomi Indonesia ini mencapai puncaknya pada tahun-tahun 1570 hingga 1620 dan lenyap samasekali pada tahun 1880.

Keruntuhan pelayaran-niaga Indonesia itu terutama disebabkan oleh sistem perdagangan barat. Perusahaan-perusahaan Barat seperti East India Company (EIC) dan Verenigde Oost-indische Compagnie (VOC) memiliki dua ciri yang tidak terdapat pada para saudagar Indonesia, Bahkan Asia. Ciri pertama adalah apa yang oleh Prof. Chaudhuri dinamakan "*armed trade*". Kapal-kapal dagang Barat dilengkapi dengan senjata berat dan tentaranya sendiri. Untuk menguasai pasaran di suatu tempat mereka membangun benteng-benteng batu yang sangat besar yang belum pernah ada pula di Indonesia. Wilayah pelayaran dikuasai melalui sistem pas jalan yang dikeluarkan oleh benteng-benteng itu dan yang diawasi oleh armada tersebut.

Ciri kedua adalah apa yang oleh Chaudhuri juga disebut "*administerd trade*". Perusahaan-perusahaan dagang Barat memiliki

suatu sistem administrasi yang sangat lengkap dengan birokrasi yang cukup handal. Melalui jaringan birokrasi dagang itu mereka bisa mengendalikan perdagangan hampir diseluruh Asia. Para saudagar Asia, termasuk Indonesia, pada umumnya hanya memiliki hubungan-hubungan informal melalui keluarga atau kerabat.

Dengan demikian sudah sejak tahun 1680 VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, satu-satunya komoditi yang ada permintaannya diberbagai benua. Sekalipun pada tahun 1799 VOC dinyatakan "bangkrut" dan dibubarkan, dan milik bergerak dan tidak Bergeraknya (terutama di Indonesia) diambil-alih oleh pemerintah Belanda yang menutupi hutang-hutangnya namun peristiwa itu bukan akhir dari suatu perkembangan.

Wilayah yang telah dikuasai VOC dan yang kemudian diperluas lagi oleh Hindia Belanda (sejak 1817), tetap menjadi sumber kekayaan bagi Belanda. Bermula dengan sistem monopoli VOC, kemudian melalui modal swasta wilayah Indonesia tetap berada dalam cengkraman kolonialisme.

Malah sejak abad ke-19 ekonomi Indonesia makin banyak mengalami diversifikasi dan terkait dalam pasaran internasional. Dan dikatakan bahwa sejak abad ke-19 telah terjadi pembangunan ekonomi, sekalipun lebih banyak menguntungkan pihak saing dari pada pihak Indonesia sendiri. Dengan dilandasi oleh sistem ekonomi inilah Indonesia memasuki "gerbang kemerdekaannya" dan mulai membenahi sendiri sistem ekonomi itu untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Perkembangan selanjutnya sejak awal kemerdekaan Indonesia sampai pada masa orde baru memperlihatkan peningkatan dan pencapaian target pembangunan. Pengembangan sektor pertanian memperlihatkan hasilnya dengan tercapainya swasembada pangan pada tahun 1984. Disamping keberhasilan di sektor pertanian, pembangunan di sektor industri menempatkan Indonesia ke tempat Negara Industri Baru (*Newly Industrial States*) yang diperhitungkan di dunia internasional.

Sektor industri memperlihatkan perkembangan yang makin meninggalkan ciri dualisme seperti yang berlaku pada masa kolonial.

Kesenjangan tersebut berasal dari perbedaan kemampuan bertumbuh antara sektor modern dan sektor tradisional. Selama program pembangunan 5 Repelita anggapan itu terbukti tidak berdasar. Sejak Pelita II perkembangan sektor industri memperlihatkan bahwa industri kecil dan rumah tangga memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi ketimbang perusahaan menengah dan besar. Di sisi lain, sektor industri modern memperlihatkan gejala akumulasi modal yang tidak hanya berlaku di perusahaan pemerintah, namun juga di sektor swasta.

Sektor swasta mampu melakukan pembentukan modal dan terjun dalam kegiatan pembangunan berskala besar. Perlahan-lahan sesuai dengan garis kebijakan pemerintah, peran sektor swasta semakin besar dalam mengisi pembangunan. Dengan itu tampak bahwa proses industrialisasi merupakan pula proses Indonesianisasi baik swasta dan pemerintah. Walau modal internasional masih memberikan andil tertentu terlihat kekuatan modal dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan terhadap modal dari luar.

Kemajuan yang diperoleh pada 25 tahun pertama rencana pembangunan ekonomi merupakan dasar kokoh untuk memasuki tahap selanjutnya.

Target Pembangunan Jangka Panjang II adalah penetapan dan pemantapan industri nasional yang diharapkan meningkat dan menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Arah kebijakan industri juga digariskan menuju suatu pemantapan struktur industri dalam rangka menciptakan keterpaduan vertikal dan horisontal baik intra sektor industri maupun antar sektor ekonomi lainnya. Pada gilirannya akan tercipta suatu struktur ekonomi nasional yang terpadu dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

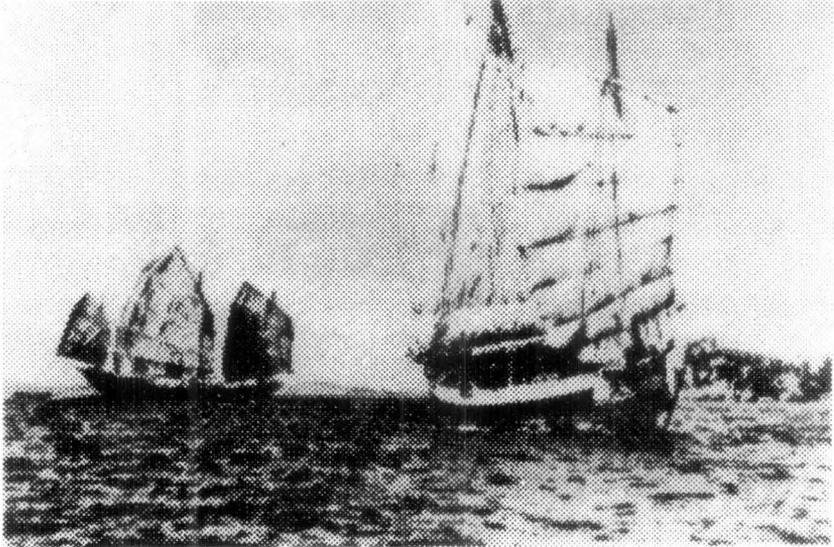
- Booth, Anne (1993), *Growth and Stagnation in an Era of Nation Building*. Amsterdam, Seminar Sejarah Ekonomi Indonesia.
- Booth, Anne dan Peter Mc. Cawley, (1990), *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta LP 3ES
- Booth, Anne, William J.O. Malley, Anna Weidemann, (eds.), (1988) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta LP 3ES.
- Reid Anthony (1993), *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Arndt, H.W. (1991), *Pembangunan Seorang tetangga*, Gajah Mada University Prees.
- Burger, Peter Terjemahan Prayudi, (1962), *Sejarah Ekonomis Sosilogis Indonesia*. Jakarta : Pradnyaparamita.
- Campo, J.N.F.M, (1992), *Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Stoomvaart en Staatvorming ini de Indonesische Archipel, 1888 - 1914*. Hilversum : verloren
- Dick, Howard, (1987), *The Indonesian Inter Island Shipping Industry, An Analysis of Competition and Regulation*, Singapore : Institute of Southeast Asia Studies.
- Surjo, Djoko, (1989), *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830 - 1900*. Yogyakarta : PAU-UGM.

- Suroyo, Djuliaty, A.M, *Labour in Java Before and During The Cultivation System dalam Linblad (ed).*
- Wilson, Donald W. (1992), *Dari Era Pergolakan Menuju Era Swasembada.* Jakarta : Yayasan Persada Nusantara.
- Paauw, Douglas S. (1992), *From Kolonial To Guided Economy.* New Haven : Yale Universty.
- Elson, R.E, *Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani Pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa, dalam Both, O'Malley, Weidemann (eds.), op.cit. him. 38-73.*
- Fasseur, Cornelis, (1992), *The Politics of Colonial Explotation, Java, The Dutch, and the Cultivication System.* Cornel University Press.
- Fernando, R.M, *Growth of Non-Agriculture Indegenous Economic Activities in Java, 1830-1880, dalam Lindbland, op. cit. hlm, 89-109.*
- Fernando, R.M and David Bulbeck, (1992), *Chinese Economic Activity in Netherlands India. Selected Translation from the Dutch.* Singapore : Institute of Sutheast Asian Studies.
- Franssen, CJH, (1941), *Preahistorische Warkingen in de Omgeving van Leuwilliang in de Residentie Buitenzorg, TBG: 81.*
- Heekeren H.R van and Eigel Khuth, (1967), *Archeological Excavations in Thailand Vo. I.* Copenhagen: Munksgaard.
- Hartarto, " *Menumbuhkan Pohon Industri dan Keterkaitannya* " Prisma S, 1985.
- Houben J.H., Wincent, *Economic Policy in the Pricipalities of Central Java in The Nineteenth Century,* dalam Maddison and Prince, op. cit. hlm. 185-202.
- Houben W.J.H., *Private Estats In Java in The Nineteenth Century A. Reappraisal dalam Linbland, op. cit.*

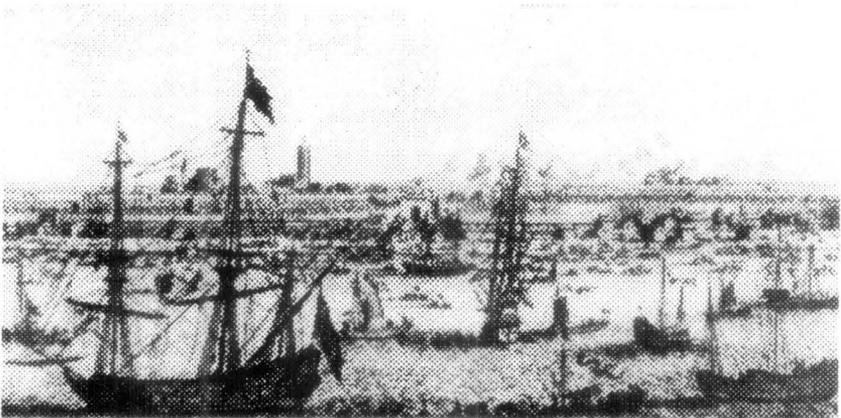
- De Jonge, (1988), *Handelaren en Handlangers. Ondernemerschap, Economische Ontwikkeling en Islam of Madura*. Dordrecht-Proceedings Third Congress of Prehistorians of the Far East.
- Koetjaraningrat, (1971), *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta.
- Kurasawa, Aiko, *Mobilisasi dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta PT. Gramedia Widrasarana Indonesia 1993 Lampiran Pidato Kene Indonesia Sidang DPR tanggal 15 Agustus 1992.
- Leirissa, RZ, (1994), "*Copracontracten : An Indication of Economic Development in Minahasa During The Late Colonial Periode*", *Makalah pada Academy Colloquium : Historical Foundations of A National Economy in Indonesia 1890-1994*, diselenggarakan oleh Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam 20-22 September 1994.
- Leirissa, RZ, (1992), *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Leirissa, RZ, (1993), "*The Structure of Makasar-Bugis Trade in Premodern Moluccas*", dalam *Review of Indonesia and Malaysian Affairs*, Vol 27, No. 1 & 2
- Linbland, Thomas, (1993) (ed.), *New Challenge in the Modern Economic History of Indonesia*. Leiden : Programme of Indonesian Studies.
- Linbland, Thomas, *Economic Growth in The Cuther Islands*, dalam Linblad (ed.), *loc. cit.* hlm. 233-263.
- Marwati Dj. Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, (ed.), (1190), *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta : Depdikbud.
- Rulofz, Meilink , (1962), *Asian Trade and European Influence in The Hague, Nijhoff*.
- Oey Beng To, (119), *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia I, (1945 - 1958)*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

- Paauw, Douglas, (1967) *"From Colonial to Guided Economy"* dalam Ruth Mcvey (ed.) *Indonesia Haven*, Yale University.
- Kartodirdjo Sartono, (1987) *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500 - 1900 Dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Schouten Lke, (1993), *Minahasan Metamorphoses, Leadership and Social Abolity in a Southeast Asian Society c. 1680-1983*. Disertasi Universiteit Amsterdam.
- Soejono RP. (1961), *"Kebudayaan Pacitan"*. Jakarta: *Majalah Ilmu Pengetahuan*.
- Soejono RP, (1961), *"Ichtisar Hasil-hasil Prasejarah di Flores Selama Masa 1956-1958"*, Jakarta : *Medan Ilmu Pengetahuan II/1*.
- Syahrir, (1986), *"Perencanaan Ekonomi Indonesia, Ide Perencanaan dan Implementasi"*, Jakarta: *Prisma*, Oktober.
- The Kian Wie, *Explorations in Indonesian Economic History*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- The Kian Wie, *The Development of Sumatra*, dalam Maddison dan Mace, op. cit. hlm. 133-158.
- Twiede, MWF, (1953), *"The Stone Age of Malaya"*, *Singapore: Journal of The Malayan Branch of Royal Society*, 26
- Van Leur, (1957), *Indonesia Trade and Society* The Hague, Nijhof.
- Wayong, P. (1977), *Geografi Budaya Daerah* Jakarta: Depdikbud, Proyek Media Kebudayaan.
- Young Smeth, R. *Sistem Tanam Paksa di Sumatra Barat: Stagnasi Ekonomi dan Jala Buntu Alam Politik*, dalam Booth, O'Malley, Anna Weidenann (eds.).

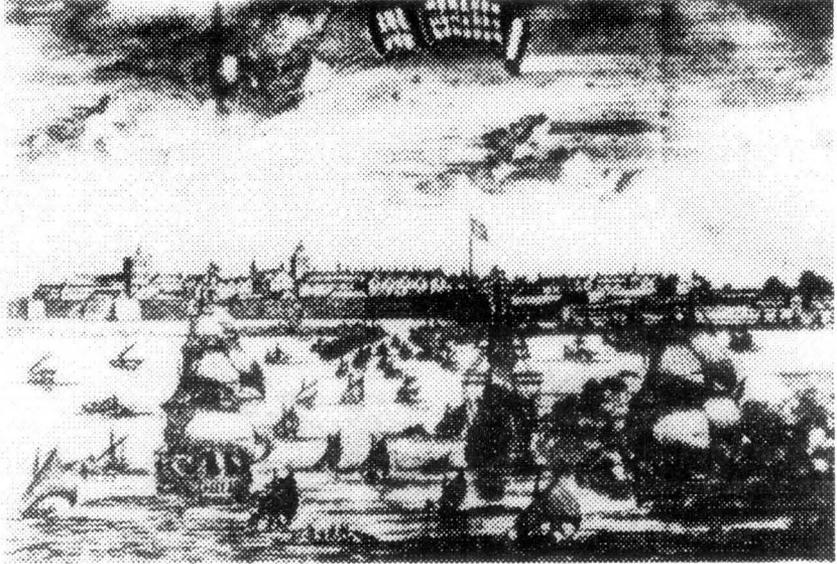
FOTO / GAMBAR



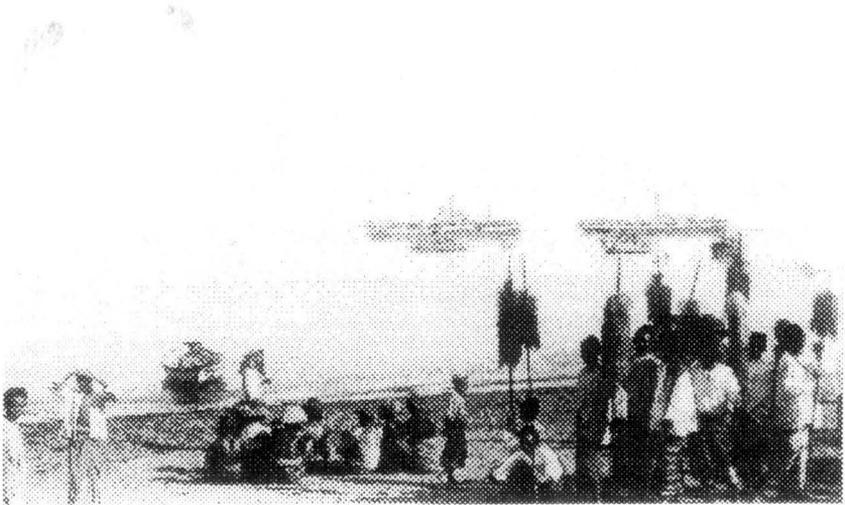
Gambar 1 : Perahu Jung Cina di perairan Pulau Sambu, Kepulauan Riau, pantai timur Sumatera.



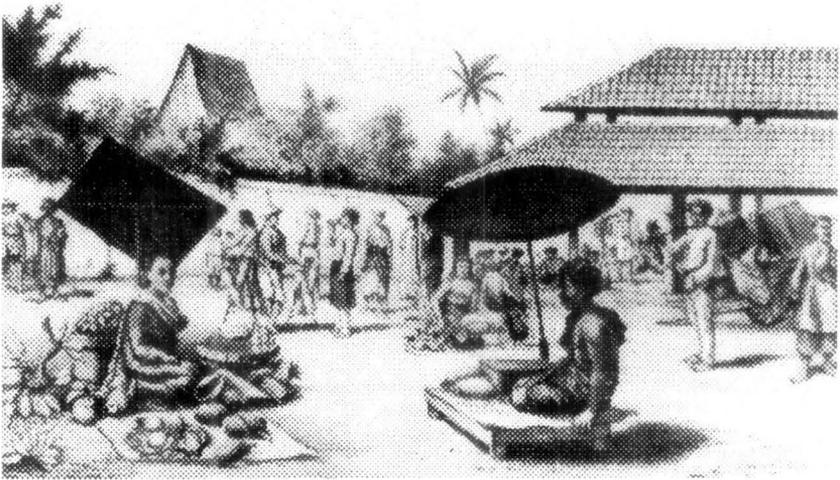
Gambar 2 : Bandar Kanton yang sangat penting untuk perdagangan internasional. Pada abad ke-17 Kanton unggul atas ibu kota lain di Cina karena kekayaan kapalnya bermacam-macam.



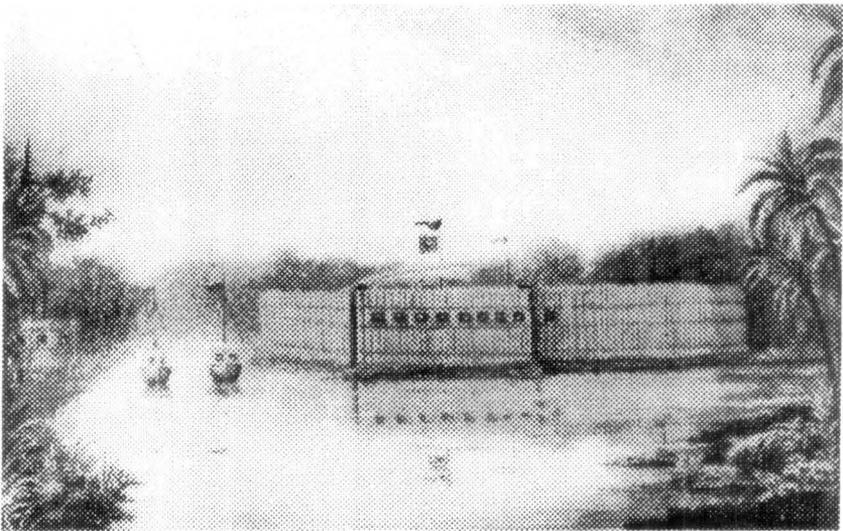
Gambar 3 : Kantor Dagang di Negapatman di Pantai Coromandel, sebelah Timur India.



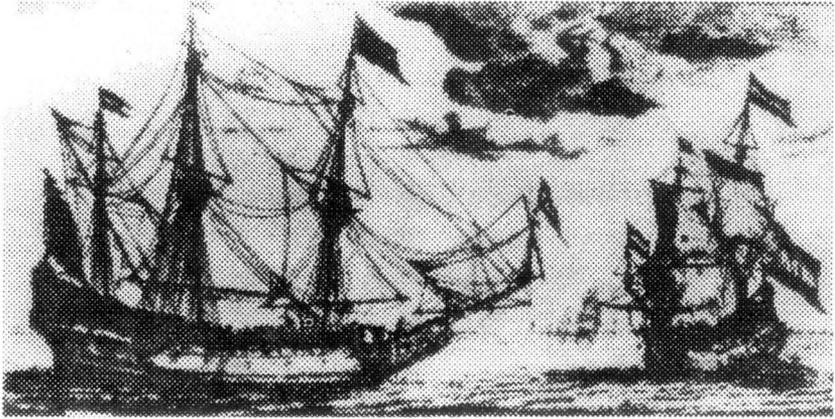
Gambar 4 : Kapal-kapal Paketvaart di Pelabuhan Alam Buleleng-Bali di tahun duapuluhan. abad yang lalu.



Gambar 5 : Sebuah pasar, tempat tukar-menukar uang.



Gambar 6 : Satu di antara benteng-benteng VOC di Maluku pada abad ke-17 dan 18



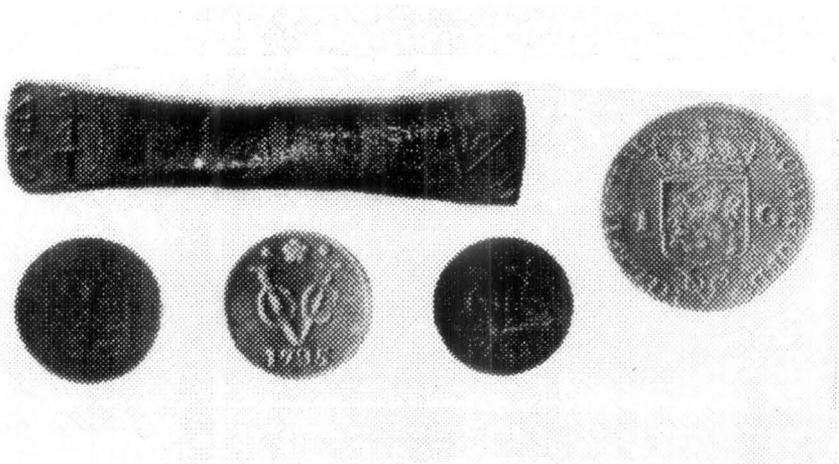
Gambar 7 : Kapal-kapal dagang abad ke-17



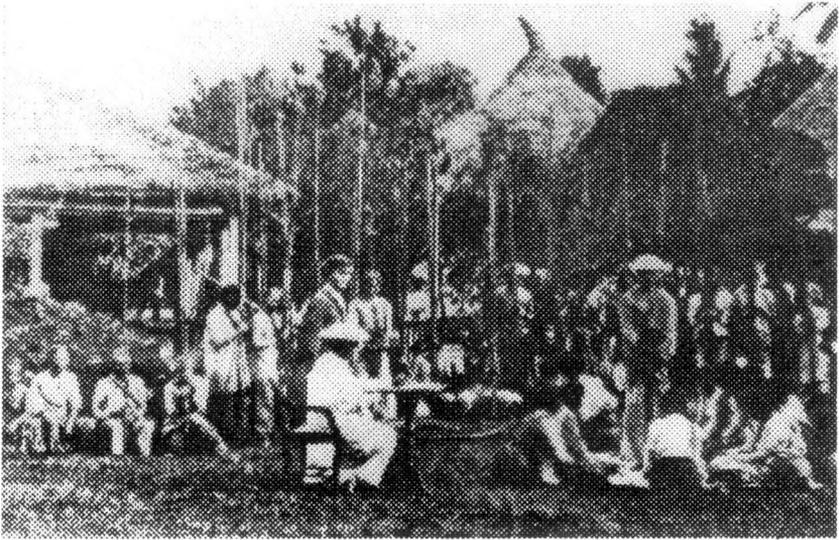
Gambar 8 : Pieter van den Broecke, pengganti Jan Pietersz Coen sebagai pimpinan benteng dekat Jayakarta tahu 1618



Gambar 9 : Tempat pengeringan Cengkeh di Ambon-Maluku pada abad ke-17



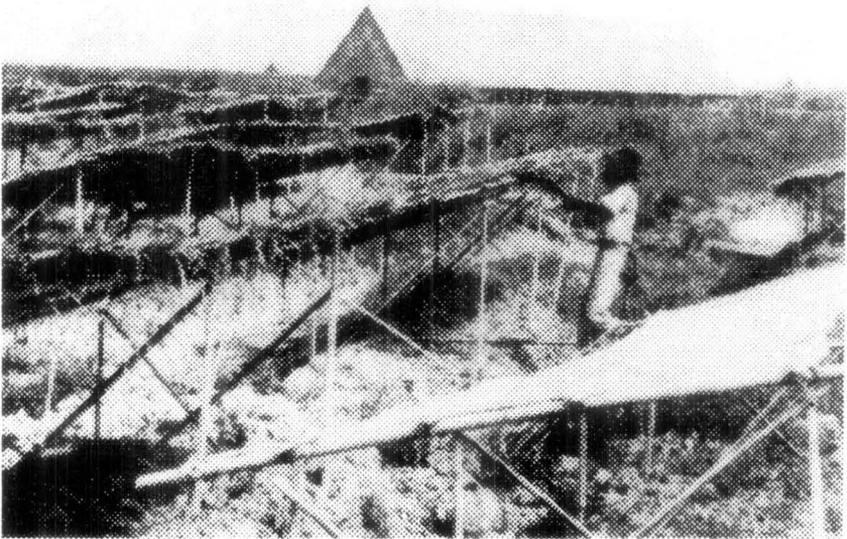
Gambar 10 : Beberapa jenis mata uang abad ke-18



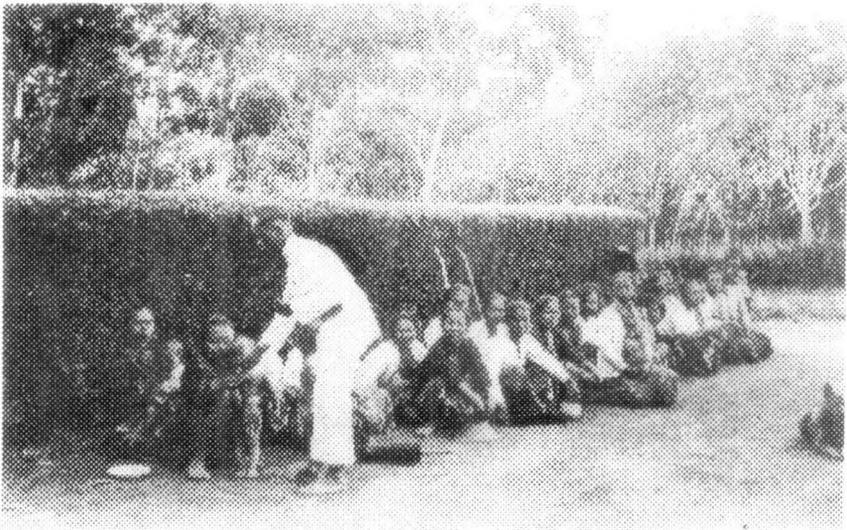
Gambar 11 : Budak-budak pemetik buah pala menyerahkan hasil panennya. Tahun 1860 pemetik buah pala dilakukan oleh budak kaum parkenier.



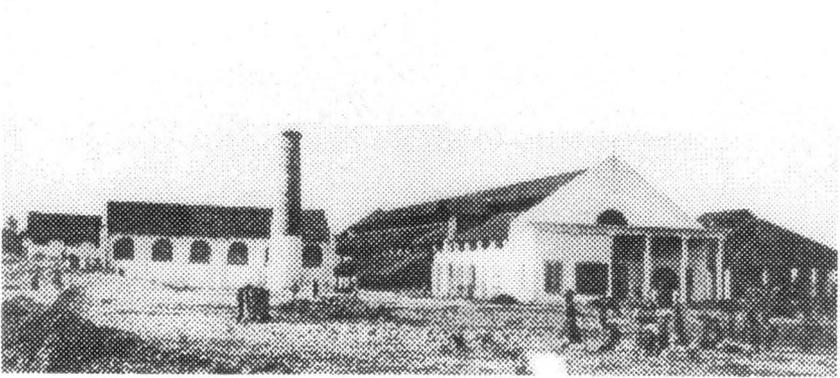
Gambar 12 : Kemasan-kemasan tembakau Deli-Sumatera Timur siap dikirim ke Negeri Belanda.



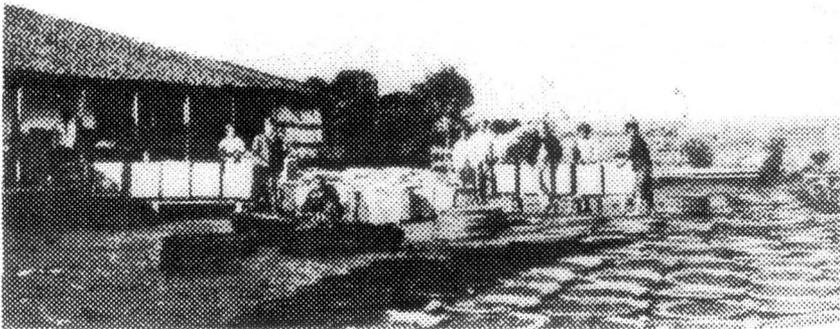
Gambar 13 : Sebuah tempat penyemaian bibit tembakau di perkebunan sekitar Medan-Sumatera Timur.



Gambar 14 : Para buruh wanita Jawa di perkebunan tembakau di Sumatera Timur sekitar tahun 1920.



Gambar 15 : Pabrik Gula Colomadu di Desa Malangjiwan-Solo, didirikan oleh Pangeran Mangkunegoro IV tahun 1861.



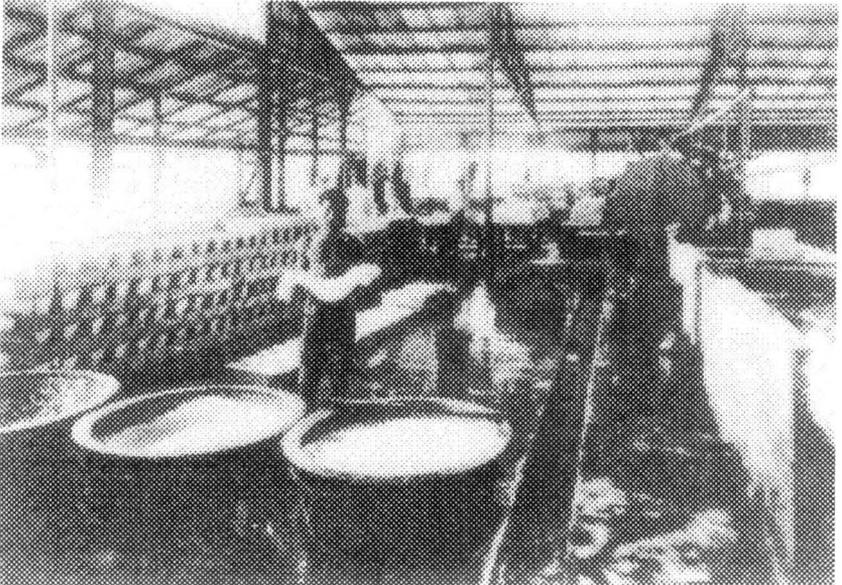
Gambar 16 : Pekerja menyortir daun teh di Perkebunan Waspada dekat Garut Jawa Barat sebelum tahun 1874.



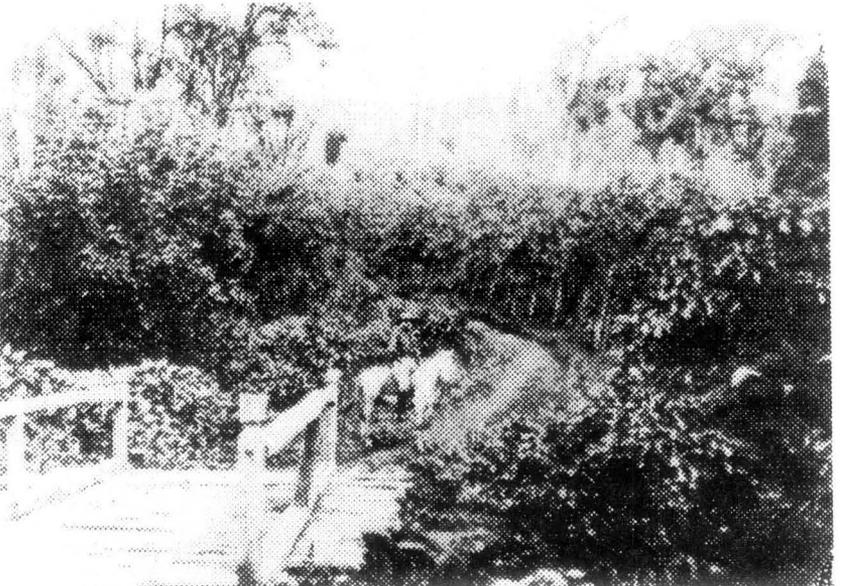
Gambar 17 : Proses pengeringan kelapa menjadi kopra



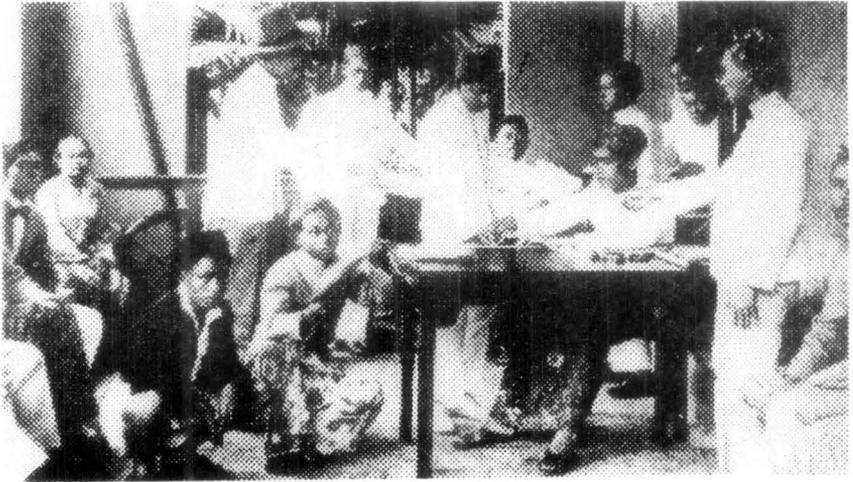
Gambar 18 : Stasiun penelitian pohon kelapa sawit di Jawa Tengah



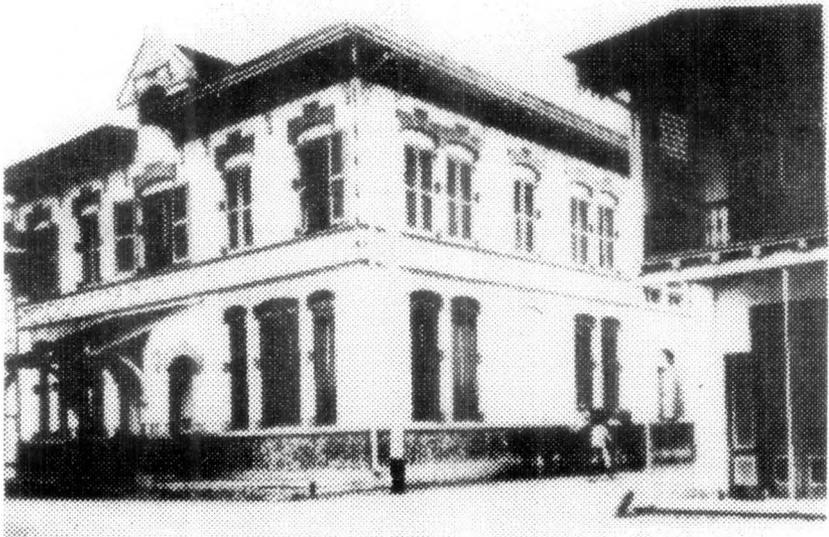
Gambar 19 : Pabrik karet di Sumatera Timur



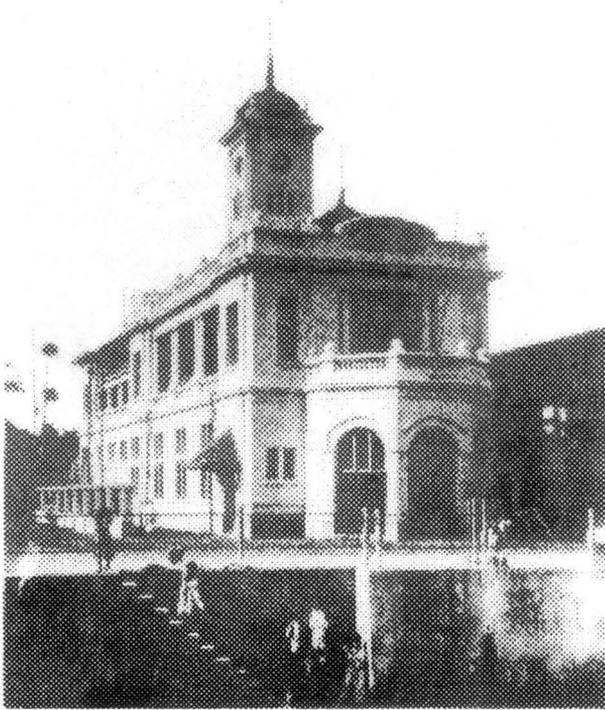
Gambar 20 : Kebun kina di Cibereum Jawa Barat tahun 870



Gambar 21 : Sebuah Bank Kredit Rakyat pada awal abad ke-20



Gambar 22 : Bank Niaga Hindia Belanda di Semarang, kantor pusatnya berada di Amsterdam sejak tahun 1863.



Gambar 23 : Cabang kantor dagang Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) di Batavia pusat, didirikan pada tahun 1824 oleh Raja Williem.

